JAZILUL FAWAID SANTRI PUNYA KAPASITAS SEBAGAI PEMIMPIN

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.11/TH.XVII/NOVEMBER 2023

Pemilihan Umum Presiden 2024

AKHIRNYA DIIKUTI TIGA PASANGAN Capres dan Cawapres

ISSN 0854-6371
9 770854 637158

30 **Nasional** Generasi Muda Berada di Garda Terdepan Selamatkan Kiblat Bangsa

32 **Kajian MPR** Tahapan Yang Perlu Dilalui Untuk Amandemen

39 **Selingan** Pasar Sabtu di Antara Pohon De Nabang

60 **Sosialisasi** Daerah Harus Punya Program Besar Skala Nasional

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

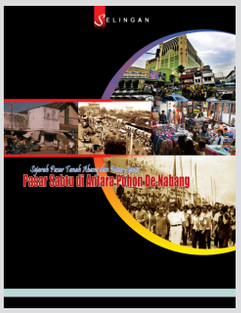

39 SELINGAN
Pasar Sabtu di Antara Pohon De Nabang

78 Wawancara
Mardani Ali Sera

08 BERITA UTAMA

Pemilihan Umum Presiden 2024

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti tiga pasangan Capres dan Cawapres, yaitu: pasangan Capres - Cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar; pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka; dan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pilpres 2024 adalah kontestasi di antara putera terbaik bangsa. Siapa pun yang dicalonkan pasti merupakan anak bangsa yang berprestasi dan memiliki rekam jejak memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara.

16 Nasional
Bamsoet: Dorong Generasi Muda Kembangkan Wirausaha

58 Sosialisasi
Jaga Kerukunan Antar Ummat Beragama

Pengantar Redaksi 04
Perspektif 06
Kolom 36
Aspirasi Masyarakat 47
Gema Pancasila 48
Varia MPR 70
Wawancara 74
Figur 80
Ragam 82
Dari Rumah Kebangsaan 84
Rehal 86

COVER
Edisi No.11/TH.XVII/November 2023
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Pengantar Redaksi

Pemilu Presiden 2024
Tiga Pasangan Capres – Cawapres Berkontestasi

PENDAFTARAN bakal calon presiden (Bacapres) dan calon wakil presiden (Bacawapres) telah selesai dan resmi ditutup. Tiga pasangan Bacapres dan Bacawapers sudah resmi mendaftar di masa pendaftaran pada 19 Oktober 2023 sampai 25 Oktober 2023 sebagai peserta Pemilihan Presiden 2024. Pasangan Bacapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pendaftar pertama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19 Oktober 2023, disusul pasangan Ganjar Pranowo dan Mafud Md pada hari yang sama. Terakhir, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar di hari terakhir pendaftaran pada 25 Oktober 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini disebut sebagai presidential threshold.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen. Dengan jumlah itu maka pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar didukung tiga partai politik di parlemen, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Total kursi ketiga partai di DPR sebanyak 167 kursi atau setara dengan 29,04%. Kemudian pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md diusung gabungan partai politik, yaitu PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Perindo. Total suara gabungan partai itu adalah 39.276.935 atau setara dengan 28,06%.

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mendaftar terkakhir di KPU memiliki total suara partai pendukung paling besar. Pasangan ini diusung gabungan partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda. Total suara gabungan parpol ini mencapai 59.726.053 suara atau setara dengan 42,67%.

KPU selanjutnya melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan Bacapres dan Bacawapres ini, dilengkapi dengan hasil pemeriksaan kesehatan ketiga pasangan itu dari RSPAD Gatot Subroto. Hasil akhir dari rangkaian verifikasi administrasi syarat Bacapres dan Bacawapres itu ditetapkan KPU pada gelaran penetapan Capres dan Cawapres 13 November 2023. Selanjutnya KPU melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang digelar pada 14 November 2023.

Dengan ditetapkannya tiga pasangan Capres dan Cawapres yang akan berkontestasi pada Pemilihan Presiden 2024, maka Pilpres 2024 ini akan berbeda dengan dua Pilpres sebelumnya (tahun 2014 dan 2019) yang hanya diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres. Tak pernah bisa dilupakan kontestasi Pilpres yang hanya diikuti dua pasang Capres dan Cawapres pada dua Pilpres sebelumnya (2014 dan 2019) itu berjalan penuh ketegangan dan terjadi polarisasi tajam di tengah masyarakat.

Sekarang ini ada semacam gelombang besar dari rakyat yang menginginkan tidak terulangnya kembali dan menghindari adanya polarisasi tajam di tengah masyarakat seperti pada dua Pilpres sebelumnya. Rakyat menginginkan semua Capres dan Cawapres mengedepankan gagasan cerdas untuk kemajuan bangsa. Pada akhirnya kita berharap kontestasi Pilpres 2024 bisa menghadirkan Pilpres yang sejuk dan penuh gagasan. Kita semua menginginkan Pilpres 2024 berjalan sejuk, bermartabat, saling menghargai, bukan hanya antarkandidat, tetapi juga antarpendukung masing-masing Capres dan Cawapres. ❏

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
Plt. Siti Fauziah
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
DEWAN REDAKSI
Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Indro Gutomo
KOORDINATOR REPORTASE
Dhina Kurnia Winanda
REDAKTUR FOTO
Oni Arief Benyamin, Slamet Eko Suprayitno
REPORTER
Yenita Revi, Try Syilvani, Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta, Alfonso DK Tahapary
FOTOGRAFER
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Faridz Rizky, Wira, Subhan
PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI
Cucu Riwayati
STAF DISTRIBUSI
Ati Oktafia, Anggun Permana, Achmad Farobi, Widya Permataningrum
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

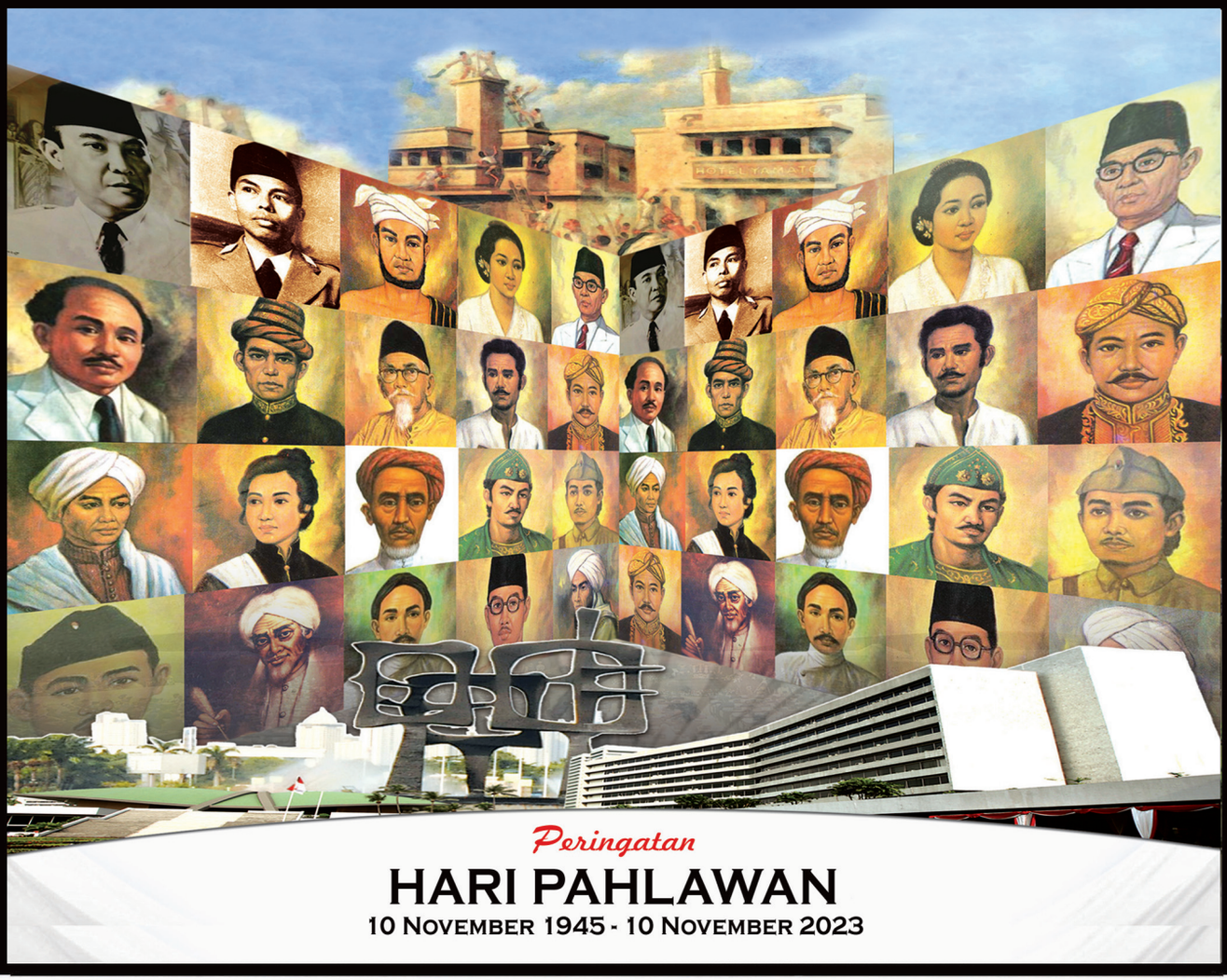
Peringatan
HARI PAHLAWAN
10 November 1945 - 10 November 2023

MPR - RI
EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

Kembalikan Kekuasaan Tertinggi Rakyat dengan Kuasa Menetapkan

ELIMINASI atas wewenang subjektif superlatif dari MPR RI sama artinya dengan reduksi atas kekuasaan tertinggi yang melekat pada rakyat yang berdaulat. Kuasa menetapkan arah negara-bangsa oleh rakyat berdaulat patut dipulihkan, untuk melengkapi terpenuhinya kuasa memilih presiden dan kuasa memilih anggota parlemen.

Pemahaman pada makna kedaulatan rakyat hendaknya utuh. Jangan sepotong-sepotong. Begitu pun dengan penerapan atau manifestasi kedaulatan rakyat itu sendiri. Haruslah utuh dan sepenuhnya. Sekadar menyegarkan ingatan, Kedaulatan Rakyat Indonesia itu final, karena nyata-nyata telah dimeteraikan dalam sila ke-4 pancasila; yakni: "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Sila keempat ini pun final yang mau tak mau harus ditaati tanpa syarat. Sila ini menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara-bangsa ada di tangan rakyat.

Konsekuensi logis dari kesediaan memurnikan manifestasi kedaulatan rakyat adalah pengakuan tanpa syarat bahwa sumber kekuasaan negara-bangsa adalah rakyat itu sendiri. Pemerintah pun harus lahir dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan semata-mata mengabdi pada rakyat. Maka, rakyat menggunakan kekuasaannya memilih presiden sebagai mandataris rakyat, serta menunjuk atau memilih wakil-wakil mereka untuk mengisi dan berperan menyuarakan aspirasi dalam lembaga atau dewan perwakilan.

Dalam konteks rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, kuasa rakyat memilih presiden sudah terpenuhi, dan oleh karenanya presiden adalah mandataris rakyat. Demikian pula dengan kekuasaan tertinggi rakyat untuk memilih anggota parlemen yang berujung pada konsekuensi bahwa anggota DPR/DPRD/DPD sebagai wakil rakyat wajib menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi atau kepentingan rakyat.

Namun, makna kekuasaan tertinggi rakyat menjadi tidak sempurna lagi karena dihilangkannya kuasa permusyawaratan rakyat memberikan mandat kepada mandaris-nya, presiden. Sebagaimana diketahui, dengan memberlakukan pasal 7 Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tersirat kesimpulan atau ketetapan bahwa MPR tidak bisa lagi membuat Ketetapan MPR.

Muncul dua kontradiksi dari pemberlakuan UU dimaksud. Per esensi, Pasal 7 UU No.12/2011 mengingkari hierarki perundang-undangan yang menempatkan Ketetapan (TAP) MPR pada urutan kedua setelah UUD 1945. Pasal ini hanya menerima TAP MPRS dan TAP MPR sampai tahun 2002. Dengan menghapus wewenang subjektif superlatif dari MPR RI, untuk apa lagi menempatkan TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan? Bukankah setelah tahun 2002 MPR tak lagi boleh melaksanakan konstitusional-nya membuat TAP MPR?

Kontradiksi kedua adalah hilangnya hak dan kewajiban antara rakyat dengan mandatarisnya. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hak rakyat memberi mandat kepada mandataris telah dieliminasi.. Dan, kewajiban presiden sebagai mandataris untuk menerima mandat dari rakyat pun otomatis dihilangkan. Maka, tidak relevan lagi untuk memosisikan Presiden sebagai mandataris rakyat.

Konsekuensinya logisnya, hierarki perundang-undangan pun patut diubah, antara lain dengan menggusur TAP MPR dari hierarki perundang-undangan itu. Sebab, hierarki atau tata urutan perundang-undangan negara yang masih berlaku adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR; UU/Perppu; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kalau pun hierarki itu tetap dipertahankan, tata urutan hukum itu tetap saja kehilangan makna strategisnya selama wewenang subjektif superlatif MPR RI tidak dipulihkan. Sebaliknya, kalau hierarki perundang-undangan itu ingin tetap dipertahankan dan bermakna strategis, konsekuensi logisnya adalah mengeliminasi penjelasan

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.
Ketua MPR RI

pasal 7 UU No.12/2011 melalui judicial review.

Minimal, ada dua makna strategis dari kesediaan memulihkan wewenang subyektif superlatif MPR RI. Makna pertama, mengembalikan dan menyempurnakan kekuasaan tertinggi rakyat untuk membuat TAP MPR. Sebab, TAP MPR patut dimaknai dan diterima sebagai sebuah rumusan apirasi terbaik menurut semua elemen masyarakat negara-bangsa. Bukankah untuk memenuhi berbagai aspek kepentingannya, rakyat selalu didorong untuk pro aktif dalam proses merumuskan ragam kebijakan strategis.

Lebih dari itu, setiap kebijakan strategis yang terbit dan diberlakukan melalui TAP MPR patut dipahami sebagai sebuah inisiatif yang tujuannya semata-mata demi kebaikan bersama semua elemen rakyat negara-bangsa. Sebab, kebijakan strategis atau TAP MPR itu lahir dari kesepakatan semua elemen rakyat dalam majelis permusyawaratan/perwakilan yang konstitusional.

Makna strategis kedua dari kemauan memulihkan wewenang subyektif superlatif pada MPR RI adalah menyempurnakan serta mempertegas lagi hak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemberi mandat, dengan kewajiban presiden sebagai mandataris rakyat melaksanakan mandat rakyat. Dengan penegasan akan hak dan kewajiban itu, presiden selaku mandataris rakyat menjadi benar-benar bermakna strategis dan konstitusional.

Sebaliknya, mengeliminasi wewenang subjektif superlatif dari MPR patut dipahami sebagai tindakan mereduksi kekuasaan tertinggi rakyat, utamanya kuasa memberi mandat kepada presiden selaku mandataris rakyat. Dan, sudah barang tentu ketetapan bahwa presiden sebagai mandataris rakyat itu pun benar-benar kehilangan makna. Sebab, dengan vakumnya wewenang subyektif superlatif pada MPR, tidakkah itu berarti menghalangi rakyat memberi mandat kepada presiden atau kepala pemerintahan yang telah dipilih oleh rakyat?

Karena presiden dipilih rakyat, mandat rakyat kepada mandatarisnya adalah keniscayaan. Mandat rakyat itu wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Pengawasan atas kepatuhan dan pelaksanaan mandat rakyat itu dilakukan bersama-sama oleh DPR-MPR.

Sebaliknya, jika presiden merasa tidak ada kewajiban menerima mandat langsung dari rakyat yang memilihnya, salah satu potensi risiko yang muncul kemudian adalah kesewenang-wenangan pada berbagai aspek, baik aspek tata kelola pemerintahan maupun aspek pembangunan.

Akhirnya, kendati rakyat Indonesia berdaulat, adalah fakta bahwa kuasa rakyat menetapkan arah atau masa depan negara-bangsa melalui permusyawaratan/perwakilan saat ini belum terpenuhi. Fakta ini adalah bentuk pengingkaran pada sila ke-4 Pancasila; “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Maka, Kuasa rakyat menetapkan melalui TAP MPR itu hendaknya segera dipulihkan, sekaligus sebagai wujud pemurnian akan manifestasi kedaulatan rakyat yang menjadi sumber kekuasaan negara-bangsa. ❑

Pemilihan Umum Presiden 2024

Akhirnya Diikuti Tiga Pasangan Capres dan Cawapres

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti tiga pasangan Capres dan Cawapres, yaitu: pasangan Capres - Cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar; pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka; dan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pilpres 2024 adalah kontestasi di antara putera terbaik bangsa. Siapa pun yang dicalonkan pasti merupakan anak bangsa yang berprestasi dan memiliki rekam jejak memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara.

HUJAN berskala ringan mengguyur seputar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada Selasa malam, 14 November 2023. Hujan turun rintik-rintik tak menyurutkan hasrat para relawan dan pendukung pasangan Capres dan Cawapres untuk beramai-ramai datang ke Gedung KPU. Pada malam itu, KPU melakukan pengundian untuk menetapkan nomor urut pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan berkontestasi pada Pemilihan Presiden 2024 pada 14 Februari 2024.

Sebuah tenda besar bernuansa merah putih berdiri di halaman Gedung KPU sebagai tempat prosesi pengundian nomor urut Capres dan Cawapres. Sehari sebelumnya, pada Senin, 13 November 2023, KPU telah mengumumkan dan menetapkan tiga pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Ketiganya adalah Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo – Mahfud MD, dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Pada Selasa malam itu, KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka untuk mengundi dan menetapkan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres.

Pasangan Capres dan Cawapres sudah hadir di KPU didampingi para petinggi partai politik pengusung serta para relawan pendukung. Rapat pleno terbuka KPU dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy'ari didampingi para komisioner KPU. Setelah melalui proses pengundian, hasilnya pasangan Capres – Cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, disusul pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, dan pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Suasana riuh para pendukung mengiringi pengundian nomor urut pasangan Capres dan Cawapres ini.

Keriuhan para pendukung dan relawan sudah terlihat pada saat pendaftaran bakal Capres dan bakal Cawapres yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Oktober 2023. Hari itu, kantor KPU sudah dipenuhi massa pendukung tatkala pasangan Bacapres dan Bacawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang menjadi pasangan pertama mendaftar ke KPU. Sejak pagi hari massa sudah berdatangan ke KPU untuk mengiringi pendaftaran pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mendapat giliran pertama mendaftar. Persiapan untuk pendaftaran sudah dimulai pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin sejak subuh. Rangkaian kegiatan pendaftaran diawali dengan salat subuh berjamaah bersama keluarga masing-masing.

Usai salat subuh berjamaah, pagi itu, Muhaimin mendatangi kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta

Selatan. Keduanya berbincang sebentar sebelum Anies meminta doa restu ibundanya sebelum berangkat ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Suasana tampak syahdu ketika Anies Baswedan sungkem kepada ibundanya dan meminta doa restu. Sang ibunda pun memanjatkan doa.

Setelah itu, Anies dan Muhaimin berangkat ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, menjemput petinggi partai itu. PKS adalah salah satu partai pengusung Bacapres/Bawapres Anies-Muhaimin bersama Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selanjutnya, Anies dan Muhaimin dan rombongan menuju Kantor DPP PKB di Kawasan Salemba, Jakarta Pusat, dan kemudian berlanjut ke kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Bersama-sama para petinggi partai pengusung, pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar menuju kantor KPU diiringi massa pendukung.

Menaiki jip terbuka, pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar disambut ribuan massa yang sudah menunggu di Kantor KPU. Kendaraan yang ditumpangi Anies – Muhaimin berjalan tersendat karena ruas jalan yang dilewati dipenuhi massa pendukung, dan massa pun berebut mengerubungi kendaraan yang ditumpangi Anies dan Muhaimin. Dan, ada suasana pesta rakyat di sana hari itu. Ada Reog Ponorogo, ada tanjidor, ada komunitas Tionghoa yang menyumbangkan barongsai, dan beberapa kesenian daerah.

Setelah masuk ke Gedung KPU dan diterima Komisioner KPU, pasangan Anies – Muhaimin naik ke lantai dua untuk melakukan prosesi pendaftaran. Anies – Muhaimin didampingi sejumlah petinggi Partai Nasdem, PKB, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memperkenalkan pasangan ini ke KPU dan publik. “Koalisi Perubahan bertekad tidak hanya memenangkan Pemilu semata, tapi dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Solidaritas sesama anak bangsa tidak perlu rusak karena Pemilu. Kami yakin ini bisa kita capai,” tuturnya.

Anies Baswedan juga menyampaikan pesan serupa. Dia berharap KPU bisa menyelenggarakan Pemilu secara jujur dan adil. “Kami percaya di bawah kepemimpinan bapak dan ibu anggota KPU, Pemilu bisa berjalan tertib, jujur, adil, sehingga menghasilkan pemilu yang kredibel di depan seluruh rakyat,” katanya.

Usai proses pendaftaran, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menemui massa pendukung yang sudah menunggu di luar gedung KPU. Suasana sangat ramai dan hiruk pikuk. Massa mengelu-elukan pasangan Bacapres dan Bacawapres yang pertama mendaftar ke KPU ini. Hampir menjelang tengah hari, lambat laun massa pun bubar setelah pasangan ini beranjak meninggalkan Gedung KPU. Padahal, sesuai jadwal pasangan kedua, yaitu Bacapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pukul 11.00 hari yang sama juga mendaftar ke KPU.

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menaiki mobil jadul untuk mengantar ke Gedung KPU. Massa pendukung pasangan ini juga sudah menyambut di sepanjang perjalanan menuju Jl. Imam Bonjol. Pasangan ini didampingi petinggi partai pengusung, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Hanura Oesman

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md

Sapta, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Sama seperti pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tiba di Gedung KPU, rombongan pasangan ini langsung naik ke lantai dua untuk melakukan proses pendaftaran. Usai menyampaikan berkas pendaftaran, kepada para komisioner KPU, Megawati menyampaikan harapan soal penyelenggaraan Pemilu yang sesuai asas dan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, seperti bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dia juga mengatakan, KPU mesti menempatkan rakyat sebagai pemenang tertinggi dalam menentukan pemimpin nasional secara terbuka.

Setelah prosesi penyerahan berkas pendaftaran, pasangan ini mengadakan jumpa pers. Ganjar mengatakan ingin membangun Indonesia dengan cepat. "Kami ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini, yang baik akan kami teruskan, yang kurang baik akan kami perbaiki, yang tidak baik akan kami tinggalkan," katanya.

Pada momen itu, Bacawapres Mahfud MD bercerita tentang baju putih yang dia pakainya saat pendaftaran Cawapres itu. Baju tersebut, katanya, sebenarnya disiapkan ketika dicalonkan sebagai Cawapres pada Pilpres 2019. "Baju yang saya pakai ini adalah baju yang lima tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU, tetapi tidak jadi," ujarnya.

"Akhirnya, saya titipkan baju ini ke ibu saya di Madura. Ketika saya dapat pesan bahwa kemungkinan besar saya akan dibawa ke pencalonan presiden dan wakil presiden oleh koalisi, tanggal 16 Oktober lalu saya sowan ke ibu untuk ambil baju yang tidak jadi saya pakai lima tahun lalu," tuturnya.

Dua pasangan Bacapres dan Baca-wapres sudah mendaftar di hari pertama pembukaan pendaftaran di KPU. Pada hari terakhir pendaftaran, Rabu 25 Oktober 2023, giliran pasangan Bacapres dan Bacawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke KPU. Setelah melewati dinamika pencalonan hingga keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mem-bolehkan calon wakil presiden di bawah usia 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi kepala daerah, akhirnya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, maju sebagai Baca-wapres mendamping Prabowo Subianto.

Sebelum mendaftar ke KPU, pasangan Prabowo – Gibran menggelar deklarasi maju ke Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu pagi, 25 Oktober 2023. Deklarasi Prabowo – Gibran ini dihadiri petinggi partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Deklarasi juga ditandai dengan penandatangangan dukungan oleh masing-masing Ketua Umum Partai.

Yandri Susanto

Dalam pidato pertamanya ke public, setelah diumumkan sebagai Bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka membuka pidatonya dengan mengatakan, "Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja. Saya sudah ada di sini," tegas Walikota Solo itu.

Setelah deklarasi, pasangan Prabowo – Gibran melanjutkan perjalanan ke Taman Suropati di Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo – Gibran didampingi para Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju menaiki bus yang bertuliskan "Prabowo – Gibran". Di Taman Suropati, diadakan Kirab budaya Nusantara dan pertunjukan kesenian. Setelah 30 menit, rombongan bergerak menuju Kantor KPU diiringi parade atau kirab budaya.

Sekitar pukul 10.00 WIB, pasangan Prabowo – Gibran diterima komisioner KPU dan menuju tempat prosesi pendaftaran. Setelah resmi mendaftar dan KPU menyatakan berkas lengkap, pasangan Prabowo – Gibran menemui para pendukungnya di luar gedung KPU. Menaiki mobil Prabowo dan Gibran menyalami para pendukungnya. Suasana ramai serupa seperti pendaftaran dua pasangan Bacawapres dan Bacawapres sebelumnya.

Anak Bangsa Terbaik

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dipastikan diikuti tiga pasangan Capres dan Cawapres. Tiga pasangan Bacapres dan Bacawapres, yaitu Anies – Muhaimin, Ganjar

– Mahfud, dan Prabowo – Gibran, sudah mendaftar ke KPU dan menjalani proses pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. KPU pun melakukan proses verifikasi administrasi pada ketiga pasangan tersebut. Pada tanggal 13 November 2023, KPU menetapkan Capres dan Cawapres yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

Menanggapi tiga Capres dan Cawapres yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024 ini, Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto, S.Pt., menyebutkan, Pilpres 2024 merupakan kontestasi di antara putera terbaik bangsa. "Siapa pun yang dicalonkan pasti merupakan anak bangsa yang berprestasi dan memiliki rekam jejak yang memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara," katanya saat memberikan sambutan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 yang diselenggarakan KNPI Banten di Hotel Le Dian Kota Serang, Sabtu, 28 Oktober 2023.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN itu menjelaskan bahwa bangsa Indonesia lahir karena perbedaan dan kebhinnekaan. Karena itu, pemimpin juga lahir karena perbedaan. Pemilu dan Pilpres 2024 adalah kontestasi untuk memilih yang terbaik di antara yang terbaik. "Karena Indonesia lahir dari perbedaan dan kebhinnekaan maka pemimpin juga lahir karena ada perbedaan. Maka diadakanlah kontestasi demokrasi yang bernama Pemilu, sehingga nanti yang terbaik akan terpilih menjadi pemimpin Indonesia," imbuhnya.

Penilaian lain disampaikan anggota MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, SH., MH. Dia mengakui adanya dinamika yang terjadi pada saat pencalonan Bacapres dan Bacawapres. Pasalnya, pencalonan Bacapres dan Bacawapres melibatkan partai-partai politik. "Kita melihat adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat dan malah tidak terduga dalam pengajuan Capres dan Cawapres ini. Meski demikian, dinamika politik yang terjadi merupakan bagian dalam kontestasi Pemilu 2024 ini," katanya kepada *Majelis*.

Meskipun terjadi dinamika, lanjut Taufik Basari, namun tidak menyebabkan munculnya konflik di tengah masyarakat. "Kita patut mensyukuri meski terjadi dinamika pada saat pencalonan Capres – Cawapres tetapi tidak sampai terjadi konflik. Di

Taufik Basari

masyarakat, dinamika pencalonan Capres – Cawapres dari partai politik hanya menjadi bahan pembicaraan di tempat-tempat berkumpul, menjadi wacana atau diskusi saja," ujarnya.

Kontestasi Pilpres 2024 yang diikuti tiga Capres dan Cawapres ini berbeda dengan Pilpres tahun 2019 yang hanya diikuti dua pasang Capres dan Cawapres. Masih segar dalam ingatan, karena diikuti dua pasang Capres dan Cawapres, Pilpres tahun 2019 diwarnai dengan polarisasi yang tajam di masyarakat di mana masyarakat di akar rumput terbelah. Taufik Basari berharap suasana pada Pilpres tahun 2019 tidak terulang pada Pilpres 2024 ini.

"Saya berharap, masyarakat bisa belajar dari Pemilu-Pemilu sebelumnya yang cukup panas sehingga membuat masyarakat kita terbelah. Karena itu, penting untuk dijaga agar situasi pada tahun politik ini tidak lagi terulang seperti Pemilu sebelumnya. Biarlah proses politik ini berjalan secara alami sehingga semua orang akan menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses politik, dan tidak kemudian membuat kehidupan

Fahira Idris

sehari-hari kita terpengaruh akibat pilihan-pilihan yang berbeda," paparnya.

Harapan serupa juga disampaikan anggota MPR dari Kelompok DPD RI Fahira Idris. Menurut Fahira, polarisasi di masyarakat pasti terjadi mengiringi kontestasi Pilpres. Namun, sepanjang polarisasi itu disebabkan karena perbedaan ide dan gagasan dari masing-masing Capres dan Cawapres maka polarisasi itu justru akan "menyehatkan" rasionalitas rakyat dalam memilih. "Yakinlah, jika sebagian rakyat memilih berdasarkan rasionalitas maka Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurut senator dari DKI Jakarta itu, selain menghadirkan tiga pasang kandidat, juga ada semacam gelombang besar dari rakyat yang menginginkan semua calon mengedepankan gagasan. "Rakyat ingin ketiga pasangan Capres dan Cawapres termasuk para pendukungnya menyajikan gagasan-gagasn cerdas untuk kemajuan bangsa," ujarnya.

Selain itu, tambah Fahira Idris, kehendak rakyat juga terlihat jelas yaitu ingin Pilpres 2024 berjalan dengan sejuk tanpa sikut menyikut. "Rakyat Indonesia ingin Pilpres 2024 berjalan sejuk, bermartabat, dan saling menghargai, bukan hanya antarkandidat, tetapi juga antar masing-masing pendukung," ujarnya.

"Pilpres yang sejuk dan bermartabat adalah kombinasi dari perilaku kandidat dan pendukungnya yang mengedepankan gagasan, penyelenggara Pemilu yang netral dan profesional, dan pemilih yang rasional. Kombinasi di antaranya ketiganya harus terjalin sehingga Pilpres 2024 akan menjadi praktik baik bagi penyelenggaraan Pemilu-Pemilu ke depan," sambungnya.

Fahira berpendapat, konstestasi Pilpres bukan sekadar demokrasi politik tetapi juga momentum bagi rakyat untuk menguatkan kembali cita-cita para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan demokrasi ekonomi dengan menghadirkan keadilan sosial. "Rakyat Indonesia saat sedang mencari pemimpin yang punya gagasan konkret agar hasil pem-bangunan dapat dinikmati bersama melalui suatu proses distribusi yang berkeadilan dan berkemanusiaan," pungkasnya. ❑

MBO/BSC

Mengintip Visi Misi Pasangan Capres-Cawapres

Visi misi ketiga pasangan Capres – Cawapres yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 memang cukup menarik dengan penekanan dan fokus yang berbeda pada visi misi masing-masing Capres – Cawapres. Visi misi hanyalah salah satu faktor yang menentukan pilihan pemilih.

TIGA pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) Pemilu 2024 secara resmi telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan pertama yang mendaftar ke KPU adalah eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Kamis, 19 Oktober 2023. Pasangan ini berasal dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Pada hari yang sama, setelah pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin, pada siang harinya giliran pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo – Mahfud MD mendaftar ke KPU. Pasangan ini diajukan partai PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo. Selanjutnya, pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjadi yang terakhir mendaftar ke KPU persis pada hari terakhir pendaftaran, Rabu, 25 Oktober 2023. Pasangan Capres dan Cawapres ini diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, PSI, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda.

Perlu diketahui, saat mendaftar, KPU mewajibkan bagi setiap pasangan bakal Capres – Cawapres untuk menyiapkan dan membawa visi misi. Tiga pasang Capres – Cawapres di Pilpres 2024 telah resmi merilis dokumen visi misinya. Bukan sekadar menjadi syarat administrative, penyerahan visi dan misi bakal Capres dan Cawapres juga menjadi kekuatan simbolis pertarungan gagasan dari para kontestan dalam Pilpes 2024.

Penyerahan visi misi merupakan salah satu syarat menjadi Capres dan Cawapres yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf t Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal yang sama Ayat 4 juga ditambahkan bahwa visi misi dibuat berdasarkan prinsip bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Jika dibandingkan, dokumen visi misi pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar lebih panjang, memuat 140 halaman dengan ukuran file 14,808 KB. Berbeda dengan dokumen visi misi pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD dengan 62 halaman, tetapi ukuran file lebih besar, yakni 37,822 KB. Adapun dokumen visi misi pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka ditulis dalam 89 halaman dengan ukuran file 26,822 KB. Pasangan yang terakhir mendaftar di KPU ini juga membuat ringkasan visi misi dalam file yang berbeda.

Berikut ini, ringkasan visi misi Capres – Cawapres peserta kontestasi Pilpres 2024.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

Pasangan ini mengusung visi "Indonesia Adil untuk Semua". Pasangan ini ingin mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi tersebut akan diwujudkan dalam delapan misi yang merupakan langkah konkret untuk mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang lebih maju dan lebih adil. Delapan misi itu disebut sebagai "8 Jalan Perubahan".

Delapan misi itu dijabarkan dalam bentuk agenda dan program yaitu: Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air; Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global; Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Kemudian membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan; Mewujudukan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya; Mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan bahagia sebagai akar kekuatan bangsa; memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia; Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD

Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengusung visi: "Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari". Keduanya ingin mewujudkan Indonesia yang unggul di segala bidang dengan memanfaatkan potensi maritimnya. Untuk mencapai visi mempercepat Indonesia unggul, ditempuh dengan 8 Gerak Cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Delapan gerak cepat itu adalah mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian; Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi (R&I) berdikari; Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah; Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi; Mempercepat pembangunan sistem digital nasional.

Kemudian mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru; Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional; Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung visi: "Bersama Indonesia Maju: Menuju Indonesia Emas 2045". Keduanya ingin mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045. Visi tersebut dicapai dengan 8 misi yang disebut Asta Cita.

Kedelapan misi tersebut adalah memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Kemudian melanjutkan hilirasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; Memperkuat penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Ketiga pasangan Capres – Cawapres tampak berupaya menyuguhkan pesan dan simbol. Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar lebih menonjolkan jargon perubahan. Kata "perubahan" lebih banyak disebut dalam dokumen visi misi pasangan Amin ini dibanding dua pasangan Capres dan Cawapres lainnya. Sedangkan pasangan Ganjar – Mahfud menyuguhkan narasi Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sedangkan pasangan Prabowo – Gibran cenderung menguatkan simbol representasi dari kelanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejumlah program yang ditawarkan pasangan ini juga cenderung identik dan dekat dengan program-program pemerintahan Jokowi.

Ketiga pasangan Capres – Cawapres juga sama-sama menggunakan simbol angka delapan. Boleh jadi angka 8 diasosiasikan dengan momentum Pilpres 2024 yang menjadi ajang penentuan Presiden ke-8 RI. Pasangan Anies – Muhaimin menggunakan frasa "8 Jalan Perubahan". Pasangan Ganjar – Mahfud memakai frasa "8 Gerak Cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," sedangkan pasangan Prabowo – Gibran menggunakan frasa "Asta Cita" atau delapan cita-cita (frasa yang kurang lebih sama diusung Jokowi pada Pilpres 2024, yakni Nawa Cita).

Visi misi ketiga pasangan Capres – Cawapres yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 memang cukup menarik dengan penekanan dan fokus yang berbeda pada visi misi masing-masing Capres – Cawapres. Visi misi hanyalah salah satu faktor yang menentukan pilihan pemilih. Faktor-faktor lain yang juga penting adalah sosok calon presiden dan wakil presiden, program kerja, serta elektabilitas. ❑

BSC

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Taufik Basari SH., M.Hum., LLM., Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI

Pemerintah Harus Bersikap Netral

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden (Capres dan Cawapres) yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dalam Pemilu 2024. Ketiga pasangan Capres dan Cawapres itu adalah pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo – Mahfud MD, dan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar atau pasangan Amin diusung tiga partai, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mendaftar ke KPU pada Kamis, 19 Oktober 2023. Pada hari yang sama, disusul pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranomo – Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo.

Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Prima, menjadi kontestan Pilpres terakhir yang mendaftar ke KPU, pada Rabu, 25 Oktober 2023.

KPU telah menutup pendaftaran Capres dan Cawapres dan proses selanjutnya melakukan verifikasi berkas pencalonan, kemudian penetapan sebagai Capres dan Cawapres pada 11 November 2023. Pipres 2024 berbeda dengan Pemilu 2019 lalu yang hanya diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres. Pada Pilpres 2019, kontestasi Pilpres diwarnai polarisasi tajam di masyarakat karena hanya diikuti dua pasangan Capres dan Cawapres.

Bagaimana situasi dan kondisi Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 nanti? Apakah polarisasi masih terjadi di masyarakat? Termasuk dinamika politik dan kekhawatiran munculnya politik identitas. Untuk mengetahui lebih lanjut persoalan tersebut, Majelis mewawancarai Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI yang juga Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR Taufik Basari, SH., M.Hum., LLM. Berikut petikannya.

Tiga pasang Capres dan Cawapres (yaitu pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo – Mahfud MD, dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka) secara resmi sudah mendaftar ke KPU. Apa tanggapan Bapak tentang majunya ketiga pasangan Capres dan Cawapres ini?

Kita harus mengakui bahwa dinamika pada saat pengajuan Capres dan Cawapres di antara kita kandidat dan melibatkan partai-partai politik sangat tinggi. Kita melihat adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat dan kadang malah tidak terduga dalam pengajuan Capres dan Cawapres ini. Meski demikian, dinamika politik yang terjadi merupakan bagian dalam kontestasi Pemilu 2024 ini.

Kita patut mensyukuri bahwa meski terjadi dinamika politik yang cukup tinggi tetapi tidak menyebabkan munculnya konflik di tengah masyarakat. Tetapi, masyarakat justru menilai peristiwa dan dinamika politik yang menyertai pengajuan Capres dan Cawapres itu sebagai sesuatu bahan pembicaraan di tempat-tempat berkumpul seperti di warung-

warung kopi, dan lainnya. Itu hanyalah sebagai sebuah wacana atau diskusi. Kita harapkan arah menuju Pemilu 2024 nanti bisa menghasilkan politik yang riang gembira.

Saya juga berharap masyarakat bisa belajar dari Pemilu-Pemilu sebelumnya yang cukup panas sehingga membuat masyarakat kita terbelah. Karena itu penting untuk dijaga agar situasi pada tahun politik ini tidak lagi terulang seperti Pemilu sebelumnya. Biarlah proses politik ini berjalan secara alami sehingga semua orang akan menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses politik, dan tidak kemudian membuat kehidupan sehari-hari kita terpengaruh akibat pilihan-pilihan yang berbeda.

Dengan adanya tiga pasang Capres dan Cawapres ini, apakah bisa menghindari polarisasi atau pembelahan di masyarakat seperti Pilpres tahun 2019 lalu yang hanya diikuti dua pasang Capres dan Cawapres?

Untuk menurunkan situasi panas di masyarakat, saya mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tiga pasang calon presiden dalam suasana makan siang beberapa waktu lalu. Pertemuan ini dapat mendinginkan suasana sehingga kita harapkan suasana cukup kondusif dan tidak terjadi lagi situasi pada Pilpres 2019 lalu. Mudah-mudahan pertemuan itu juga menjadi simbol bahwa Presiden dan pemerintah bersikap netral. Tetapi saya berharap pertemuan ini tidak hanya berhenti pada simbol tetapi juga terwujud dalam pelaksanaan Pemilu di lapangan. Itulah yang menjadi harapan kita semua agar tidak terjadi lagi pembelahan di masyarakat.

Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran di masyarakat seperti soal netralitas, politik identitas, dan lainnya terhadap pelaksanaan Pilpres 2024. Apa tanggapan Bapak?

Pertama, kita tentu tidak berharap adanya upaya-upaya untuk menggunakan alat kekuasaan dalam Pemilu nanti. Karena itu, pemerintah harus netral. Demikian juga aparatur hukum harus bertindak netral sehingga proses Pemilu bisa berjalan tanpa adanya intervensi dari kekuasaan.

Kedua, kita berharap masyarakat semakin cerdas dalam memilih sehingga pilihan yang diberikan dilakukan secara rasional bukan karena dibayar dengan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

politik uang. Pilihan itu seharusnya juga bukan dilakukan karena alasan emosional, memilih karena merasa punya kedekatan atau kesukaan emosional tanpa memerhatikan latar belakang atau rekam jejak pada Capres – Cawapres.

Ketiga, kita tentu juga berharap semua pihak menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif. Kepada masyarakat kita mengharapkan adanya pemahaman yang sama bahwa perbedaan pandangan politik jangan lantas membuat kita saling membenci dan saling memusuhi. Sebab, sesungguhnya kita adalah tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki semangat kebersamaan yang tinggi.

Dengan selesainya pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres ke KPU dan KPU akan menetapkan pasangan Capres dan Cawapres yang lolos verifikasi maka dimulailah kontestasi Pilpres 2024. Bagaimana harapan Bapak dengan tahapan-tahapan Pilpres selanjutnya, termasuk kampanye dan pemungutan suarana nanti?

Pertama, masa kampanye pada tahapan Pemilu tahun 2024 ini lebih singkat dibanding sebelumnya. Karena itu kita berharap dengan tidak terlalu panjangnya masa kampanye ini bisa menekan biaya politik. Selain itu dengan masa kampanye yang tidak terlalu panjang kita juga harapkan kepada masyarakat untuk menelusuri dengan sebaik-baiknya rekam jejak masing-masing kandidat. Kita juga berharap agar pilihan-pilihan yang diberikan pemilih pada Pemilu 2024 didasarkan pada pilihan yang rasional bukan pada pilihan yang sifatnya emosional. ❑

Terima Pengurus Ikatan Pengusaha Millenial Indonesia

Bamsoet Dorong Generasi Muda Kembangkan Wirausaha

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bonus demografi adalah momentum penting yang tidak boleh begitu kita saja lewatkan. Kita perlu belajar dari pengalaman berbagai negara yang telah sukses mengoptimalkan periode bonus demografi, seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung kehadiran Ikatan Pengusaha Millenial Indonesia (IPMI) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Charmelita. Dalam survei Sea Group bekerjasama World Economic Forum (WEF) yang dirilis April 2019 memperlihatkan 24,4% millenial Indonesia berusia di bawah 36 tahun lebih tertarik menjadi wirausaha ketimbang menjadi pegawai negeri sipil (17,1 5), mengembangkan usaha keluarga (16,5 5%), maupun bekerja di perusahaan multinasional (11,4%).

Menurut Bamsoet, keinginan milenial menjadi wirausaha tersebut harus disambut cepat oleh pemerintah, serta didukung berbagai pihak. Walaupun saat ini jumlah wirausaha Indonesia sudah mencapai 3,1% dari populasi penduduk, atau sekitar 8,06 juta jiwa dari 260 juta jiwa penduduk, namun jumlah tersebut belum mampu mendongkrak perekonomian nasional menjadi lebih bergeliat. “Indonesia masih perlu mengejar berbagai negara tetangga seperti Singapura dengan rasio wirausaha mencapai 7% ataupun Malaysia yang berada di 5%,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus IPMI, di Jakarta, Jumat (20/10/23).

Pengurus IPMI yang hadir, antara lain Ketua Umum Charmelita, Sekjen Muliansyah, Wakil Ketua Maya Carlina, Bendahara Wan Hadi, Bidang Pendidikan Amalia Kadir, Bidang OKK Immanuel dan Bidang Humas Ahmad Yono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Indonesia juga membutuhkan iklim usaha yang dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi baru yang dapat menghadapi persaingan global. Sehingga mampu menawarkan alternatif dan terobosan baru yang lebih baik dari berbagai aspek. Sebagai gambaran, Indeks Inovasi Global (Global Innovation Index) menempatkan Indonesia pada posisi ke-85 dari 131 ekonomi negara di dunia, dan posisi ini belum mengalami peningkatan sejak tahun 2018.

“Pengusaha muda dengan segala potensi diri yang dimiliki, serta lekat dengan daya kreasi dan inovasi, tentunya dapat mengambil peran untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi baru dalam membangun perekonomian nasional,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, melihat hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015, yang memproyeksikan pada tahun 2020 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 269,6 juta jiwa. Di mana 185,34 juta jiwa merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), membuat Indonesia dilimpahi bonus demografi. Hal ini harus dimanfaatkan sebesarnya untuk melahirkan wirausaha baru, sehingga penduduk usia produktif tak hanya menjadi beban negara, melainkan menjadi berkah bagi bangsa.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Bonus demografi adalah momentum penting yang tidak boleh begitu saja kita lewatkan. Kita perlu belajar dari pengalaman berbagai negara yang telah sukses mengoptimalkan periode bonus demografi, seperti Korea Selatan, Tiongkok dan Jepang. Setiap negara tersebut berhasil memanfaatkan momentum bonus demografi dengan cara masing-masing. Korea Selatan memberdayakan industri rumah tangganya untuk membuat komponen handphone. Tiongkok mengarahkan industri rumahan memproduksi komponen elektronik. Sedangkan Jepang berhasil mengoptimalkan kinerja penduduk usia produktif sehingga tingkat pengangguranya sangat kecil, kurang dari 3%," pungkas Bamsoet. ❑

Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Harapan

Fadel Muhammad Gelar Demplot Jagung Hibrida

MPR adalah rumahnya rakyat. Jadi, MPR akan berusaha menyerap semua aspirasi rakyat dan berusaha mewujudkannya semaksimal mungkin.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, menggelar demonstrasi plot (demplot) jagung hibrida di lahan percontohan di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Sabtu (14/10/2023). Dalam kesempatan itu, Fadel Muhammad menyerahkan bantuan bibit jagung super yang kuat dan tahan cuaca panas.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam acara 'Asmas MPR RI dalam rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.' Hadir mendampingi Fadel Muhammad, Pj. Bupati Boalemo Sherman Moridu, para kades beberapa desa, tokoh masyarakat, dan para petani seputar Wonosari.

Lebih lanjut mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini menyatakan, bibit jagung yang diberikannya itu adalah bibit super dan tahan cuaca panas. Untuk itu, Fadel meminta agar sesudah demplot ini, bibit ini mesti langsung ditanam massal saat musim tanam. "Pak Bupati nanti akan menyiapkan penyuluhnya. Jangan khawatir cuaca panas ini, bibit ini tahan cuaca panas. Di Jawa bibit ini juga top," katanya.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini juga memberikan bantuan 500 bibit tanaman produktif yakni pohon durian dan juga alpukat. Pemberian bantuan bibit jagung, pohon durian dan alpukat ini, menurut Ketua Dewan Jagung Nasional ini, berangkat dari keprihatinannya terhadap meranggasnya atau keringnya banyak lahan pertanian jagung akibat cuaca panas ekstrim yang melanda Gorontalo beberapa bulan ini.

Selain itu, banyak areal lahan pertanian yang berpotensi besar longsor jika musim penghujan datang. "Bibit pohon durian dan alpukat ini diharapkan, ke depan, bisa mencegah longsornya tanah di lahan-lahan pertanian sehingga tidak membahayakan penduduk sekitar," tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Pj. Bupati Boalemo Sherman Moridu memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kepedulian Fadel Muhammad. "Sebagai tokoh masyarakat, apalagi mantan Gubernur Gorontalo, Bapak Fadel sangat mengerti kondisi di wilayah Boalemo dan seluruh Gorontalo. Dan, beliau masih menaruh perhatian yang besar kepada kondisi rakyat Gorontalo," pungkasnya.

Acara Asmas MPR RI sendiri mendapatkan perhatian besar dari para tokoh masyarakat dan petani sekitar. Fadel Muhammad menyampaikan bahwa sebagai Rumah Besar Kebangsaan, MPR adalah rumahnya rakyat. Jadi, MPR akan berusaha menyerap semua aspirasi rakyat dan berusaha mewujudkannya semaksimal mungkin.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Seperti pemberian bibit jagung ini. Ini salah satu upaya yang kami lakukan untuk merespon aspirasi rakyat beberapa waktu lalu," tandasnya.

Asmas di Desa Pancakarsa II

Kegiatan Asmas MPR juga Desa Pancakarsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Selasa (17/10/2023). Acara yang digelar oleh Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad sebagai upaya dilakukan MPR RI untuk mendengarkan semua keluhan rakyat.

Hadir dalam acara itu, Ny. Hana Hasanah Shahab (istri Fadel Muhammad), Kepala Desa Pancakarsa II, tokoh masyarakat, dan warga sekitar sebagai peserta

"Kegiatan ini sangat penting, sebab penguasa yang baik harus dekat dan memberikan kenyamatan kepada rakyatnya," ujar Fadel Muhammad seraya meminta pemerintah daerah untuk meluangkan banyak waktunya guna mendengarkan semua keluhan rakyat.

Menurut Fadel Muhammad, rakyat itu suka kalau aspirasinya didengarkan. Mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah. Kadang mereka bingung mau bertanya atau mengeluh kepada siapa terkait masalah mereka. Mau bertanya kepada pemerintah mereka takut terbentur protokoler ketat, sehingga merasa sangat sulit mendekat," ujar Fadel Muhammad.

Sebagai Pimpinan MPR RI dan sebagai Anggota DPD RI dari dapil Provinsi Gorontalo, Fadel Muhammad selalu menyempatkan diri mengunjungi rakyat saat melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo. Bahkan, Fadel Muhammad tak canggung masuk ke rumah warga tak perduli kondisi rumahnya, hanya untuk mendengar secara langsung aspirasi, keluhan, masukan, ataupun aduan rakyat.

Seperti hari ini (Selasa, 17/10-*red*), Fadel Muhammad dan istri berada di rumah salah satu warga di Desa Pancakarsa II. Kondisi rumahnya sangat sederhana, ukurannya sekitar 60 M2 dengan seluruh dindingnya terbuat dari kayu. Namun, Fadel terlihat nyaman berada di sana.

"Ini biasa buat saya, bertemu warga langsung di dalam rumahnya, mencicipi hidangannya, dan berdialog dari hati ke hati. Mereka inilah yang mengantarkan saya menjadi Gubernur, anggota DPD, dan sekarang Pimpinan MPR. Jadi saya harus menghormati rakyat dan mendengarkan mereka," tegasnya.

Fadel Muhammad kemudian berdialog dan menerima banyak keluhan dari pemilik rumah, salah satunya seputar musim panas yang sangat lama, yang membuat masyarakat sangat kesulitan, terutama air bersih untuk keperluan rumah tangga dan pertanian.

Merespon hal tersebut, Fadel Muhammad menyarankan warga untuk terus berdoa kepada Allah SWT. agar diberi pertolongan. Dan, kepada pemerintah daerah, dia berharap agar terjun langsung ke tengah masyarakat, menyambangi wilayah yang terdampak musim panas panjang ini, dan segera dicarikan solusi yang tepat untuk membantu rakyat. ❑

Delegasi Forum Musyawarah Pantekosta Solidaritas

HNW: Keadilan Bukan Hanya Perintah Konstitusi, Tetapi juga Perintah Agama

MPR dan DPR tidak boleh lelah memperjuangkan aspirasi masyarakat, apalagi terkait masalah agama. Karena, aspirasi masyarakat terkait agama maupun kebangsaan bisa diperjuangkan di DPR, juga di MPR.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN Forum Musyawarah Pantekosta Solidaritas (FMPS) Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. M. Hidayat Nurwahid MA atau HNW menegaskan bahwa di Indonesia, keadilan adalah hal sangat dipentingkan, bahkan 2 (dua) sila dari Pancasila berisikan soal adil dan keadilan. Karenanya, keadilan bukan hanya perintah Konstitusi, tetapi juga perintah seluruh Agama, termasuk Islam dan Kristen.

Untuk itu, sudah semestinya jika partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai partai Islam, memberi perhatian sangat besar terhadap persoalan keadilan. Partai Keadilan Sejahtera berusaha dengan maksimal memperjuangkan masalah keadilan, termasuk yang diperuntukkan bagi kalangan Kristiani maupun non-Muslim lainnya. Dan, itu sudah dibuktikan, termasuk di Manado, sebagaimana kesaksian dari Pendeta Lenny Lumengan, anggota delegasi Forum Musyawarah Pantekosta.

Sebagai Lembaga Negara, MPR dan DPR, menurut HNW, sesuai kewenangannya bisa menerima dan memperjuangkan aspirasi, terlebih untuk persoalan yang menyangkut keadilan. Kemudian, aspirasi tersebut akan diperjuangkan dengan cara menyampaikan dan menyalurkannya kepada pihak mitra terkait.

"Aspirasi dari para Pendeta Forum Musyawarah Pantekosta Solidaritas saya terima, tetapi akan lebih baik jika disampaikan dengan disertai surat resmi dan data-data pendukungnya. Ini penting, supaya saat diajukan kita juga memiliki pegangan, juga bukti-bukti yang jelas, agar lebih mudah ditindaklanjuti juga" ungkap HNW saat menerima delegasi FMPS Sulawesi Utara, di ruang kerja Wakil Ketua MPR, Lantai 9 Gedung Nusantara III, Komplek MPR/DPR/DPD RI Senayan, Selasa (17/10/2023). Delegasi FMPS Sulawesi Utara dipimpin Pdt. Josely Losa, S.Th.

Pada kesempatan itu, Anggota DPR RI Dapil Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri, itu tak segan menjawab pertanyaan tamunya seputar kondisi nasional terbaru. Sayangnya, meski beberapa di antara sudah menjadi informasi lama, tapi ternyata kabar tersebut tidak diterima secara utuh. Akibatnya, informasi yang diterima hanya sepotong saja. Seperti, penolakan terhadap penghilangan frasa agama pada peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 yang diajukan Kemendikbud.

Penolakan yang dilakukan oleh PKS

tersebut, lanjut HNW, dilandasi alasan bahwa penghilangan frasa agama bukan semata masalah keyakinan. Tetapi, hilangnya frasa agama sangat merugikan semua umat beragama, bukan hanya Islam. Apalagi, hilangnya frasa agama juga bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi. " Ini membuktikan bahwa Partai Islam, seperti PKS, ternyata sangat toleran dan nasionalis, tidak sebagaimana diopinikan selama ini.

"Inilah bukti pentingnya bertemu langsung antara rakyat dan wakilnya. Yaitu, untuk saling bertemu, membuka diri, menyampaikan, mengklarifikasi, dan menerima aspirasi. Juga memberikan komitmen yang kuat dan serius terhadap masa depan umat beragama dan bangsa Indonesia. Masa depan Indonesia itu adalah Pancasila dan sila pertamanya justru Ketuhanan Yang Maha Esa yang menandakan betapa sangat pentingnya Agama. Meski sesungguhnya, semua informasi itu sudah ada di media," tambah HNW.

HNW berharap, MPR dan DPR tidak boleh lelah memperjuangkan aspirasi masyarakat, apalagi terkait masalah agama. Karena aspirasi terkait agama maupun kebangsaan bisa diperjuangkan di DPR, juga di MPR. Apalagi, jika DPR dan MPR-nya dihuni oleh orang-orang yang peduli, itu berarti semakin banyak lagi yang membela kepentingan Agama, bangsa dan Negara. Dan, semakin banyak yang bisa diperjuangkan untuk kepentingan mereka semuanya.

Sebelumnya, pmpinan delegasi, Pdt. Josely Losa S. Th., menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, karena telah menerima kunjungannya dengan baik, meski disampaikan secara mendadak. Pertemuan tersebut, menurut Pdt. Josely Losa S.Th., menghapus kesan seolah anggota DPR dan pimpinan MPR tidak bisa ditemui oleh kalangan Kristiani. Apalagi dari Partai Islam, seperti PKS. "Tetapi, ternyata, justru sangat mudah ditemui," katanya.

Kepada HNW, Pdt. Josely Losa S.Th., mengeluhkan adanya ketidakadilan yang diterima sebagian besar gereja-gereja di Sulawesi Utara. Pasalnya, ada beberapa gereja yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama hingga berkali-kali, sementara gereja yang lain banyak yang belum sekalipun menerima bantuan Kemenag. Karena itu, Pdt. Josely Losa S.Th., meminta bantuan HNW untuk memperjuangkan keadilan dengan meluruskan persoalan tersebut.

"Kami sangat bahagia bisa berkunjung di sini. Kami tidak menyangka bakal disambut sedemikian baik. Ini menghilangkan kesan seolah Gedung MPR/DPR jauh dari rakyat. Kami membuktikan semua itu tidak benar, justru kami para Pendeta dari Sulawesi Utara diterima dengan sangat baik oleh Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, Anggota DPR bahkan Wakil Ketua MPR dari PKS yang adalah Partai Islam," kata Josely Losa dengan bangga. ❑

Delegasi Pimpinan Pemuda Parlemen Indonesia

HNW: Lanjutkan Peran Mensejarah yang Membanggakan

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyambut baik lahirnya Forum Pemuda Parlemen Indonesia, karena Indonesia mempunyai sejarah peran Pemuda yang sangat menentukan masa depan Indonesia merdeka.

JELANG peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, MA., atau HNW mengapresiasi lahirnya Forum Pemuda Parlemen Indonesia (PPI). Terlebih saat ini merupakan tahun politik jelang Pemilu 14 Februari 2024.

Faktanya, lanjut HNW, pemuda merupakan pemilih terbesar pada kontestasi pemilihan umum lima tahunan tersebut. Karena itu, HNW menyambut baik lahirnya PPI dengan harapan bisa mengingatkan bahwa mereka hidup di Indonesia, negara demokrasi yang mempunyai sejarah peran Pemuda yang sangat menentukan masa depan Indonesia merdeka, dan kini mempunyai parlemen

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dengan para wakil rakyat, termasuk wakil bagi para pemuda.

Sesuai sejarahnya, kata HNW, jati diri pemuda Indonesia bukanlah seperti yang diframingkan sebagai generasi milenial selama ini. Yaitu, pemuda yang malas gerak, malas mengikuti proses dan hanya menerima hasil, anti sosial, hingga anti politik. Sebaliknya, kata HNW, pemuda Indonesia adalah pemuda yang memiliki latar sejarah sangat membanggakan.

Saat satu abad yang lalu melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, para Pemuda sudah berperan ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang nanti diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Bahkan sejak 1924 saat para pemuda belajar di luar negeri, mereka mengumandangkan hadirnya komunitas Perhimpunan Indonesia.

"Para Pemuda penting diingatkan fakta sejarah ini. Dengan mengerti sejarah, diharapkan mereka bisa bebas dari framing negatif generasi melenial, dan terinspirasi untuk membuat dan mengulangi sejarah yang sebelumnya dibuat para pemuda di masa lalu. Karena pada zaman sekarang pun, peran para pemuda dengan generasi Z maupun milenialnya, sangat diperlukan, apalagi jumlah mereka yang besar, bahkan jumlah pemilih dari generasi milenial dan generasi Z mayoritas pemilih di Indonesia.

Selain itu peluang dan tantangan yang menghadang para pemuda menyambut Indonesia Emas 2045 tidaklah ringan. Karena itu, momen peringatan sumpah pemuda sangat tepat untuk mengingatkan para pemuda kepada kebesaran sejarah pemuda-pemuda Indonesia untuk ditiru dan dilanjutkan. Juga, momen tahun politik dengan akan diselenggarakannya Pemilu serentak pada tahun depan.

"Keaktifan positif generasi muda dipentingkan agar mereka menyukseskan dengan mempergunakan hak pilih agar hadirlah Presiden/Wapres serta wakil mereka di Parlemen yang betul-betul teruji dengan track record terbaik untuk kebaikan masa depan pemuda sendiri dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045," ungkap HNW saat menerima Pimpinan Pengurus Pemuda Parlemen Indonesia, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9, Komplek MPR/DPR/ DPD RI Senayan, Rabu (18/10/2023). Delegasi PPI dipimpin oleh ketuanya, Khaeria Ulfarani Rahman, didampingi Direktur Eksekutif PPI Ade Fitra Alamsyah, serta anggota PPI Ary Rahman.

Menurut HNW, Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat besar, juga kepercayaan dunia internasional yang tinggi, adalah peluang besar bagi para pemuda untuk dijaga dan dikembangkan. Tetapi, peluang itu tidak serta merta bisa dikembangkan, karena pada saat yang sama tantangan yang harus dihadapi juga tidak ringan. Mulai dari krisis moral, darurat judi online, darurat korupsi, darurat narkoba, hingga LGBT. Karena itu, kata HNW, sudah sepatutnya para pemuda berhimpun dalam wadah bisa mencerahkan mereka agar bersemangat maju dan terpanggil untuk membuat sejarah baru di masa kini dan yang akan datang.

"Semoga kehadiran komunitas Pemuda Parlemen Indonesia ini bisa menginisiasi munculnya peran politik para pemuda hingga dapat hadirkan parlemen Indonesia yang semakin baik. Apapun pilihan mereka, jika para pemuda yang tercerahkan itu melanjutkan peran politiknya secara konstruktif dan profesional, maka akan hadir kembali harapan masa depan politik, berparlemen, berbangsa dan bernegara akan semakin cerah," ujar HNW.

Sebelumnya, Khaeria Ulfarani Rahman menyampaikan kepada Wakil Ketua MPR bahwa forum yang dipimpinnya akan menyelenggarakan Konferensi Pemuda pada 25 Oktober 2023. Khaeria selaku pimpinan delegasi mengundang HNW, sebagai Wakil Ketua MPR, untuk hadir menjadi narasumber guna mencerahkan dan menyemangati komunitas PPI. ❑

Hari Santri Nasional

Jazilul Fawaid: Santri Punya Kapasitas sebagai Pemimpin

Saya yakin para santri akan tumbuh menjadi pemimpin di masa depan yang memiliki kekuatan akhlak dan budi pekerti. Syarat menjadi pemimpin harus punya karakter dan budi pekerti, dan berikutnya punya ilmu," ungkap Wakil Ketua MPR RI., Jazilul Fawaid.

WAKIL Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mendorong para santri untuk bisa berperan dalam berbagai bidang kepemimpinan, baik kepemimpinan politik, ekonomi, social, dan berbagai bidang kepemimpinan lainnya.

Menurut Gus Jazil, santri memiliki modal dan kapasitas yang cukup sebagai seorang pemimpin. Sebab, sejak di lingkungan pesantren, mereka sudah digembleng untuk hidup mandiri dan berkelompok.

"Santri punya saham untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Santri bisa jadi pemimpin politik, ekonomi maupun pemimpin agama, karena pesantren memang dari dulu memproduk pemimpin. Memproduk orang-orang yang bermanfaat," ujar Gus Jazil saat memberikan Keynote Speech dalam rangka Hari Santri Nasional (HSN) 2023, bertajuk: "Promoting Peaceful Coexistence Through Santri Engagement" di Pondok Pesantren Modern Daarul Uluum Lido, Bogor, Jawa Barat, Ahad (22/10/2023).

Gus Jazil mengatakan, selama ini eksistensi perjuangan santri masih kurang dihargai di negeri ini. Padahal peran santri dan pesantren luar biasa sejak era pra kemerdekaan hingga saat ini.

Karena itu, Gus Jazil mendorong agar para santri diajari politik sejak dini. Sebab, selama ini pendidikan politik di pesantren masih minim. "Santri harus melek politik. Kalau di pesantren nggak belajar ilmu politik maka politik akan ditempati orang lain. Jangan sampai alumni pesantren hanya dianggap bisa memimpin tahlil, padahal alumni pesantren bisa menjadi apa saja. Saya santri bisa menjadi Wakil Ketua MPR," tutur alumni Ponpes Ihyaul Ulum Gresik ini.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, selama ini di pesantren tidak banyak diajarkan tentang politik. Padahal, ketika lulus dari pesantren langsung berhadapan dengan berbagai persoalan politik. "Di pesantren tidak banyak diajarkan kitab tentang politik. Yang banyak diajarkan soal fiqih, hadis. Menurut saya, di pesantren materi politik harus diberikan, tidak harus soal politik praktis, tapi bahwa hidup harus ada pilihan, hidup harus ada keberpihakan, hidup harus ada pemimpin," katanya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Gus Jazil berharap, santri punya semangat jihad dan semangat hidup tinggi, serta memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. "Saya yakin para santri akan tumbuh menjadi pemimpin di masa depan yang memiliki kekuatan akhlak dan budi pekerti. Syarat menjadi pemimpin harus punya karakter dan budi pekerti. Berikutnya, punya ilmu," ungkapnya.

Di sisi lain, kata Gus Jazil, di era modern saat ini, santri harus memiliki wawasan dan orientasi global. Sebab, seorang pemimpin dituntut untuk bisa membangun jejaring dengan komunitas global demi kemajuan bangsa. "Jangan sampai pemimpin hanya diam saja kurang piknik. Pemimpin harus banyak jalan kemana-mana, ke berbagai negara, sehingga punya peran dan jaringan internasional," katanya. ❑

Jalan Sehat Hari Santri

Yandri Susanto: Jadi Santri Itu Hebat

Santri harus berperan aktif menjadi pahlawan di bidang pendidikan dan berjuang melawan kebodohan. Sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR, H.Yandri Susanto, S.Pt., menyampaikan bahwa pemuda yang menjadi santri itu hebat, dipundak anak muda yang hebat dan luar biasa inilah harapan mewujudkan Indonesia maju disematkan.

"Menjadi santri itu hebat, cita-cita mewujudkan Indonesia maju berada di pundak anak-anak Indonesia yang hebat dan luar biasa," ungkap Yandri Susanto saat membuka acara Jalan Sehat dalam rangka Peringatan Hari Santri yang diselenggarakan di Kantor Kemenag Kota Serang, Kamis (19 Oktober 2023).

Turut hadir dalam acara itu, antara lain Walikota Serang Syafrudin, Kepala Kemenag Kota Serang Encep Safrudin Muhi, Ketua Yayasan Bai Mahdi Sholeh Ma'mun Ratu Rachmatuzakiyah, dan Ketua BM PAN Banten Agung Sukmana.

Di hadapan ribuan santri kota Serang, Waketum PAN Yandri Susanto mengingatkan bahwa santri memiliki peran sebagai garda terdepan menolak prilaku menyimpang LGBT, serta penyalahgunaan narkoba dan miras. Santri merupakan pahlawan pendidikan dan pejuang melawan kebodohan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Santri harus menjadi garda terdepan menolak prilaku menyimpang LGBT, serta penyalahgunaan narkoba dan miras. Santri juga harus berperan aktif menjadi pahlawan di bidang pendidikan dan berjuang melawan kebodohan. Sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa terwujud," lanjut Yandri.

Yandri juga mengungkapkan bahwa tema Hari Santri 2023 adalah Jihad Santri Jayakan Negeri. Tema ini memiliki makna secara histori dan konstekstual, yaitu santri memiliki andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, serta santri harus terus berkontribusi aktif dalam memajukan negeri.

"Jihad harus dipahami sebagai perjuangan intelektual yang penuh semangat dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, tidak lagi dipahami sebagai pertempuran fisik," tutup Yandri. ❑

Terima Pengurus Gakeslab Indonesia

Bamsoet Dorong Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional

Reformasi sistem kesehatan nasional merupakan agenda besar Kementerian Kesehatan. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan merupakan kebijakan bagian dari pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan yang harus senantiasa didukung.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menerima aspirasi dari Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia), sebagai asosiasi yang menaungi sekitar 1.500 perusahaan produsen dan penyedia alat kesehatan. Aspirasi terkait rencana pemerintah mendapatkan pinjaman/pendanaan dari luar negeri yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan. Antara lain berasal dari IsDB, World Bank, AIIB, serta ADB.

"Pelaksanaan pinjaman luar negeri tersebut harus dilakukan sesuai UU Kesehatan serta regulasi terkait lainnya yang berlaku, dengan tetap memastikan aspek keamanan, kualitas, kinerja, dan ketersediaan. Lebih penting lagi, jangan sampai mematikan tumbuhkembangnya industri alat kesehatan nasional yang kini sedang masif dilakukan oleh dunia usaha anak bangsa. Sebagai dukungan terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri dan pengurangan pemakaian produk impor di segala bidang, termasuk bidang farmasi dan alat kesehatan," ujar Bamsoet usai menerima pengurus Gakeslab Indonesia, di Jakarta, Jumat (13/10/23).

Turut hadir pengurus Gakeslab Indonesia, antara lain Ketua Umum Rd. Kartono Dwidjosewojo, Wakil Ketua 1 Ary Gunawan, dan Wakil Sekjen 1 Irwan Sutrisno. Hadir pula pengurus Gakeslab DKI Jakarta, antara lain Wakil Ketua 1 Yan Herman, Wakil Ketua 2 TB Mualif, Wakil Ketua 3 Andri Noviar, Sekretaris Ridwan Saleh, Ketua Bidang Industri Adhiarto, Ketua Bidang Perdagangan Josephine Marpaung, serta anggota Bidang Industri Akmal.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pelaksanaan pinjaman/pendanaan dari luar negeri yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan tersebut direncanakan untuk 20 rumah sakit nasional, 49 rumah sakit provinsi, dan 489 rumah sakit kota/kabupaten. Ada juga untuk 10.322 Puskesmas, 48.442 Poskesdes, dan 1.500.000 Posyandu. Ditambah 514 tier-2 labs, 38 tier-3 labs, 12 tier-4 labs, dan 2 tier-5 labs.

"Menurut Gakeslab Indonesia, beberapa unit alat kesehatan yang akan disiapkan di berbagai pelayanan kesehatan tersebut sudah bisa diproduksi dari dalam negeri. Sehingga tidak perlu impor, karena dikhawatirkan akan mematikan perkembangan industri alat kesehatan nasional. Kalaupun ada yang diimpor melalui skema pinjaman/

pendanaan dari luar negeri, ada baiknya dilakukan dengan menggandeng partner lokal dari Indonesia," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, reformasi sistem kesehatan nasional merupakan agenda besar Kementerian Kesehatan. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan merupakan kebijakan bagian dari pilar ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan yang harus senantiasa didukung.

Terlebih data dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI melaporkan hingga awal tahun 2023, industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia selama ini masih sangat bergantung pada produk impor, baik dari segi bahan baku maupun teknologi yang digunakan. Sebanyak 70% suplai alat kesehatan di Indonesia masih dipenuhi oleh alat kesehatan impor.

"Pertumbuhan industri alat kesehatan di Indonesia sebenarnya terus melesat. Tahun 2021 tercatat ada 891 perusahaan yang memproduksi alat kesehatan. Meningkat pesat dibanding tahun 2015 yang hanya tercatat 123 perusahaan. Pertumbuhan ini harus terus didukung dengan berbagai kebijakan yang pro terhadap industri alat kesehatan nasional. Sehingga kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian nasional juga semakin besar," pungkas Bamsoet. ❑

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Terima Pengurus Pemuda Panca Marga

Bamsoet: Desakan Amandemen Ke-5 Semakin Kuat

Hasil kajian PPM juga menekankan pentingnya mengembalikan kedudukan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagaimana juga sudah diusulkan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menerima hasil kajian dari Pemuda Panca Marga (PPM) yang menilai bahwa setelah empat kali amandemen telah melahirkan sebuah 'konstitusi baru' yang oleh PPM dan banyak kalangan lain disebut sebagai UUD Tahun 2002. 'Konstitusi baru' tersebut tidak lagi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, karena ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antarpasal dan antar ayat.

Sebelumnya, aspirasi yang sama juga telah disampaikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), FKPPI, Pemuda Pancasila, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Forum Komunikasi (FOKO) Purnawirawan TNI/Polri serta Wapres RI ke-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

6 Try Sutrisno, dan dukungan sekitar 7.841 lembaga swadaya masyarakat yang tersebar di tanah air secara tertulis tahun 2011 melalui ke DPD RI .

Bahkan, Guru Besar Ilmu Filsafat UGM, Prof. Kaelan, pernah mengungkapkan ada sekitar 97% pasal yang diubah dalam empat kali amandemen tersebut. Kajian lain mengungkapkan, jumlah ayat dalam konstitusi setelah empat kali amandemen bertambah sekitar tiga kali lipat. Secara kualitatif, perubahan yang dilakukan dalam empat kali amandemen sangat banyak dan mendasar.

"Tidak heran jika PPM dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti FKPPI, Pemuda Pancasila, bahkan juga DPD RI, mengusulkan agar MPR RI segera menyelenggarakan sidang paripurna agar konstitusi dikembalikan kepada naskah sesungguhnya yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, untuk kemudian disempurnakan melalui addendum. Sehingga tidak menghilangkan naskah original yang dibuat oleh para pendiri bangsa," ujar Bamsoet usai menerima pengurus PPM, di Jakarta (23/10/23).

Pengurus PPM yang hadir, antara lain Ketua Umum Berto Izaak Doko, Sekretaris Jenderal Delwan Noer, Wamtimpus Suryo Susilo, Ketua Keanggotaan dan Kaderisasi Arthur Lumban Raja, serta Wasekjen Randi Putomo.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, hasil kajian PPM juga menekankan pentingnya mengembalikan kedudukan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Sebagaimana juga sudah diusulkan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

PPM juga menekankan pentingnya mengembalikan kewenangan subjektif superlatif MPR RI melalui Tap MPR RI, seperti halnya presiden yang memiliki kewenangan Perppu manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan memaksa. Keberadaan TAP MPR RI bisa menjadi pintu darurat konstitusi sekaligus solusi dalam mengatasi berbagai persoalan negara tatkala dihadapkan pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antarlembaga negara atau antarcabang kekuasaan hingga kondisi kedaruratan Kahar Fiskal dalam skala besar.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Misalnya, ketika terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR RI, kebuntuan politik antara pemerintah dan DPR RI dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), serta jika terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK. Mengingat sesuai asas peradilan yang berlaku universal, hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara," jelas Bamsoet.

Dosen tetap Pascasarjana Program S3 Ilmu Hukum Universitas Borobudur tentang Pembaharuan Hukum Nasional dan Politik Hukum dan Kebijakan Publik ini menerangkan, empat kali amandemen juga menghilangkan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI. Padahal, keberadaan Utusan Golongan sudah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada 22 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS, yang pada saat itu terdiri atas anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Keberadaan Utusan Golongan juga tetap eksis pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Keberadaan utusan golongan pada saat itu terdiri dari 13 macam golongan. Antara lain Golongan Tani, Golongan Buruh/Pegawai Negeri, Golongan Pengusaha Nasional, Golongan Koperasi, Golongan Angkatan '45, Golongan Angkatan Bersenjata, Golongan Veteran, Golongan Alim Ulama, Golongan Pemuda, Golongan Wanita, Golongan Seniman, Golongan Wartawan, dan Golongan Cendekiawan/Pendidik. Pada saat Reformasi bergulir, keberadaan Utusan Golongan malah dihapuskan.

"Landasan pemikiran Presiden Soekarno sangat jelas dan tegas. Tidak boleh ada satupun elemen bangsa yang merasa ditinggalkan. Sehingga lembaga perwakilan pun harus merepresentasikan seluas-luasnya kepentingan rakyat. Lembaga perwakilan yang dimaksud adalah yang dapat mewakili rakyat, mewakili daerah, dan mewakili golongan," pungkas Bamsoet. ❑

Terima Jajaran Citic Environment Investment Group

Bamsoet Ajak Investor Asing Tanamkan Modal di Indonesia

Indonesia terpilih menjadi tuan rumah perhelatan World Water Forum 2024. Dalam kick-off meeting Februari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bahwa konservasi air dan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengajak para investor asing untuk tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia sekalipun Pemilu 2024 tinggal 3 bulan lagi. Penyelenggaraan Pemilu, baik Pileg dan Pilpres maupun Pilkada Serentak 2024, tidak akan membuat kondusifitas bangsa terganggu. Situasi politik di Indonesia tetap kondusif dan pro terhadap investasi.

"Tiga pasang Capres-Cawapres, yakni: Ganjar Pranowo – Mahfud, MD., Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, serta Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, mereka semua saling bersahabat. Sehingga Pilpres 2024 tidak ubahnya seperti pertandingan persahabatan. Begitupun dengan partai politik yang kini sudah semakin dewasa dalam berpolitik. Kita sudah melewati Pemilu 2019 yang cukup keras yang mengajarkan bahwa politik tidak boleh lagi mengorbankan persaudaraan kebangsaan. Karenanya, Pemilu 2024 nanti diprediksi berjalan aman, nyaman, lancar dan tidak menimbulkan kegaduhan yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas perekonomian," ujar Bamsoet usai menerima jajaran Citic Environment Investment Group Co., Ltd, di Jakarta, Selasa (24/10/23).

Turut hadir, antara lain Chairman of Citic

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Engineering Yang ShuPing, Chairman of Citic Environment SG Chong Weng Chiew, Vice Chairman of CITIC Engineering and Commissioner of CITIC Environment SG Wang Song, Principal of CITIC Design and Engineering Li GuoHong, Investment Director in CITIC Engineering Wu XiaoDong, serta Commissioner of PT. CITIC Envirotech Indonesia Wilfred Hanafi.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi hadirnya Citic Group yang berinvestasi di Indonesia. Salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Danareksa terkait pengolahan limbah menjadi air bersih pada kawasan industri dalam portofolio Holding Danareksa. Citic Group memiliki pengalaman dalam mengelola air bersih di berbagai kawasan industri. Antara lain pada kawasan industri Chaonan Textile Printing and Dyeing Industrial Park, di Kota Guangzhou.

Investasi penyediaan air bersih di Indonesia terbuka lebar. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2016, dibuka peluang investor untuk melakukan kerja sama berupa investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan infrastruktur air minum yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

"Terlebih pada tahun 2024 nanti, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah perhelatan World Water Forum 2024. Dalam kick-off meeting Februari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan bahwa konservasi air dan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, data Kementerian PUPR tahun 2022 menunjukkan tingkat kebocoran air (non revenue water/NRW) di Indonesia sebesar 33,72%. Artinya, ada 1,7 miliar meter kubik air terbuang dalam 1 tahun, berakibat pada hilangnya potensi pendapatan sebesar Rp 9,6 triliun per tahun. Sedangkan secara kualitas, kebocoran pipa membuka potensi kontaminasi mikrobiologi dan fisik masuk ke pipa pelanggan.

"Data lain dari Kementerian PUPR mencatat, layanan perpipaan di Indonesia masih rendah, hanya sekitar 21,69%. Menjadikan peluang penyediaan air bersih terbuka lebar. Sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara 'terseksi' dalam investasi penyediaan air bersih," pungkas Bamsoet. ❑

Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia

HNW: Generasi Muda Berada di Garda Terdepan Selamatkan Kiblat Bangsa

Anak-anak muda sudah sewajarnya kembali ambil inisiatif, tampil di garda terdepan melanjutkan peran-peran sejarah yang semuanya sangat mungkin untuk terulang.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc.MA atau HNW mengapresiasi terbentuknya perkumpulan Pemuda Parlemen Indonesia, dan mengingatkan agar mereka berani maju ke depan menjadi inisiator, melanjutkan peran mensejarah para Pemuda, termasuk dalam meluruskan kiblat bangsa melalui Parlemen. Karena, terbukti Perlemen Indonesia sangat berjasa untuk rakyat dan negara Indonesia dengan mengembalikan bentuk Negara dari RIS kembali menjadi NKRI melalui Mosi Integral Ketua Fraksi Partai Masyumi di Parlemen RIS pada 1950. Dan, pada tahun 1998 dengan sukses menghadirkan tuntutan Reformasi, yaitu amandemen terhadap UUD 45.

Itu semua, lanjut HNW, terkait dengan peristiwa politik atau yang terhubung dengan partai politik. Maka sewajarnya, anak-anak muda yang adalah mayoritas pemilih di Indonesia mengulangi dan melanjutkan peran mensejarah tersebut. Apalagi generasi muda telah diberi ruang sangat luas oleh era Reformasi maka hadirnya komunitas Parlemen Pemuda Indonesia penting menjadi inspirasi aktif bergerak, berada di garda terdepan, mengedukasi dan menyadarkan para pemuda Indonesia agar tidak a-politik. Bahkan, demi masa depan generasi muda, pergunakan kedaulatan yang diberikan oleh Konsitusi untuk bisa memilih pemimpin atau wakil takyat dengan baik dan benar dalam Pemilu tahun 2024 yang akan datang.

HNW mengingatkan, jangan sampai pemuda Indonesia sebagai pemilik peran mensejarah dan sekaligus pemilik kedaulatan malah terbawa framing persepsi tentang generasi milenial, generasi Z, yang digambarkan sebagai generasi yang tidak mau berpolitik, tidak mau repot, inginnya yang instan serta santai, lalu akhirnya memilih golput.

"Kalaupun memilih, jangan dengan semangat hura-hura dan asal-asalan. Sehinga mereka yang terpilih sebagai pimpinan nasional atau wakil rakyat bukanlah representasi yang terbaik untuk Indonesia pada masa sekarang maupun yang akan datang," kata HNW saat menjadi narasumber dalam Konferensi Pemuda Parlemen Indonesia yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Jakarta, Senayan, Rabu (25/10/2023).

HNW mengingatkan, jika anak-anak muda asal memilih maka hasilnya juga asal-asalan. Anggota parlemen yang terpilih asal-asalan, pimpinan eksekutif juga asal-asalan. "Negeri kita bukanlah negeri asal-asalan. Maka jangan sampai budaya berpolitik bangsa Indonesia dan generasi mudanya juga asal-asalan," ujar HNW. Indonesia, tegas HNW, adalah negara yang merdeka karena perjuangan. Ini bukan negeri asal-asalan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Potensi Indonesia sangat luar bisa. SDA luar biasa kaya raya. Jati diri Indonesia sangat dihormati bangsa-bangsa dunia. Maka sewajarnya bila Parlemen dan pimpinan Pemerintah yang dipilih oleh kaum muda juga bukan yang asal-asalan," katanya.

Menurut HNW, dari sisi konstitusi, semua sudah diberikan landasan konstitusionalnya. "Tinggal bagaimana konsistensi menjalankan konstitusi. Ini yang penting untuk selalu diingatkan pada anak-anak muda. Pemuda Parlemen Indonesia yang rasional, kritis, yang datang dari seluruh Indonesia bisa menyegarkan kembali semangat reformasi, semangat anak-anak muda dari tahun 20-an, 50-an, dan tahun 98-an dengan reformasi itu," ujarnya.

Karena itu, lanjut HNW, anak-anak muda sudah sewajarnya kembali ambil inisiatif, tampil di garda terdepan melanjutkan peran-peran sejarah yang semuanya sangat mungkin untuk terulang. Kemerdekaan Indonesia diinisasi anak-anak muda. Pada tahun 1923-1924, anak-anak muda terpelajar yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia di Belanda untuk pertamakali membawa nama "Indonesia". Kemudian anak-anak muda ini berkomunikasi dengan simpul-simpul, seperti Jong Ambon, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan Jong Islamieten Bond. Mereka kemudian menguatkan simpul itu melalui Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928.

"Para pemuda ini menyiapkan Indonesia merdeka 20 tahun ke depan, pada 1945. Sekarang tahun 2023-2024 maka 20 tahun yang akan datang anak-anak muda akan bertemu dengan Indonesia Emas, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka. Sejarah adalah pengulangan. Ada siklus 100-tahun, ada siklus 20 tahun. Dulu, 1928, lalu 20 tahun berikutnya Indonesia merdeka. Sekarang 2023-2024, menuju 2045. Maka siapkan diri Anda semua para aktifis Pemuda Parlemen Indonesia untuk menyemangati dan mengedukasi warga, agar warga Indonesia mempunyai kesadaran kolektif, menyelamatkan bangsa dan negara, menuju tahun emas 2045," ucapnya.

HNW menguraikan, pada masa reformasi, anak-anak muda kembali melaksanakan peran mensejarahnya dan meluruskan kiblat bangsa. Tuntutan reformasi itu, antara lain menolak KKN dan melakukan amandemen UUD 1945 agar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita Proklamasi dan menciptakan kehidupan yang demokratis. Karena itu, setelah UUD diamandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan lagi di MPR. Pemilik kedaulatan tertinggi adalah rakyat, seperti tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.

Tuntutan reformasi juga menghasilkan Indonesia adalah negara hukum. Juga penghormatan atas hak asasi manusia (pasal 28 a hingga 28 j). "Saat reformasi, anak-anak muda sudah beperan. Peran itu sangat mungkin untuk dilanjutkan oleh komunitas muda, termasuk Perhimpunan Parlemen Indonesia, dengan berpegangan pada prinsip kedaulatan di tangan rakyat, pelaksanaan HAM, juga prinsip negara hukum," kata HNW.

Mayoritas Rakyat Indonesia adalah anak-anak muda, baik generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Dia berharap, komunitas Pemuda Parlemen Indonesia dapat berkolaborasi dengan anak-anak muda dan pihak-pihak senior lainnya, agar peluang dan kesempatan konstitusional yang diberikan Reformasi ini tidak menjadi mubazir, agar segala macam tantangan dan rintangan menuju Indonesia Emas tahun 2045 dapat diatasi. "Serta, segala peluang yang ada, baik di tingkat nasional maupun global, dapat dipergunakan untuk mewujudkan spirit Proklamasi dan cita-cita Reformasi," pungkasnya. ❑

Tahapan yang Perlu Dilalui untuk Amandemen

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sejumlah anggota Badan Pengkajian, akademisi, dan peneliti di salah satu LSM, membedah tentang mengapa perlu melakukan amademen dan bagaimana prosedurnya. Amandemen sah-saja dilakukan, namun ada berbagai tahapan yang harus dilakukan.

BERADA di Kota Bogor, Jawa Barat, September 2023, Badan Pengkajian MPR menggelar acara *focus group of discussion* (FGD). FGD yang bertema: *Tata Cara Perubahan UUD NRI Tahun 1945* itu diikuti oleh anggota Badan Pengkajian, yakni Prof. Hendrawan Supratikno dari Fraksi PDI Perjuangan, Sri Wulan dari Fraksi Nasdem, Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golkar, Marwan Cik Asan dari Fraksi Partai Demokrat, serta Anna Latuconsina dan Ajbar yang keduanya anggota MPR dari Kelompok DPD.

Dalam FGD itu diundang peneliti dari Perludem, Muhammad Ihsan Maulana; Hurriyah dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, dan Radian Syam Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Dalam makalahnya, Ihsan Maulana mengupas latar belakang tata cara perubahan UUD. Dikatakan, perubahan konstitusi merupakan konsekuensi dari teori konstitusi di mana konstitusi merupakan 'resultante' dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Poleksosbud). Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi saat itu, ketika konstitusi dibuat, (Moh. Mahfud, MD).

Perubahan konstitusi dimaksudkan untuk merespon perubahan-perubahan tertentu yang mengharuskan perubahan itu dilakukan (Sri Soemantri) dan satu-satunya alasan mendasar diperlukannya perubahan suatu UUD dalam suatu Negara, karena substansi pengaturan dalam UUD tersebut mengalami banyak kelemahan yang justru dapat membuat eksistensi suatu negara menjadi lemah. Kelemahan tersebut dapat terjadi dalam skala keseluruhan isi maupun dalam beberapa bidang aturan tertentu (Ni'matul Huda).

Dasar hukum dari perubahan UUD adalah Pasal 37 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3), mulai Pasal 24 sampai dengan Pasal 32, Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI (Peraturan Tatib MPR) Pasal 101 sampai dengan Pasal 109.

Dalam hal ini, Ihsan Maulana menyebut peran penting dari Panitia Ad Hoc. Diuraikan, Sidang Paripurna MPR membentuk Panitia Ad Hoc untuk mengkaji usul perubahan dari pihak pengusul yang waktunya disepakati dalam Sidang Paripurna MPR. Pimpinan MPR menempatkan Panitia Ad Hoc dalam menghasilkan kajian-kajian untuk kenegaraan.

Pembentukan Panitia Ad Hoc yang akan menyusun substansi Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) akan menghasilkan dokumen kenegaraan yang dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah dan DPR dalam merevisi UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 Tahun yang akan berakhir pada tahun 2025 yang akan datang.

Dirinya berharap, peran strategis Panitia Ad Hoc untuk menyusun substansi, menghasilkan dokumen kenegaraan yang dapat dijadikan acuan oleh pembentuk UU, dokumen kearifan yang akan menjadi rujukan bagi anggota MPR dalam melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 secara terbatas.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam FGD itu, Ihsan Maulana menyatakan, rumusan-rumusan masalah yang ada, apakah tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam Undang-Undang MD3 dan peraturan Tata Tertib MPR sudah tepat dan sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945? Tak hanya itu, sejauh mana kewenangan Panitia Ad Hoc dalam mengkaji usul perubahan UUD dari pengusul, apakah sebatas mengkaji alasan perlu tidaknya dilakukan perubahan pasal-pasal yang diusulkan atau termasuk mengubah rumusan/redaksi pasal-pasal yang diusulkan? Dan, apabila dalam mengkaji usulan pasal-pasal perubahan ditemukan kaitan dengan pasal lain, apakah Panitia Ad Hoc dapat merumuskan perubahan pasal-pasal terkait tersebut sekalipun tidak termasuk pasal-pasal yang diajukan oleh pengusul?

Ihsan menyebut kesesuaian tata cara perubahan UUD yang diatur dalam Undang-

Undang MD3 dan Peraturan Tata Tertib MPR dengan UUD NRI Tahun 1945. Disampaikan, menelusuri original intent tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945, pada saat masa awal-awal PAH BP MPR akan melakukan perubahan sudah menyatakan bahwa saat itu, Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar dan prosedur perubahan tidak merinci mengenai mekanisme perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam melakukan perubahan, MPR mendasarkan pada mekanisme yang telah diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan MPRI Nomor I/MPR/1998.

Kemudian, BP MPR yang merupakan alat kelengkapan MPR membentuk tiga Panitia Ad Hoc (PAH) sebagai alat kelengkapan, yaitu PAH I untuk Rancangan Ketetapan (Rantap) Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), PAH II untuk Rantap non- GBHN, dan PAH III untuk Perubahan UUD 1945.

Lebih lanjut diungkap, tiap-tiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai materi UUD NRI Tahun 1945 yang diusulkan untuk diamendemen/diubah. Setelah dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Materi (DIM), selanjutnya materi UUD 1945 yang diusulkan oleh tiap-tiap fraksi untuk diubah, dikompilasi oleh Tim Perumus yang keanggotaannya terdiri atas pimpinan PAH III dan wakil-wakil fraksi yang tidak terwakili dalam unsur pimpinan, tiap-tiap fraksi diwakili oleh 1 (satu) orang. Hasil kompilasi materi perubahan UUD NRI Tahun 1945, setelah disepakati oleh forum rapat PAH III dibahas sesuai dengan urutan prioritas yang telah disepakati oleh semua fraksi, serta materi yang telah disepakati akan dimintakan persetujuan untuk disahkan dalam forum rapat PAH III.

Selanjutnya dalam makalah itu dikatakan, seluruh materi dibahas dalam rapat Pleno PAH I BP MPR. Untuk memperlancar pembahasan, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR di mana perlu membentuk Tim Perumus yang keanggotaannya mencerminkan fraksi-fraksi dengan tugas merumuskan materi-materi yang telah dibahas dalam rapat pleno, yang biasanya didahului dengan pertemuan lobi antarfraksi.

Hasil kesepakatan Tim Perumus selanjutnya dibahas dalam rapat sinkronisasi dengan tujuan menyerasikan materi-materi yang saling keterkaitan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya, dan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Materi yang telah disinkronkan selanjutnya dibahas dalam rapat finalisasi, dengan tujuan merumuskan dan men-sistematisir materi perubahan kedua UUD 1945.

Putusan yang dihasilkan dalam Rapat Tim Perumus, Tim Sinkronsasi, dan Finalisasi bersifat mengikat, dan selanjutnya disahkan dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR pada Sabtu, 29 Juli 2000, dan selanjutnya akan menjadi bahan laporan ke BP MPR yang meneruskan ke Sidang Tahunan MPR. ❑

Untuk Menguatkan Kedaulatan Rakyat

Banyak alasan mengapa amandemen itu bisa terjadi, salah satunya adalah untuk menguatkan kedaulatan rakyat. Meski demikian, ada ketentuan prosedural untuk melakukan perubahan. Akademisi dari Universitas Indonesia dan Tri Sakti menjelaskan masalah itu.

HURRIYAH dalam makalah mengatakan, konstitusi adalah aturan tertinggi bernegara dan hierarki hukum tertinggi dalam perundang-undangan, maka amandemen adalah hal serius tidak boleh dilakukan serampangan dan tergesa-gesa. Amandemen harus dipahami sebagai penambahan atau perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah aslinya, dan diletakkan pada dokumen yang bersangkutan. Amandemen bukan sekedar menyisipkan kata-kata atau perihal baru dalam teks.

Diungkap amandemen pada UUD terjadi karena tuntutan dan perubahan rezim, penguatan sistem politik demokrasi, penguatan kedaulatan rakyat, dan jaminan perlindungan warga negara.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Mengapa amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan? Disebut ada problem normative, yakni unsur-unsur konstitusionalisme tidak memadai. Problem prosedural, yakni dirumuskan secara tergesa-gesa, ditetapkan dalam waktu sangat singkat, dan statusnya sementara. Sedang problem substansial,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

yakni pengaturan tidak lengkap, kecenderungan executive heavy, serta ambigu dan multi tafsir.

Dirinya menyebut Rasionalisasi: Landasan yang utuh dengan filosofis dan teoritis yang menjadikan UUD sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa, mengembalikan dan memperkuat paham konstitusionalisme, memastikan perlindungan HAM, ketundukan pada hukum, dan independensi peradilan. Sedang politis dan sosiologis harus bisa menyesuaikan perkembangan dan tuntutan zaman dan penyesuaian dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan bangsa.

Hurriyah juga mengatakan, rasionalisasi: tujuan yang jelas agar mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi, memperbaiki bagian yang kurang sehingga proses dan mekanisme perubahan/penciptaan per-UU-an sejalan dengan konstitusi, dan menyempurnakan aturan-aturan dasar terkait hal-hal tertentu (tatanan negara, jaminan kedaulatan rakyat, jaminan perlindungan HAM , penyelenggaraan negara secara demokratis, dan hal-hal terkait kehidupan berbangsa/bernegara yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara).

Radian dalam makalahnya mengutip pendapat Bentham yang mengatakan, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (happiness).

Ia juga mengutip pendapat Lawrence M. Friedman yang mengklasifikasikan 3 elemen penting yang menentukan berfungsi atau tidaknya hukum: (1). Struktur Hukum (Tatanan daripada elemen lembaga hukum); (2). Budaya Hukum (Nilai-nilai, Norma-norma yang menjadi dasar dari sikap perilaku hamba hukum); (3). Substansi Hukum (Peraturan dan/atau regulasi yang dibuat lembagaberwenang.

Radian menyebut alasan amandemen. Diungkapkan, dari segi historis, yakni disusun dengan tergesa-gesa. Alasan filosofis, yakni campuran paham negara hukum dengan kekuasaan. Teoritis, yakni pandangan konstitusi sebagai pembatasan kekuasaan negara, dan alasan praktis, yakni praktiknya selalu berubah. Serta alasan yuridis, yakni diatur pasal terkait Perubahan UUD.

Dalam makalahnya, Radian juga menulis tentang tantangan utama pemilu demokratis. Disebut tantangan itu: *Pertama*, power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely (Lord Acton). Penyelenggara pemilu dalam struktur ketatanegaraan disebut sebagai lembaga penunjang/ pendukung/ pembantu (Auxiliary State's Institutions atau Auxiliary State's Organs). KPU, Bawaslu, berhubungan dengan jabatan, kewenangan administratif, sampai memiliki jajaran di tingkat daerah. Karena itu, tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah persoalan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang praktik terbesarnya pada korupsi jabatan atau kewenangan.

Kedua, Lembaga Survey Indonesia (LSI) merilis, pada Pemilu 2019 tercatat 48% masyarakat menganggap politik uang sebagai hal biasa. Pada Pilkada 2020 terdapat 21,9% responden pernah satu atau dua kali ditawari uang atau barang untuk memilih calon gubernur tertentu. Sebanyak 22,7% mengaku ditawari uang atau barang untuk memilih bupati/walikota tertentu. Rilis Lembaga Penelitian Founding Father House (FFH) menyebutkan, dalam kurun waktu 2010-216 masyarakat yang setuju politik uang fluktuatif. Tahun 2010 (64,5%); Tahun 2011 (61%),Tahun 2012 (53%); Tahun 2013 (58,5%); Tahun 2014 (66%); Tahun 2015 (63%); Tahun 2016 (61,8%).

Di akhir makalah, Radian mengutip pendapat Bung Hatta yang mengatakan, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa merusak dan mencuri kekayaan ibu pertiwi. ❑

Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q,. M.A
Wakil Ketua MPR RI

Jihad Santri Menegakkan Keadilan dan Kemakmuran

PERINGATAN Hari Santri pada 22 Oktober kali ini mengambil tema "Jihad Santri, Jayakan Negeri". Merujuk pada pernyataan pemerintah dalam surat edarannya, tema kali ini dimaksudkan untuk merayakan semangat dan dedikasi para santri sebagai pahlawan di bidang pendidikan dan pengentasan kebodohan. Ada dua kata yang digarisbawahi dari tema tersebut, yakni jihad dan negeri.

Dewasa ini, jihad tidak lagi dimaknai sebagai suatu pertempuran fisik, tapi lebih condong pada jihad intelektual. Dalam konteks tradisi Islam, jihad intelektual di sini bermakna sebagai olah pikir dan olah batin untuk kemudian diterapkan secara konkret melalui perilaku yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Jihad intelektual ini menemukan kontekstualisasinya dengan persoalan kebangsaan hari ini seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran, serta keterbelakangan masyarakat.

Sedangkan frasa negeri hendak menekankan bahwa peran dan kontribusi santri ditujukan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, serta tidak terjebak pada sekat atau dikotomi antara agama dan negara. Hal ini selaras dengan jargon *Hubbul Wathon Minal Iman*, cinta negara adalah sebagian dari iman.

Sejarah dan Perenungan

Kita perlu merenungi kembali genealogi dan histori penetapan hari santri. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri ini telah melalui proses yang panjang. Diusulkan pada 2014 dan kemudian ditetapkan melalui Keppres No. 22/2015. Jika ditarik lebih jauh, genealogi hari santri ini mengacu pada Resolusi Jihad yang dikumandangkan oleh hadratus syekh KH. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 kepada seluruh santri untuk membantu perjuangan rakyat melawan invasi tentara Belanda yang membonceng sekutu.

Puncaknya adalah pada tanggal 10 November 1945 ketika meletus pertempuran hebat di Surabaya. Dalam pertempuran itu, Brigjen Mallaby tewas di tangan rakyat Indonesia. Resolusi jihad tersebut secara eksplisit menandai peran besar kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan. Kaum santri tidak pasif apalagi apatis terhadap situasi dan kondisi kebangsaan pada saat itu. Kalangan militer yang belum terorganisir dengan baik pada saat itu bahkan menyebut bahwa peran kaum santri dalam pertempuran Surabaya pada waktu itu merupakan bentuk konkret dari prinsip sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau sishankamrata yang dianut oleh TNI hingga saat ini.

Gus Dur pada suatu kesempatan menyatakan bahwa kaum santri adalah komponen utama dalam membentuk republik. Oleh sebab itu, beliau menyayangkan jika ada pihak-pihak yang memarginalkan kaum santri. Beliau bahkan menyebut bahwa peran kaum santri bahkan lebih besar, hanya saja kaum santri lebih suka mengalah dan tidak mau menonjolkan diri. Penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menunjukkan kebesaran hati kaum

ulama dan santri untuk menjaga persatuan dan keberagaman. *Hifdzul Mitsaq* atau menjaga kesepakatan bersama, yakni Pancasila dan NKRI, adalah jargon yang dipegang teguh para santri hingga kini.

Berbicara mengenai penguatan peran santri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejatinya tidak terlepas dari seberapa kokoh pondok pesantren atau ponpes tempat para santri berada dan menuntut ilmu. Lebih lanjut, hal ini akan merujuk pada kurikulum yang berlaku di ponpes tersebut. Pengelolaan dan proses belajar mengajar di ponpes seyogianya dilakukan secara modern dengan memadukan antara pendidikan agama, pendidikan umum, serta perkembangan sains dan teknologi informasi. Pendidikan agama menjadi fondasinya, yang lain menjadi pilarnya.

Dunia dewasa ini memasuki era disrupsi dan *VUCA* atau ketidakpastian. Oleh sebab itu, tata kelola SDM di ponpes harus membekali para santri dengan *hard skill* dan *soft skill* yang cukup. Untuk mewujudkan hal tersebut, eksistensi regulasi menjadi faktor pendukung. Sudah ada UU Pesantren yang disahkan pada 2019, yang kemudian diperkuat dengan Perpres No. 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Keberadaan kedua regulasi tersebut secara eksplisit menunjukkan kehadiran dan peran negara dalam pengelolaan ponpes.

Tantangan Nasional dan Global

Ada banyak sekali tantangan kebangsaan yang dihadapi oleh Indonesia, yang mana tantangan tersebut seyogianya juga menjadi concern kaum santri. Beberapa di antaranya yang cukup menonjol adalah politik identitas yang menguat di masyarakat, serta radikalisme yang tumbuh subur. Kaum santri harus berani mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Di lingkungan perguruan tinggi misalnya, yang kerap dijadikan sasaran diseminasi ajaran radikalisme, kaum santri dapat menyuntikkan pemahaman Islam secara benar kepada lingkungan sekitarnya, yakni Islam yang inklusif, moderat, dan cinta perdamaian.

Kaum santri dapat bergerak lebih maju sebenarnya dengan terlibat secara formal dalam kegiatan deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT RI terhadap napiter. Terkait politik identitas, kaum santri hendaknya menjadi suluh di masyarakat agar tidak terprovokasi oleh wacana identitas dalam politik elektoral yang dapat memantik polarisasi dan konflik sosial di masyarakat. Dengan pilihan-pilihan sikap sedemikian, sejatinya kaum santri telah berkontribusi nyata dalam kebijakan nasional.

Pada tataran selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan peran santri dalam proses diplomasi dan kerja sama global. Pertama yang harus digarisbawahi adalah dasar polugri Indonesia adalah amanat konstitusi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Kedua, diplomasi Indonesia berpijak pada prinsip polugri bebas dan aktif, yang artinya tidak partisan. Ketiga, diplomasi dapat ditempuh secara multitrack atau banyak jalur, baik *government to government*, *people to people*, bahkan *business to business*.

Dengan mengacu pada tiga hal tersebut, kaum santri memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam proses diplomasi dan kerja sama global. Dewasa ini, banyak sekali tantangan global yang harus dihadapi. Diskriminasi terhadap umat muslim di Thailand Selatan, Xinjiang Uighur, serta etnis Rohingya di Myanmar, adanya muslim phobia di AS dan Eropa yang membuat Muslim didiskriminasi, tumpulnya negara-negara Arab dalam geopolitik global, hingga penjajahan Palestina oleh Israel yang tak kunjung bisa dihentikan.

Pemerintah Indonesia jika cukup jeli bisa melibatkan kaum santri untuk moderasi dan resolusi persoalan-persoalan tersebut baik secara *G to G* atau *P to P*. Tentunya pelibatan di sini harus dalam kerangka institusional seperti ponpes *exchange*, PBNU, Muhammadiyah, Kemenlu RI, dan Kemenag RI. Metodenya melalui asistensi, resolusi konflik, dialog antar-agama, dan kerja-kerja kemanusiaan. ❑

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

Tingkatkan Peran Santri dalam Proses Pembangunan Nasional

Peringatan Hari Santri harus menjadi momentum untuk meningkatkan peran para santri dalam proses pembangunan nasional.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DI TENGAH berbagai perubahan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan saat ini, hadirnya sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Ahad (22/10), dalam rangka Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober di Indonesia.

Bekal pendidikan akhlak yang diterima para santri di pesantren, menurut Lestari, merupakan salah satu faktor penting yang sangat dibutuhkan dalam membangun SDM nasional saat ini.

Terkait dengan hal itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pondok-pondok pesantren di seluruh daerah harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, para santri juga harus dibekali nilai-nilai kebangsaan yang kuat dalam menumbuhkan nasionalisme di dalam diri mereka. Apalagi, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tema Hari Santri tahun ini adalah Jihad Santri Jayakan Negeri.

Tema Periangatan Hari Santri tersebut, menurut Rerie, sekaligus menjadi pemacu bagi para santri untuk terlibat aktif seluas-luasnya dalam berbagai proses pembangunan nasional.

Rerie mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah agar konsisten membangun ekosistem pendidikan yang baik di pesantren sebagai bagian dari proses pembangunan SDM nasional yang berdaya saing dan berakhlak mulia di masa depan. ❑

Sejarah Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen

Pasar Sabtu di Antara Pohon De Nabang

Pasar Tanah Abang tercatat sebagai pasar grosir terbesar di Asia Tenggara. Ada ribuan pembeli setiap hari datang ke sana. Di saat Puasa dan Lebaran jumlah orang yang datang semakin membludag. Perubahan perilaku belanja masyarakat membuat pasar sepi. Pemerintah menyelamatkan Pasar Tanah Abang, selain dikenal sebagai simbol usaha mikro, kecil, dan menengah, di sana juga ada rentetan peristiwa perjalanan Jakarta dan bangsa Indonesia.

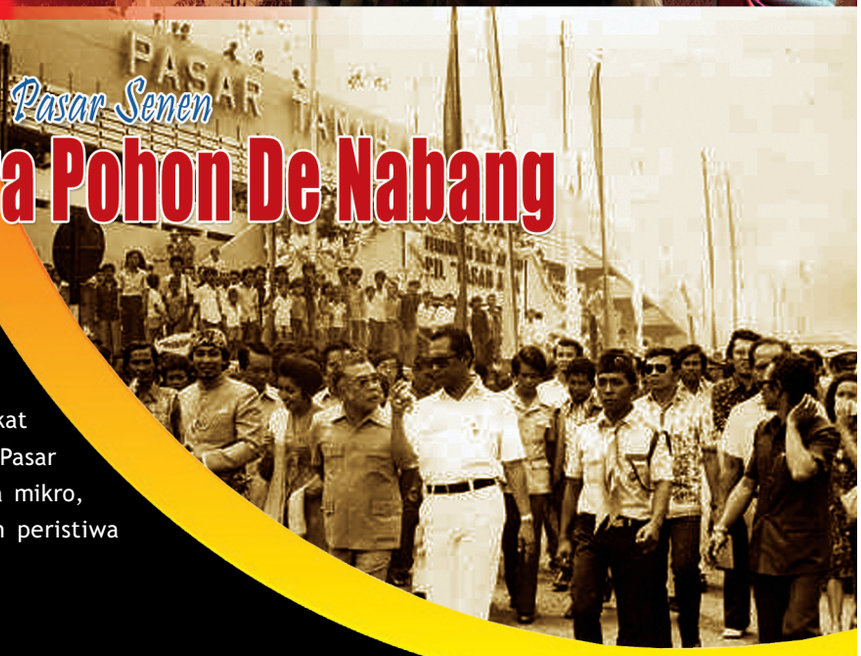

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PADA September 2023, ramai diberitakan di berbagai media, baik media massa maupun media so cial, tentang sepinya pengunjung Pasar Tanah Abang. Pasar yang berada di jantung Kota Jakarta itu menjadi berita besar sebab sepi pembeli. Tidak sebagaimana biasanya, pasar ini selalu ramai, apalagi memasuki bulan puasa hingga menjelang Lebaran.

Orang berbelanja di pasar yang berada di sebelah Jl. MH. Thamrin itu, selain harganya murah, juga bisa membeli dalam jumlah yang melimpah. Sebagai pasar grosir dan pasar rakyat, keberadaan pasar itu tidak hanya untuk belanja eceran, namun juga tempat kulakan. Bagi para reseller yang berasal dari seluruh Indonesia, di Tanah Abang mereka memborong barang belanjaan hingga berkarung-karung.

Jadi, kalau Pasar Tanah Abang ramai, itu bukan berita. Namun, akan menjadi berita besar ketika pasar itu sepi. Sudah banyak pasar dan mal sepi pembeli atau bahkan tutup luput dari pemberitaan, namun ketika Pasar Tanah Abang mengalami kondisi yang demikian, pemerintah langsung bersikap. Para menteri terkait pun, seperti Menteri Perdagangan serta Menteri Koperasi dan UMKM, angkat biacara.

Banyak faktor yang menyebabkan pasar itu sepi dari pembeli, salah satu masalahnya dan menjadi masalah bagi semua pasar dan pusat perbelanjaan adalah karena adanya perubahan perilaku belanja masyarakat. Sebelum ada cara belanja yang lebih mudah, praktis, serta irit biaya dan waktu, yakni lewat online, masyarakat berbondong-bondong ke pasar untuk berbelanja langsung. Ketika perilaku belanja berubah, satu persatu pusat perbelanjaan sepi hingga tutup, termasuk Pasar Tanah Abang yang sangat fenomenal itu.

Agar pasar grosir terbesar di Asia Tenggara itu tidak mengalami nasib seperti pasar-pasar yang lain maka pemerintah mengambil langkah tegas, melarang social commerce berjualan. Langkah ini sebagai upaya untuk menjaga keberadaan Pasar Tanah Abang dan pasar-pasar serupa yang ada di berbagai tempat di Indonesia.

Pasar Tanah Abang perlu diselamatkan, selain sebagai simbol perputaran atau aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, pasar itu juga menyimpan banyak sejarah tentang Jakarta dan Indonesia.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Menurut sejarahnya, sebelum menjadi pasar, Tanah Abang merupakan kawasan yang subur, berhawa sejuk, dan ditumbuhi oleh berbagai jenis pepohonan. Tekstur tanah di sana tidak hanya mendatar, namun juga ada gundukan. Bagi Kapitan Phoa Beng Gam, kawasan yang hijau dan subur itu merupakan potensi yang menjanjikan bila dikelola dengan baik.

Pada masa itu, Batavia dikuasai oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Seperti dipaparkan *Wikipedia*, VOC adalah Persatuan Perusahaan Hindia Timur-Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602. Perusahaan ini memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham.

Kepada VOC-lah pada tahun 1648, Phoa Beng Gam meminta izin untuk mengelola lahan tidur itu. Di lahan inilah, pria asal Cina itu membuka berbagai kebun untuk komoditas tanaman kacang, jahe, melati, nanas, sirih, serta jenis sayuran dan buah-

Abraham Patras

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

buahan lainnya.

Apa yang dilakukan oleh Phoa Beng Gam yang membuka lahan tidur menjadi perkebunan membuat ada geliat perekonomian di sana. Hal demikian rupanya dibaca oleh Justinus Vinck. Ada yang menyebutkan, sosok Vinck adalah pengusaha yang juga menjadi pengurus VOC.

Pada 30 Agustus 1735, dengan izin dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda Abraham Patras, Vinck mendirikan dua pasar sekaligus, yaitu: Satu pasar yang sekarang menjadi Pasar Tanah Abang, dan satunya lagi di Weltervredeen yang sekarang menjadi Pasar Senen. Ia melihat pengembangan Kota Batavia yang mengarah ke selatan, menjauhi Pelabuhan Sunda Kelapa, mempunyai prospek yang bagus. Untuk itu, perlu dibuat infrastruktur perekonomian pendukung, yakni pasar. Dengan membuat pasar maka Vinck mendapat keuntungan dari pajak yang dipungut. Agar kedua pasar yang dibangun terhubung maka Vinck membangun jalan yang menghubungkan keduanya.

Kali pertama tentu pasar yang ada tidak langsung seperti pasar yang ada saat ini. Izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal saat itu sebatas pasar untuk berjualan tekstil dan kelontong. Sementara pasar di Weltervredeen diberi izin untuk pasar sayuran.

Sebab, pada masa itu penduduk Batavia jumlahnya terbilang masih sedikit dan perputaran ekonomi belum secepat saat ini, maka pasar yang khusus menjual tekstil dan barang kelontong itu buka hanya di hari Sabtu. Karena yang buka setiap hari Sabtu maka disebut Pasar Sabtu.

Terkait nama, Pasar Sabtu selanjutnya berubah menjadi Pasar Tanah Abang. Sebutan demikian disematkan dengan alasan pada masa itu orang-orang Belanda menyebutnya dengan Pasar *De Nabang*. *De Nabang* adalah pohon palem. Di sana banyak tumbuh pohon palem (*nasional.tempo.co*). Sebutan *De Nabang* lamat-lamat menjadi 'Tenabang' dan akhirnya menjadi Tanah Abang.

Ada pula yang mengungkap, sebelum menyerang Batavia, Pasukan Sultan Agung bermarkas di sana dan melihat (T)anah yang ada berwarna *(A)bang* (merah), (*apahabar.com*). Kata *abang* ini berasal dari bahasa Jawa.

Dari berbagai catatan tersebut akhirnya pasar yang didirikan oleh Vinck itu disebut dengan Pasar Tanah Abang. Sebutan itu digunakan hingga saat ini.

Saat pasar kali pertama berdiri, bangunan yang ada berupa petak-petak yang tersusun dari dinding-dinding anyaman bambu dan beratap rumbia. Pasar tersebut tumbuh berkembang, bersaing dengan Pasar Senen yang berada di Weltervredeen.

Pada 8 Oktober 1970 di Batavia terjadi peristiwa yang disebut dengan *Geger Pecinan*. *Geger Pecinan* merupakan konflik kepentingan antara orang-orang Tionghoa dengan pemerintah Hindia – Belanda.

Gegeran tersebut memengaruhi pasar yang ada, sebab bangunan pasar yang saat itu baru berusia lima tahun dibakar dan diporakporandakan dengan meriam oleh tentara Hindia-Belanda. Pasar Tanah Abang menjadi sasaran kemarahan tentara, karena di pasar itu banyak toko yang dimiliki orang Tionghoa. Akibat serangan yang dilakukan oleh tentara Hindia-Belanda itu membuat banyak orang Tionghoa menjadi korban. Akibatnya, aktivitas pasar menjadi lumpuh, dan itu berlangsung dalam waktu yang lama.

Setelah hubungan antara orang Tionghoa dan Pemerintah Hindia – Belanda membaik, geliat pasar pun tumbuh kembali. Pada tahun 1881, geliat Pasar Tanah Abang semakin

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

berkembang, seiring dengan semakin banyak orang Tionghoa dan Arab bermukim di sekitar pasar. Akhirnya, pasar yang awalnya buka hanya pada hari Sabtu, ditambah satu hari lagi, yakni pada Hari Rabu, sehingga dalam seminggu pasar ini buka dua kali.

Pada masa itu bangunan pasar itu bisa dibilang mewah, namun pada kalau dilihat pada masa sekarang pasar itu tergolong sederhana, yakni terdiri dari dinding bambu dan papan serta atap rumbia. Di sana, tercatat ada los pedagang sebanyak 229 buah terbuat dari papan dan 139 buah terbuat dari petak bambu.

Komoditas yang dijual di pasar pun tidak hanya tekstil dan barang kelontong, kambing dan domba pun diperdagangkan di sini, sehingga Pasar Tanah Abang juga menjadi pasar hewan. Hadirnya perdagangan hewan berkaki empat tersebut bisa jadi karena hadirnya orang dan saudagar Arab di Tanah Abang.

Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk, keberadaan pasar semakin penting sehingga pemerintah yang berkuasa selalu memerhatikan geliat pasar yang ada. Dalam *Wikipedia* diungkapkan, akhir Abad XIX Pasar Tanah Abang terus mengalami perbaikan. Bagian lantai mulai dikeraskan dengan pondasi terbuat dari bahan adukan.

Keberadaan pasar semakin berkembang saat pemerintah Hindia - Belanda mem-bangun stasiun kereta api di samping pasar. Menurut catatan yang ada, Stasiun Tanah Abang diresmikan pada 1 Oktober 1899. Stasiun ini didirikan oleh *Staatsspoorwegen Westerlijnen* (SS-WL). Pembangunan stasiun ini untuk mendukung beroperasinya jalur Jakarta–Angke–Rangkasbitung. Hadirnya stasiun membuat orang-orang jauh lebih mudah untuk berbelanja ke pasar Tanah Abang, dan kebiasaan sejak 1899 itu terjadi hingga saat ini.

Lebih lanjut diungkap, pada tahun 1913, pasar yang ada kembali diperbaiki. Pada tahun 1926 pemerintah merenovasi total Pasar Tanah Abang. Bangunan semi permanen diganti dengan permanen, berupa tiga los panjang dari tembok dan papan, serta beratap genteng, dengan kantor pasarnya berada di atas bangunan pasar mirip kandang burung.

Pada masanya tempat parkir pun disediakan. Parkir yang ada berupa pelataran parkir di depan pasar untuk parkir kuda-kuda penarik delman dan gerobak. Untuk memfasilitas kuda penarik gerobak atau penumpang maka pengelola pasar menyediakan *kobakan* (kolam) air yang cukup besar. Tak hanya itu, untuk memfasilitasi si kuda. Di sana juga tersedia toko yang menjual *dedak* makanan kuda.

Sayangnya, di sekitar pasar ada tempat yang kurang baik bagi masyarakat, yakni ada gang madat (candu). Di gang ini para pemadat melampiaskan hawa nafsunya menghisap candu.

Ketika Jepang menduduki Batavia, pasar ini ditutup, dan akibatnya bangunan yang ada tidak berfungsi. Sebagai bangunan kosong maka gelandangan yang ada di Batavia memanfaatkan tempat itu sebagai tempat singgah.

Selepas Indonesia merdeka atau pada tahun 1973, Pasar Tanah Abang baru dipugar, dan itu terjadi pada masa Gubernur Ali Sadikin. Sejak itu, Pasar Tanah Abang sangat megah, terdiri dari empat blok dengan masing-masing blok berlantai empat. Pada masa-masa itu, pasar yang ada sudah bisa dikatakan sangat ramai, tercatat tahun 1975 ada kios sebanyak 4.351 petak dengan jumlah pedagang sebanyak 3.016 orang. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Banyak Cerita dari Tanah Abang

Dari Pasar Tanah Abang banyak cerita. Di pusaran pasar, dinamika masyarakat terjadi. Di Masjid Al Makmur, samping pasar, pergerakan bangsa dilakukan. Ada religiusitas namun di sisi lain ada premanisme.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BILA menyebut kata Tanah Abang maka pikiran orang langsung tertuju pada pasar grosir. Hal demikian tidak salah, sebab pasar besar yang sangat popular itu menyematkan kata Tanah Abang untuk namanya. Pasar tempat *kulakan* itu berada di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Sebagai salah satu kecamatan yang ada di Jakarta, Tanah Abang memiliki luas 9,30 kilometer persegi. Di luas tanah itu, *Wikipedia* menyebut, pada tahun 2021, penduduk Tanah Abang sebanyak 182.665 jiwa dengan kepadatan 18.032 jiwa/kilometer persegi. Di kecamatan ini dihuni oleh beragam etnis, dengan warga aslinya suku Betawi. Etnis lainnya adalah Jawa, Sunda, Banten, Batak, Minangkabau, Tionghoa, dan lain sebagainya.

Data lain menyebut, berdasarkan agama yang dianut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Pusat mencatat, pemeluk agama Islam sebesar 82,26%, Protestan 11,06%, Katolik 5,79%, Hindu 0,61%, dan Buddha 0,28%. Dari persenan pemeluk agama di atas terdapat banyak tempat ibadah, yakni: 98 masjid, 81 musala, 12 Gereja Protestan, 8 Gereja Katolik, 2 vihara, dan 1 pura.

Dari sekian tempat ibadah di atas, ada dua tempat ibadah yang umurnya lebih tua dari Pasar Tanah Abang. Tempat ibadah itu adalah Masjid Al Makmur dan Klenteng Hok Tek Tjen Sien. Kedua tempat ibadah tersebut menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Jakarta dan bangsa Indonesia.

Masjid Al Makmur juga disebut dengan Masjid Tanah Abang, ada pula yang mengatakan Masjid Arab, alamat lengkapnya di Jl. Kyai Haji Mas Mansyur, Kebon Kacang. Persis di sebelah Pasar Tanah Abang Blok B.

Masjid ini dibangun oleh bangsawan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kerajaan Mataram Islam, Muhammad Asyuro, pada tahun 1704. Hadirnya orang-orang Islam di Tanah Abang tidak lepas dari peristiwa penyerangaan Pasukan Sultan Agung ke Batavia yang terjadi pada tahun 1618 dan 1619. Penyerangan ke Batavia membutuhkan tempat untuk mengatur strategi dan penempatan pasukan. Saat berada di Batavia inilah, di antara pasukan dan bangsawan Mataram Islam ada yang sekaligus berdakwah dan menetap di Batavia. Selama berdakwah dan menetap di Batavia, mereka membangun beberapa masjid.

Kali pertama dibangun, luas bangunan Masjid Al Makmur 12×8 meter. Berkat kepedulian Habib Abu Bakar Alhabsyi, pendiri Jamiatul Chaer, bangunan itu pada tahun 1915 diperluas hingga 1.142 mter persegi. Seiring perkembangan zaman dan bertambahnya jamaah, pada tahun 1932, giliran Salim Muhammad bin Thalib memperluas bangunan. Setelah Indonesia Merdeka, tahun 1953, bangunan masjid tercatat hingga 2.175 meter persegi.

Sebagai masjid yang berada di komunitas orang-orang Arab dan Betawi, masjid itu berarsitek gaya Timur Tengah dengan sentuhan yang cukup modern di mana bagian pintu masuk berbentuk lengkung-lengkung dan pucuk menara kubah menyerupai bawang.

Masjid itu tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Berbagai aktivitas seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial terselenggara di sana. Masjid Al Makmur juga menjadi pergerakan organisasi Jamiatul Chaer. Organisasi itu berdiri tahun 1901. Bapak Bangsa, seperti Haji Oemar Said Tjokroaminoto, KH. Ahmad Dahlan, dan Haji Agus Salim aktif di organisasi itu.

Sedang Klenteng Hok Tek Tjen Sien, diceritakan dalam *suara.com*, 17 Januari 2023, sangat sedikit masyarakat yang tahu keberadaan Klenteng Hok Tek Tjeng Sien yang berdiri pada Abad XVII itu. Klenteng ini berada di dekat Blok A Pasar Tanah Abang. Meski berdampingan dengan pasar dan berdiri di tengah pemukiman padat penduduk, namun tempat ibadah ini masih berdiri kokoh.

Dalam *web* itu diceritakan, masuk ke dalam klenteng tidak ada sedikit pun kesan kumuh. Tempat ibadah yang ada tetap terawat meski sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Itu berkat secara rutin dan disiplin para karyawan merawat bangunan bersejarah itu, dengan cara membersihkan klenteng itu setiap hari.

Di dalam klenteng ada kolam ikan berisi ikan mas koki. Jamaah yang datang disediakan tempat cuci tangan dan saat memasuki area ibadah di dalam klenteng, pengunjung harus melepas alas kaki. Layanan ibadah dibuka pukul 06.00 WIB - 17.00 WIB. Disebutkan, pukul 16.00, menjelang tutup, dilakukan bersih-bersih, dan jam 17.00 tutup gerbang.

Diungkap dalam *suara.com*, beda di dalam beda di luar. Saat berada di luar klenteng, halaman luar menjelma bak parkiran motor. Beberapa karyawan toko Tanah Abang terlihat hilir mudik mengangkut kardus dan karung yang berisi pakaian atau bahan tekstil di depan klenteng.

Di Pasar Tanah Abang dan sekitarnya, tidak hanya cerita baik-baik yang muncul. Cerita soal premanisme pun kerap merebak, dialami banyak orang, hingga menjadi masalah hukum. Dalam *www.cnnindonesia.com*, 22 Jun 2021, diceritakan Sa'ih, salah seorang pedagang kaki lima, pernah jadi langganan di Pasar Tanah Abang dipalak. Dirinya diminta oleh orang-orang jalanan uang Rp 2.000-an. Tak hanya itu, mereka kadang juga meminta barang dagangan dengan janji dibayar besok, dan itu hanya muslihat.

Bagi Sa'ih, pungutan liar (pungli) sekecil apapun akan memengaruhi jatah dapur harian. Menghadapi hal yang demikian, dirinya memilih mengalah sebab jika tak memberi uang, ia bakal dilarang melintas di Pasar Tanah Abang.

Bukti dari ungkapan Sa'ih terungkap dalam *metro.sindonews.com*, 24 Februari 2023, "Kerap Lakukan Pungli, 10 Preman Pasar Tanah Abang Ditangkap Polisi." Diberitakan bahwa Polsek Tanah Abang menangkap sebanyak 10 orang preman yang kerap melakukan pungutan liar (pungli).

Dalam *video.okezone.com*, 23 Februari 2023, juga diberitakan hal yang senada, *Razia Premanisme di Pasar Tanah Abang, Kepolisian Lakukan Tindakan Tegas.* Diberitakan, aksi kejar-kejaran hingga nekat melawan petugas mewarnai razia premanisme yang di gelar Polres Metro Jakarta Pusat di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Terlihat dalam video itu, dua pemuda diduga preman berusaha melawan saat dibawa petugas. Tindakan tegas dilakukan petugas untuk meredam perlawanan mereka. Salah seorang preman berambut emas yang kabur berhasil diciduk setelah terlibat aksi kejar-kejaran. Tindakan tegas juga diberikan karena preman tersebut kerap mengamuk dan histeris.

Diungkap dalam berita, razia preman dilakukan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menyusul maraknya aksi pemerasan terhadap para pengendara mobil dengan dalih uang retribusi. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Pasar Senen, Saudara Pasar Tanah Abang

Dibangun pada masa yang sama, Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen berkembang hingga menuju masa keemasan. Di Pasar Senen pada suatu massa tidak hanya sekadar tempat belanja, namun juga tempat nongkrong. Sebab dicap sebagai daerah rawan, kerap terjadi pemalakan, copet, memaksa pembeli, membuat orang enggan bahkan takut ke sana. Tak hanya itu, Pasar Senen juga 'langganan' kebakaran.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PADA tahun 1730-an, seorang pengusaha dengan nama Justinus Vinck mengajukan 'proposal' kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Abraham Patras untuk mendirikan pasar di Batavia. Dalam proposal, Vinck menyatakan bahwa di Batavia perlu dibangun dua pasar guna menampung para pedagang dan untuk memungut pajak jual-beli.

Proposal yang diajukan itu dikabulkan oleh Abraham Patras. Dalam catatan izin yang diberikan, masing-masing pasar harus mempunyai ciri tersendiri agar pemetaaan barang dagangan menjadi jelas.

Catatan yang diberikan oleh Perusahaan Dagang Hindia Timur itu diterima oleh Vinck sehingga saat merancang dua pasar, masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri, yakni: Satu pasar khusus perdagangan tekstil dan barang kelontong, sedang pasar yang lainnya khusus sayuran dan sembako.

Setelah dapat izin, Vinck membangun pasar, satu berlokasi di tempat sekarang yang bernama Tanah Abang, dengan Pasar Sabtu-nya; dan, satunya lagi berlokasi di Weltervreden. Menurut *Wikipedia*, Weltevreden suatu kawasan yang berjarak kurang lebih 10 kilometer dari Batavia lama ke arah selatan. Letaknya kini di sekitar Sawah Besar, Jakarta Pusat, yang membentang dari RSPAD Gatot Subroto hingga Museum Gajah. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Weltevreden merujuk kepada hampir seluruh daerah Jakarta Pusat sekarang.

Saat ini salah satu kawasan yang masuk Weltervreden adalah Kecamatan Senen. Di tempat inilah Vinck membangun pasar di atas lahan milik Corrnelis Chastelein. Chastelein sendiri merupakan pejabat Hindia-Belanda.

Menurut catatan yang ada, pasar yang kali pertama beroperasi pada 30 Agustus 1735 itu buka hanya pada Hari Senen. Dari sinilah selanjutnya disebut sebagai Pasar Senen. Lama kelamaan, seperti pada Pasar Sabtu yang berubah nama menjadi Pasar Tanah Abang, nama Pasar Senen pun berubah menjadi Vinck Passer (Pasar Vinck). Disebut demikian untuk mengenang pendiri Pasar Senen (Justinus Vinck), meski nama itu sekarang tidak disematkan lagi.

Sumber lain menyebutkan, Pasar Senen didominasi oleh pedagang Tionghoa, sehingga banyak yang menyebut pasar itu sebagai Pasar Snees. *Snees* merupakan julukan Belanda kepada warga Tionghoa. Pedagang Tionghoa mendominasi Pasar Senen, sebab letak pasar itu pada masanya berada di tengah *China Town*.

Dalam perjalanan waktu, Pasar Senen semakin ramai. Antusias masyarakat, baik pedagang dan pembeli, terhadap pasar membuat layanan buka pasar tidak hanya pada Senen, namun juga di hari-hari yang lain. Keramaian bertambah di pasar bisa jadi karena Pasar Tanah Abang belum buka setelah ada peristiwa *Geger Pecinan*.

Keramaian pada pasar juga bisa terjadi dikarenakan tak jauh dari lokasi ada Kampus STOVIA. Di mana di tempat itu mahasiswa dari berbagai daerah di nusantara menuntut ilmu kedokteran dan pastinya tempat kos

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang ada juga di sekitar kampus yang masuk wilayah Senen.

Hari berganti hari, tahun berganti tahun, abad berganti abad, geliat Pasar Senen semakin tidak mengenal waktu. Di awal tahun 1950-an, pasar yang ada tidak hanya mempertemukan para pedagang dan pembeli, namun juga dijadikan tempat nongkrong. Di antara mereka yang suka nongkrong itu adalah para artis dan seniman. Artis dan seniman yang suka nongkrong di sana, seperti Rosidi, Sukarno M. Noor, Wim Umboh, dan HB. Yasin. Pada zamannya mereka adalah artis dan seniman *top*. Mereka biasa nongkrong mulai pukul 20.00 WIB hingga menjelang Subuh. Hal demikianlah yang membuat nadi aktivitas pasar berdenyut selama 24 jam.

Mereka yang nongkrong di sana kuat sampai pagi, sebab mulai tengah malam hingga pagi, banyak pedagang menjajakan kue. Kue yang dijual berbagai macam sehingga disebut bursa kue. Pemasok kue itu tidak hanya dari wilayah Jabodetabek, namun hingga dari Cianjur dan Sukabumi. Tradisi itu sampai sekarang tetap bertahan bahkan sampai disebut pasar kue subuh.

Dalam *Wikipedia* disebut, memasuki era 1970 hingga 1990-an, kawasan Pasar Senen semakin membesar dan tumbuh sebagai pusat ekonomi dan hiburan. Di kawasan yang ada, saat awal-awal bioskop hadir di Indonesia, dibangun gedung bioskop Rex dan Grand. Hadirnya dua bioskop itu menambah gegap gempita Pasar Senen.

Berkembangnya Pasar Senen tak lepas dari usaha Gubernur Ali Sadikin yang mengembangkan kawasan itu dengan Proyek Senen-nya.

Dalam sistem ekonomi, rupanya roda berputar, pasar itu pernah mengalami perkembangan yang pesat, namun terungkap dalam web di atas, sejak peristiwa kerusuhan massal tahun 1998, pamor Pasar Senen mulai meredup, ditambah dengan hadirnya Plaza Atrium yang mampu menarik pengunjung tak hanya berbelanja, namun juga jalan-jalan di sana daripada ke Pasar Senen.

Karena faktor di atas, ditambah dengan faktor yang lain, sepertinya hadirnya banyak mal di berbagai tempat, seperti Blok M, kawasan Pasar Senen mulai ditinggalkan orang. Banyak kios besar diganti oleh para pedagang kaki lima yang buka lapak hingga tepi jalan.

Tak hanya itu, diungkap awal tahun 2000-an Pasar Senen terkenal sebagai salah satu daerah rawan, seperti adanya premanisme, pemalakan, copet, memaksa pembeli, sehingga hal demikian membuat pengunjung enggan ke sana, bahkan tidak mau belanja di Pasar Senen.

Entah kenapa sejak buka tahun 1735, Pasar Senen menjadi 'langganan' kebakaran. Kerap di sana jago merah beraksi. Dari catatan yang ada, pada tahun 1974, kali pertama pasar itu mengalami kebakaran. Kebakaran terjadi dikaitkan dengan adanya Peristiwa Malari. Kebakaran terulang pada 23 November 1996 di Blok IV dan V. Tahun 2003 kebakaran terjadi di blok yang sama. Terulang pada 2010. Pada tahun 2014 giliran Blok III terbakar. Sedang pada tahun 2016, di Pusat Grosir Senen Jaya dan pada 2017 di Blok I dan II.

Meski mempunyai catatan seperti di atas, sebagai tempat yang rawan dan 'langganan' kebakaran, namun dalam *store.sirclo.com*, 11 Desember 2022, menyebut Pasar Senen merupakan tempat asyik untuk: *Berburu barang preloved* (barang bekas), *Sightseeing* (penggemar jalan-jalan sambil melihat-lihat suasana kota), *Wisata Kuliner* (di sana banyak yang menjajakan jajanan tradisional, kue pasar, hingga nasi kapau khas Minang, *Surganya Pecinta Buku* (tak jauh dari Pasar Senen terdapat deretan toko buku yang menjual buku cetakan baru hingga bekas), dan *Wisata Sejarah,* dengan berjalan kaki bisa mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Iwan Abdul Latif
Presiden Bentor Gorontalo

Rakyat perlu edukasi soal Pemilu

PELAKSANAAN Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan Februari Tahun 2024 sudah semakin dekat. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pemilu dengan baik. Hal ini sangat berpotensi ketidaktahuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat.

Untuk itu, saya kira masyarakat jangan dibodohi lagi. Masyarakat harus mendapatkan edukasi tentang pemilu, agar dapat mengetahui hak dan kewajiban, serta keuntungan buat mereka di masa depan. Edukasi yang benar ini akan membuat masyarakat menjadi paham bahwa pemilu sangat menentukan masa depan mereka nantinya.

Saya berterima kasih dan mengapresiasi banyak tokoh nasional yang mau turun langsung menyambangi kami, dan mengingatkan kami para pengojek bentor tentang pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Fadel Muhammad, salah satu Pimpinan MPR RI.

Saya harap makin banyak tokoh nasional yang terjun langsung menyapa rakyat kecil untuk diajak berdikusi dan memberikan pemahaman tentang kemana arah bangsa ini dalam menuju kesejahteraan bersama. ❑

DER

Rustandi
Ketua RW Kampung Pasar Batu Cianjur

Perbanyak Pengobatan Gratis untuk Rakyat

PASCA Pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang terpuruk dari sisi ekonomi. Sehingga banyak dari mereka yang hidup sangat pas-pasan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pun mereka tak mampu.

Yang paling diresahkan oleh warga masyarakat adalah kalau jatuh sakit. Sebab, akan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Sekarang ini rakyat terbantu dengan banyaknya partai politik dan caleg-caleg yang memiliki program pengobatan gratis untuk rakyat.

Seperti yang ada di kampung kami ini, ada caleg yang juga seorang dokter muda datang dan menggelar pengobatan gratis. Ini sangat membantu masyarakat. Kami berharap, akan lebih banyak dan lebih luas lagi jangkauan kegiatan pengobatan gratis ini. Dan, mudah-mudahan akan terus berlangsung hingga saat caleg itu terpilih nanti. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Muhammad Maulana

Senyum Para Penyintas Adalah Kebahagian Bagi Saya

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KAMARAU panjang menyebabkan kekeringan dan kebakaran di mana-mana. Bukan hanya hutan dan lahan, tetapi juga rumah dan pemukiman tak luput dari amukan si jago merah. Kemarau juga menyebabkan banyak situ, sungai, danau, dan waduk mengering, membuat jumlah penduduk menjerit karena kekurangan air terus bertambah.

Beruntung pada saat alam menampakkan keangkuhannya masih ada orang-orang baik yang berhati malaikat. Mereka ini rela membantu meringankan kesulitan yang dihadapi sesama, meski apa yang mereka lakukan itu tak luput dari ancaman serta marabahaya. Salah satu manusia baik, berhati malaikat itu, adalah Muhamad Maulana (25), atau akrab disapa Maul. Muhammad Maulana termasuk salah satu relawan Dompet Duafa (DD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Selama kemarau dan kekeringan, Maul bersama DD Kalteng berulangkali membantu melakukan pemadaman kebakaran dan membagikan air bersih. Pada bulan Agustus silam, selama satu bulan penuh, ia terlibat dalam pemadam api di Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Katingan hingga Palangkaraya. Dan, ketika masyarakat mengalami krisis air minum, Maul membantu meringankan beban warga yang terdampak dengan membagikan air mencapai 45.000 liter.

"Saya turun pertama kali pada awal Agustus, membantu memadamkan api di lahan gambut Desa Eka Behurui, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Suasananya sangat mencekam, karena saat kami datang, kebakaran sudah berlangsung lama. Padahal, kebakaran di lahan gambut itu tidak mudah di padamkan," cerita Maul kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Tidak bisa berlama-lama, begitu tiba dilokasi kebakaran, Maul langsung terjun ke garis terdepan berhadapan langsung dengan lahan yang terbakar. Bersama petugas dan relawan kebakaran yang lain, lajang kelahiran Kasongan, 14 Juni 1998, bahu-membahu memadamkan api. Panas yang ditimbulkan dari bara api dan asap yang terus mengepul tidak membuatnya melangkah mundur. Sebaliknya ia terus berjuang agar api bisa dijinakkan.

Saat itu api sudah menghanguskan ratusan hektar lahan gambut. Itu bisa terjadi karena ketersediaan air sangat terbatas. Kerap kali, api terlihat padam, tapi ternyata di bawahnya masih terdapat bara, dan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

sewaktu-waktu bisa menimbulkan api sangat besar.

Maul sesungguhnya menyadari bahwa api bisa membuatnya celaka. Karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan harus diutamakan. Tetapi, tak jarang ada saja masalah yang muncul. Dan, itu membuatnya berada dalam bahaya. Ancaman itu salah satunya terjadi pada saat Maul dan rekannya mengalami mis-komunikasi.

Ceritanya, saat itu Maul sudah terkepung api. Pandangan terganggu, pernafasanpun demikian. Kala itu, Maul berniat untuk mundur keluar dari kepungan api, dengan cara menerobos kobaran. Namun, ketika langkahnya mulai terayun, air yang ada dalam slangnya malah berhenti, praktis dalam ancaman, dan nyaris tidak bisa menerobos kebakaran.

"Kami tidak memakai alat komunikasi sehingga memang sangat sulit untuk berbicara dengan penjaga pompa air yang jaraknya relatif jauh. Akibatnya, ketika saya butuh air untuk meninggalkan kobaran, pompa air malah dimatikan. Beruntung teman yang menjaga pompa segera mengetahui kesalahannya, dan menghidupkan pompanya lagi. Selamatlah saya setelah berhasil keluar dari kepungan kobaran api," ungkap Maul.

Dukungan Keluarga

Sebagai relawan yang selalu berada di barisan depan menghadapi bencana, anak pertama tiga bersaudara pasangan Efendy dan Siti Sumarni ini dituntut menguasai berbagai keahlian penanggulangan kebencanaan. Apalagi, bencana yang dihadapi memang beragam. Selain kebakaran, ia juga kerap diterjunkan di kawasan yang dilanda banjir, hingga penyakit seperti saat terjadi pandemi Covid-19. Untuk itu, di sela kesibukannya membantu korban bencana, Maul juga sering mengikuti berbagai pelatihan dan keterampilan.

Dalam urusan bencana banjir, Maul sempat turun di beberapa titik lokasi yang terimbas oleh bajir. Ia juga sering terlibat dalam pengobatan gratis hingga aksi sosial lainnya. Beruntung, aktivitasnya itu mendapat dukungan penuh dari keluarga. Terkadang, orang tuanya bahkan menawarkan diri untuk memberi bantuan. Seperti saat harus mengebor sumur untuk mamadamkan kobaran api.

"Syukur alhamdulillah, keluarga saya seluruhnya mendukung. Bapak saya bahkan bangga melihat saya bisa membantu meringankan penderitaan orang lain. Beliau sangat antusias, bahkan sering menawarkan bantuan, seperti mau membantu mengebor sumur untuk mendapatkan sumber air buat pemadaman api," ungkapnya.

Bagi alumni SMK Negeri I Katingan Hilir ini dukungan keluarga membuatnya semakin bersemangat untuk terus mengabdikan dirinya bagi aksi-aksi sosial lain bersama Dompet Duafa. Ia tidak pernah berfikir untuk pensiun, selama tenaganya dibutuhkan. Apalagi, jika ia mengingat banyak korban yang tampak senang setelah mendapat bantuan. Sekalipun ada di antara sanak saudara maupun harta benda yang menjadi korban.

"Saya ingin menolong orang lain, saya juga ingin menjadi relawan yang berkualitas. Semua saya laksanakan dengan rasa bahagia, tidak memiliki pamrih apapun. Kalau sudah menolong sesama, saya selalu merasa bangga meski sekedar melihat senyuman dan bahagia para penyintas," katanya. ❑

MBO

Menunggu Peran Indonesia dalam Konflik Palestina – Israel

Di tengah belum usainya perang Rusia - Ukraina, dunia dikejutkan serangan tiba-tiba Pasukan Hamas Palestina ke wilayah Israel pada pekan pertama Oktober 2023. Pasti Israel tidak terima dengan aksi yang dilakukan Hamas. Akibatnya, perang semakin berkobar dan menimbulkan banyak korban sipil. Dunia pun bereaksi. Lalu, bagaimana sikap Indonesia seharusnya dalam menanggapi konflik itu? Berikut pendapat wakil rakyat yang membidangi masalah hubungan internasional.

Abdul Kharis Almasyhari, Anggota MPR Fraksi PKS

Indonesia Harus Mendorong Terbentuknya Palestina Merdeka

MENGUTUK keras pembantaian Zionis Israel terhadap Rakyat Palestina yang sudah ribuan nyawa gugur, sebagian besar bayi dan anak-anak di Gaza Palestina. Sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR mengutuk keras tindakan biadab Zionis Israel yang jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusian, menjadikan rakyat Gaza tanpa air dan makanan, tanpa listrik, ini merupakan kejahatan perang lantaran menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Diungkap dalam rilis yang beredar pada 10/23.

Segala tindakan perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Palestina adalah upaya melawan dan membela diri atas agresi Israel yang brutal dan keji. Saya meminta Menteri Luar Negeri Indonesia — di mana kemarin kita sudah ditetapkan menjadi anggota Dewan HAM PBB — untuk mendorong resolusi tegas PBB untuk menghentikan segala pelanggaran HAM yang sedang berlangsung terhadap Palestina, yaitu pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak, penggunaan bom fosfor menjadikan kelaparan sebagai senjata perang dan banyak kekejian lainnya secara tegas dan aktif menghentikan semua pelanggaran HAM, khususnya di Palestina.

Saya mendorong Kemenlu RI menggalang bersama seluruh negara dunia untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan mempertimbangkan pertama-tama dan terutama pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Rusia, Tiongkok, Turki, Indonesia, dan semua Negara Arab, Afrika, dan Amerika Latin mendorong terbentuknya Palestina Merdeka, dan ini waktu yang tepat menyelesaikan semua pembantaian Zionis terhadap Rakyat Palestina dengan satu solusi Palestina merdeka dan berdaulat.

Meminta agar umat Islam di Indonesia selalu mendoakan rakyat Palestina dan tidak terprovokasi serta tetap mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin, serta mendorong pemerintah untuk bersikap tegas dan tidak menolerir segala upaya provokasi dan kebencian terhadap Islam di dalam sikap politik luar negeri Indonesia.

Di samping amanah, konstitusi memperjuangkan perdamaian dunia perlu langkah bersama menggalang solidaritas, dan sebagai rakyat Indonesia kita harus membantu rakyat Palestina dengan doa, dana, serta segala hal yang kita bisa dengan terus mengampanyekan Islam yang rahmatan lil alamin dan melawan segala sikap Islamophobia, serta aksinya di lapangan. ❑

AWG

Meutya Hafid, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Indonesia Harus Konsisten Mendukung Palestina Merdeka

MEMINTA semua pihak berkonflik dalam perang Palestina dan Israel mulai memikirkan jalur dialog dan solusi jangka pendek maupun panjang. Komisi I DPR meminta semua pihak yang berkonflik untuk menghentikan segala bentuk provokasi dan mulai memikirkan jalur dialog, dan solusi jangka pendek serta jangka panjang. Ungkapan demikian disampaikan kepada media pada 10/23.

Solusi jangka pendek, misalnya, dengan menghentikan segala bentuk kekerasan, baik oleh pihak Israel maupun Hamas. Serta dukungan seluruh Negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Iran, Lebanon, dalam mewujudkan perdamaian yang berbentuk solusi jangka panjang *two-state solution,* di mana terbentuknya negara Palestina merdeka yang berdasarkan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Konflik antara Israel dan Palestina tidak lepas dari akar konflik yang terjadi sejak tahun 1948, yakni direbutnya wilayah Palestina oleh Israel. Ditambah dengan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi oleh Israel terhadap rakyat Palestina selama bertahun-tahun. Untuk itu, Komisi I meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan lebih aktif dalam memulai proses dialog dan berusaha menyelesaikan akar konflik utama antara Israel dan Palestina.

Tidak terlihatnya PBB dalam upaya penyelesaian konflik Palestina menjadi kritik tajam terhadap eksistensi lembaga ini. PBB pun harus menolak segala solusi yang diputuskan secara unilateral. Komisi I mengingatkan agar sikap pemerintah Indonesia terus konsisten berpegang teguh pada amanat konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan di muka bumi, dan terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Meminta kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk sesegera mungkin melakukan evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Gaza, serta semaksimal mungkin menjaga keamanan WNI yang berada di kawasan konflik, baik di Gaza maupun Tepi Barat. Sesuai dengan tujuan Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. ❑

AWG

Terima Pelaku UMKM Purbalingga

Bamsoet Dorong Pengembangan Industri Knalpot Tanah Air

Industri knalpot di Purbalingga bukan hanya telah menjadi ikon ekonomi, melainkan juga ikon daerah. Tidak heran jika Kabupaten Purbalingga dijuluki sebagai Kota Knalpot.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, menuturkan IMI bersama para pelaku UMKM Knalpot dari satu daerah pemilihan Bamsoet, yakni Kabupaten Purbalingga akan bekerjasama memajukan usaha knalpot di tanah air. Khususnya dalam memenuhi kebutuhan knalpot untuk kendaraan balap yang selama ini masih bergantung dari impor. Padahal, walaupun impor knalpot untuk kebutuhan balap tersebut bahan awalnya juga dari Indonesia, khususnya dari Purbalingga.

Walaupun saat ini dunia, termasuk Indonesia, sedang beralih ke kendaraan listrik yang notabene tidak membutuhkan knalpot, namun proyeksi 10 tahun ke depan industri knalpot di tanah air tetap akan mendapatkan posisi strategis. Geliat industri modifikasi, terlebih dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 45/2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, masih memberikan harapan besar bagi para pelaku usaha knalpot.

"Kerjasama IMI dengan para pelaku UMKM knalpot Purbalingga tersebut juga akan meliputi pembinaan, pemberdayaan, hingga sharing pengetahuan. Sehingga para pelaku UMKM Knalpot di Purbalingga bisa mengetahui ketentuan yang terdapat dalam Permen tersebut. Selain itu, IMI juga akan memfasilitasi para pelaku UMKM knalpot Purbalingga agar bisa ikut serta di berbagai pameran maupun eksibisi otomotif. Sehingga bisa semakin mempromosikan UMKM knalpot Purbalingga ke berbagai kalangan," ujar Bamsoet usai menerima pelaku UMKM Knalpot Purbalingga, di Jakarta, Sabtu (28/10/23).

Hadir, antara lain Ketua Dewan Penasihat Kadin Purbalingga Widjy Laksono, Ketua9 Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Knalpot Purbalingga Agus Adi Atmadja, dan Dirut PT. Borsitech Cipta Mekanika Indra Sukinata.

Ketua DPR RI yang ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, ini menjelaskan, kualitas knalpot asal Purbalingga bukan hanya telah memenuhi standar nasional, melainkan juga internasional. Terbukti, dengan telah digunakannya berbagai knalpot Purbalingga di beragam produk otomotif ternama, seperti BMW, Mercedess-Benz, Toyota dan Honda.

"Tidak hanya untuk motor dan mobil, knalpot asal Purbalingga juga telah digunakan untuk panser dan tank. Sejak tahun 2008, PT. Pindad telah memesan knalpot produksi para perajin dari Purbalingga untuk digunakan pada kendaraan tempur pesanan Malaysia dan Lebanon. Menunjukkan bahwa knalpot buatan produsen Purbalingga tidak kalah

bersaing dengan produsen knalpot dari Prancis," jelas Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen serta Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, sejarah industri knalpot di Purbalingga dimulai di Dusun Pesayangan pada 1950-an. Dusun ini mulanya dikenal sebagai pusat kerajinan logam, seperti perkakas dapur dan gamelan. Kemudian pada 1977, salah satu pengrajin logam di Purbalingga mulai membuat knalpot dan permintaannya terus meningkat.

Industri knalpot di Purbalingga bukan hanya telah menjadi ikon ekonomi melainkan juga ikon daerah. Tidak heran jika Kabupaten Purbalingga dijuluki sebagai Kota Knalpot.

"UMKM Knalpot terus mengalami perkembangan yang pesat dan mampu menyokong perekonomian daerah. Kementerian Perindustrian melaporkan, nilai produksi knalpot di Purbalingga meningkat hampir empat kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Dari Rp 37 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp 138,7 miliar pada 2020. Begitu pula dengan nilai investasinya melesat tiga kali lipat, dari Rp 1,6 miliar pada 2010 menjadi Rp 5,2 miliar pada 2020. Kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat tidak perlu diragukan," pungkas Bamsoet. ❑

Kunjungan ACWO Forum

Lestari Moerdijat: Empat Pilar MPR RI Jamin Peningkatkan Partisipasi Perempuan di Ruang Publik

Partisipasi perempuan dalam institusi sosial dapat dimulai dari elemen terkecil seperti keluarga dan komunitas. Dari institusi itu perempuan diharapkan mampu memberi kebaruan dalam penentuan arah dan kebijakan untuk memenuhi hak dasar setiap warga negara.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PEREMPUAN harus mampu mengambil peran di berbagai bidang, karena sejatinya perempuan itu adalah tiang negara," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema: 'Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di Kawasan Asia Tenggara' di depan para anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di sela kunjungan peserta ASEAN Confederation of Woman's Organization (ACWO) Forum di Gedung Nusantara IV, Komplek DPR/MPR Jakarta, Rabu (25/10).

Menurut Lestari, dengan perempuan yang sehat dan tangguh akan mampu mewujudkan keluarga sejahtera yang pada akhirnya membentuk negara yang kuat. Apalagi, ungkap Lestari, sejarah mencatat bahwa dalam bidang politik, perempuan di kawasan ASEAN memiliki rekam kepemimpinan eksekutif yang menggerakkan perubahan, misalnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-5 Indonesia, Corazon Aquino pernah menjabat sebagai Presiden ke-11 dan Gloria Macapagal-Arroyo sebagai Presiden ke-14 Filipina.

Selain itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, di bidang ekonomi perempuan ASEAN juga berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat di era berkembangnya teknologi informasi saat ini.

Dalam sejarah Indonesia, tegas Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, perempuan berperan penting dalam upaya menciptakan perdamaian, mempertahankan keamanan melalui bidang-bidang yang digeluti.

Eksistensi para Sultan di Aceh dan para Ratu di Jawa di masa kerajaan Nusantara, tambah Rerie, meneguhkan bahwa perempuan mampu memberi kebaruan dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta pertahanan dan keamanan.

Dalam lingkup kawasan, ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, bahkan pada 2017, Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN diterbitkan untuk menegaskan kembali komitmen bersama terhadap agenda Women, Peace and Security (WPS)

Meski perempuan berperan signifikan,

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Rerie berpendapat, dalam beberapa bidang utama kehidupan sosial kemasyarakatan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perempuan saat ini terkait polemik afirmasi dan partisipasi politik serta kesetaraan, konflik pemilihan umum, perlindungan bagi pembela HAM perempuan, serta perlindungan bagi perempuan adat.

Menyelisik situasi dalam negeri, tambah dia, perempuan sebagai tiang keluarga mesti menempatkan setiap tantangan dan keseluruhan konteks peristiwa dalam bingkai konsensus kebangsaan.

Konsensus Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, tegas Rerie, menjamin pemenuhan hak-hak dasar manusia dengan kewajiban yang melekat dalam nafas kesetaraan dan perlindungan secara menyeluruh.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi kehidupan berbangsa, tambah dia, mengedepankan intisari gotong-royong dalam rangka perwujudan kapabilitas manusia berbasis spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, dialog dan keadilan. ❑

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Lestari Moerdijat: Bangkitkan Potensi Generasi Muda

Semangat Sumpah Pemuda momentum bagi generasi penerus bangsa untuk menggalang persatuan dalam proses pembangunan menuju Indonesia yang lebih baik.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI TENGAH semakin beragamnya tantangan yang kita hadapi saat ini dibutuhkan banyak kreativitas dan energi untuk menjawab tantangan itu. Potensi para pemuda untuk berperan aktif dalam proses pembangunan sangat besar," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/10), dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 pada 28 Oktober.

Menurut Lestari, peringatan tahun ini yang mengusung tema: 'Bersama Majukan Bangsa' memberi makna agar para pemuda generasi penerus bangsa mampu mewujudkan persatuan dalam upaya membangun bangsa ini menjadi lebih baik.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mengakui, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, terdapat sekitar 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat (24,00%) penduduk Indonesia berada di kelompok umur antara 16-30 tahun yang dikategorikan sebagai pemuda.

Jumlah pemuda yang cukup signifikan itu, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI, itu harus mampu menjadi energi dari pembangunan yang dapat membuat Indonesia bertransformasi menjadi negara maju dan sejahtera.

Menurut Rerie, berbagai upaya dalam bentuk kebijakan, sistem pendidikan dan sejumlah langkah yang mendorong para pemuda agar mampu mengembangkan kreativitas dan kemampuannya harus terus diwujudkan, agar bangsa Indonesia mampu menjawab berbagai tantangan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem sangat berharap para pemangku kepentingan mampu mempersiapkan generasi penerus mengeluarkan potensi yang mereka miliki dan terlibat aktif dalam proses pembangunan negeri menuju arah yang lebih baik.

Selain itu, tegas Rerie, penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada para pemuda juga harus dilakukan sejak dini, agar kemampuan dan kreativitas yang dimiliki generasi muda bisa bermanfaat untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan tangguh menghadapi tantangan di masa depan. ❑

Bulan Kesadaran Kanker Payudara

Lestari Moerdijat: Butuh Political Will untuk Atasi Kendala Pengobatan

Kebijakan kesehatan nasional belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi para penderita kanker payudara di Indonesia. Sejumlah upaya harus segera dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu.

BERBAGAI upaya sosialisasi sudah cukup gencar dilakukan, tetapi ternyata kendala yang dihadapi penderita kanker payudara untuk mengakses layanan kesehatan masih saja terjadi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema: 'Pekerjaan Rumah dalam Memperingati Bulan Kesadaran Kanker Payudara digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/10).

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu, menghadirkan dr. Lily Kresnowati, M.Kes., (Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan), Iene Muliati, S.Si., MM., FSAI., GRCP., GRCA., IPMP., (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional), dr. Theresia Sandara, MHP., (Ketua Tim Kerja Pengendalian Kanker Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit /P2P Kementerian Kesehatan RI), dan Aryanthi Baramuli Putri, S.H., M.H., (Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association /CISC) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Ratu Ngadu Bonu Wulla (Anggota Komisi IX DPR RI) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, kendala yang masih dihadapi para penderita kanker payudara, antara lain sulitnya mengakses pengobatan yang standar mau pun lanjutan. Demikian juga, tambah Lestari yang juga penyintas kanker payudara itu, pengobatan paleatif dan ketersediaan obat untuk kanker HER 2 positif yang belum banyak tersedia, sehingga penderita harus terus berjuang untuk mendapatkan terapi yang tepat.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, pekerjaan rumah dalam meningkatkan pelayanan pada penderita kanker payudara masih banyak, sementara kasus kanker payudara terus bertambah. Legislator dari

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dapil II Jawa Tengah, itu mendorong agar masa tunggu pasien saat terdiagnosa kanker hingga mendapat tindakan, semakin pendek.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, perlu political will yang kuat dari para pemangku kebijakan untuk mengatasi sejumlah kekurangan pada pelayanan kesehatan, dalam upaya menekan angka penderita kanker payudara di tanah air.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati, mengungkapkan, per September 2023 jumlah keanggotaan BPJS Kesehatan tercatat 262 juta orang atau 94,64% jumlah penduduk. Cakupan kepesertaan itu, ujar Lily, tersebar di 27 provinsi dan 371 kabupaten/kota. Diakui dia, total pemanfaatan BPJS Kesehatan meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Lily, proporsi biaya penyakit berdampak katastropik, seperti kanker payudara, pada 2022 meningkat berkisar 21,5%-28, 4% dari total pelayanan kesehatan rujukan. Diakui Lily, BPJS Kesehatan juga bisa dimanfaatkan untuk skrining kanker, seperti kanker serviks dan kanker payudara yang bisa dilakukan satu tahun sekali.

Lily mengungkapkan, berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2018, proses pelayanan kesehatan yang dibiayai BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan medis dan kompetensi

fasilitas kesehatan, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdaftar, kecuali

dalam keadaan kegawat daruratan medis.

Selain itu, tambah Lily, PerMenkes No. 54Tahun 2018 juga mengatur pemberian obat kanker dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 3 atau fasilitas kesehatan tingkat 2 yang memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kemoterapi, seperti memiliki tim onkologi, perawat onkologi, dan apoteker yang telah dilatih khusus untuk memberikan kemoterapi.

Lebih dari itu, ujar dia, fasilitas kesehatan itu juga harus memiliki prosedur yang teratur untuk penyimpanan, pengelolaan, peracikan, pemberian dan pengelolaan limbah kemoterapi serta memiliki ruang isolasi untuk pemberian kemoterapi agresif.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Iene Muliati, berpendapat, penyakit kanker yang menakutkan itu menyebabkan

masyarakat menghindar untuk melakukan deteksi dini.

Menurut Iene, ada sejumlah tantangan dalam pengobatan kanker payudara, antara lain terkait keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kapasitas yang memadai untuk pengobatan kanker payudara.

Selain itu, jelas Iene, sosialisasi dan edukasi terkait kanker payudara,yang dilakukan saat ini juga belum maksimal. Kalau pun ada sosialisasi hanya terbatas pada komunitas yang terbatas.

Padahal, tegas Iene, kesehatan ibu dan bebas dari kanker payudara sangat fundamental untuk diwujudkan, mengingat ibu sangat berperan penting dalam perkembangan sebuah negara.

Iene menyarankan agar advokasi dan sosialisasi tentang kanker payudara juga ditujukan kepada para pemangku kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar efektif dalam menekan angka kasus kanker payudara di tanah air.

Ketua Tim Kerja Pengendalian Kanker Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, Theresia Sandara, mengungkapkan, pemerintah mencatat kasus baru kanker payudara di Indonesia tercatat 2,2 juta per tahun. Sementara tingkat kematian akibat kanker payudara di dunia rata-rata tercatat 46 kasus per 100.000 penduduk, dan di Indonesia rata-rata tercatat 44 kasus per 100.000 penduduk.

Berdasarkan catatan itu, Theresia berpendapat, kanker payudara masih jadi persoalan di Indonesia, karena 70% teridentifikasi pada stadium lanjut. Padahal, tegas dia, bila ditemukan pada stadium awal kanker payudara dapat diatasi dengan baik.

Selain itu, ungkap Theresia, cakupan skrining terkait kanker payudara terbilang rendah, yaitu 10,75% dari populasi perempuan. Kondisi itu diperparah dengan waktu tunggu sejak didiagnosa terkena kanker sampai mendapatkan tindakan definitif relatif lama, yaitu 9-15 hari.

Menurut Theresia, upaya promosi kesehatan dan edukasi sangat penting agar masyarakat mau melakukan deteksi dini kanker payudara. Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelibatan organisasi kemasyarakatan serta pihak swasta dalam proses sosialisasi dan edukasi, tegas dia, sangat penting untuk memperluas upaya deteksi dini kanker payudara.

Karena, jelas Theresia, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan tahapan deteksi dini dimulai dari periksa payudara sendiri (SADARI), pemeriksaan payudara secara klinis (SADANIS), pemeriksaan USG hingga pemeriksaan mamografi.

Ketua Umum CISC, Aryanthi Baramuli Putri, mengungkapkan, hambatan yang dihadapi dalam upaya menekan angka kasus kanker payudara, antara lain karena kurangnya informasi dan edukasi, terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan yang kompeten, termasuk laboratorium.

Akibatnya, ujar Aryanthi, waktu tunggu sejak terdiagnosa kanker hingga mendapat tindakan cukup lama. Belum lagi, tambah dia, pemanfaatan obat yang tepat bagi penderita kanker payudara sub type HER2 Positif yang terkendala dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Aryanthi, dibutuhkan kebijakan yang tepat dan mampu menjawab kebutuhan para penderita kanker payudara, selain ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla, berpendapat, semua pihak harus mampu bekerjasama untuk memasyarakatkan deteksi dini kanker payudara melalui SADARI, SADANIS, pemeriksaan USG dan mamografi.

Ratu Ngadu juga berharap, untuk daerah-daerah yang kesulitan mengakses layanan deteksi dini dapat diupaya untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat agar tidak ada lagi daerah yang tidak terlayani. ❑

Wisuda XXVII STMIK Pranata Indonesia

Sjarifuddin Hasan: Jadilah Pelopor Pembangunan untuk Songsong Indonesia Emas 2045

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, berharap agar para wisudawan STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk membuat mimpi-mimpi yang indah. Mimpi Indah bisa dicapai dengan ketrampilan.

BERTEMPAT di salah satu aula hotel di Kota Bekasi, Jawa Barat,18 Oktober 2023, STMIK Pranata Indonesia dan STBA Cipto Hadi Pranoto menggelar wisuda bersama. Wisuda XXVII yang digelar mulai pukul 08.00 WIB itu dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., yang oleh pihak panitia wisuda didaulat menyampaikan orasi ilmiah.

Dalam orasinya, Sjarifuddin Hasan yang biasa disapa Syarief Hasan, mengucapkan selamat kepada 163 wisudawan yang berasal dari berbagai jurusan dan jenjang studi. “Selamat atas prestasi para wisudawan. Ini merupakan awal dari perjuangan Anda untuk menatap masa depan yang lebih baik,” ujar Politisi Partai Demokrat itu. “Ingat masa depan Indonesia terletak di pundak saudara-saudara sekalian,” tambahnya.

Menteri Koperasi dan UMKM di masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, selepas wisuda

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ini jumlah tenaga profesional di Indonesia bertambah. Hal demikian akan menjadi bekal bangsa ini untuk menyongsong tahun 2045.

Pada tahun itu, usia bangsa Indonesia disebut dengan usia emas sehingga disebut Indonesia Emas 2045. Dalam era itu, Indonesia juga masuk dalam masa yang disebut dengan bonus demografi. "Di Tahun 2045, Indonesia akan menjadi salah satu negara maju di dunia," ungkapnya.

Menyongsong tahun 2045, menantang para wisudawan dengan pertanyaan: "Sanggup saudara-saudara untuk memikul beban dan tanggung jawab menyongsong masa depan?" Secara serentak dijawab oleh para wisudawan: "Sanggup".

Pria asal Sulawesi itu gembira mendengar kesiapan generasi muda menyongsong masa depan. Di mengakui, memang generasi muda merupakan generasi yang diandalkan untuk menyongsong masa yang akan datang, sebab jumlah usia produktif mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia.

Syarief Hasan lalu membandingkan dengan Jepang. Negara itu masa depannya terancam, sebab seiring perjalanan waktu mereka mengalami krisis produktifitas. "Usia produktifitas Jepang semakin menurun," ungkapnya. Kondisi yang demikian membuat kemajuan negara yang dijuluki negeri matahari terbit itu akan tergantikan oleh negara lain, termasuk oleh bangsa Indonesia.

Anggota DPR dari Dapil Kota Bogor – Cianjur itu lebih lanjut berharap agar para wisudawan bisa menciptakan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan, mereka bisa membuat mimpi-mimpi yang indah dan mimpi yang indah itu akan diraih dengan ketrampilan, serta skill yang telah diperoleh di kampus. "Tantangan dan kesempatan ada di tangan Anda", tuturnya.

Anggota Komisi I DPR itu menegaskan agar generasi muda menjadi pelopor. Pelopor dalam mengajak generasi muda yang lainnya untuk bersama-sama bersatu untuk membangun bangsa. "Ajaklah mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan," paparnya. Dengan peran yang dilakukan maka bonus demografi yang tersedia bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh bangsa Indonesia.

Syarief Hasan mengungkap, untuk membangun bangsa Indonesia berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945 salah satunya pada Pasal 33. Dalam pasal itu diingatkan struktur perekonomian kita pada asas kekeluargaan. Juga dinyatakan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

Dari penjelasan ini, Syarief Hasan menuturkan, negara bisa melakukan intervensi pada perekonomian. Dicontohkan salah satu intervensi itu, misalnya melalui subsidi. "Jadi, kalau ada wacana menghilangkan subsidi, hal demikian bertentangan dengan konstitusi," paparnya.

Untuk itu, kata Syarief Hasan, pemerintah harus mendorong agar perekonomian kita bisa meningkat dari tahun ke tahun. "Sehingga bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia sesuai dengan Sila V Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", tegasnya. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bersama MUI

Bamsoet Ajak Jaga Kerukunan Antarumat Beragama

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak para tokoh agama untuk mentransformasikan nilai-nilai keagamaan dalam kerangka membangun semangat kebersamaan di tengah menghangatnya suhu politik. Mengingat isu agama memiliki sensitivitas tinggi dan tidak boleh disalahgunakan sebagai pragmatisme politik.

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih pada Pemilu 2024 mencapai 204,8 juta jiwa. Kurang lebih setara dengan 74% dari total populasi Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 115,6 juta jiwa, atau lebih dari 56% di antaranya adalah generasi milenial dan generasi Z, yang bisa jadi belum memiliki kedewasaan yang memadai dalam menyikapi isu-isu politik yang provokatif dan dibalut dengan isu-isu agama.

"Karenanya, para pemuka agama diharapkan dapat memanfaatkan setiap momentum acara keagamaan sebagai sarana untuk menebar pesan-pesan perdamaian, menggugah semangat persaudaraan dan persatuan, serta mewakafkan dirinya sebagai fasilitator untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebajikan, demi terwujudnya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Jakarta, Rabu (18/10/23).

Turut hadir pengurus MUI, antara lain Wakil Ketua Umum Marsudi Suhud, Ketua MUI H.Yusnar Yusuf dan Wakil Sekjen Abdul Manan Ghani.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, mewujudkan kehidupan yang damai adalah pesan universal yang dimuliakan dan dijunjung tinggi oleh setiap agama. Kedamaian adalah keniscayaan bagi setiap umat untuk dapat hidup berdampingan. Karena Tuhan menjadikan umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Kedamaian adalah 'titik temu' bagi beragam perbedaan, karena dunia ini begitu kaya akan keberagaman yang tidak mungkin dipaksakan untuk diseragamkan.

Kedamaian bukanlah sesuatu yang given. Kedamaian dan kerukunan harus dihadirkan sebagai komitmen kolektif dan diwujudkan dalam langkah implementatif. Dalam konsepsi ini, penting untuk diingat bahwa martabat kemanusiaan akan tercermin dari cara menghormati orang lain, dan seberapa kuat komitmen dalam menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan dan persaudaraan antar sesama manusia.

"Terlebih bagi bangsa Indonesia yang merupakan bangsa majemuk sejak kelahirannya. Di mana penduduknya menganut 6 agama berbeda yang diakui oleh negara, serta puluhan aliran kepercayaan. Dengan kemajemukan tersebut, moderasi dalam kehidupan beragama menjadi faktor kunci bagi terwujudnya harmoni dan kerukunan umat beragama," jelas Bamsoet.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, kerukunan umat beragama yang menjadi landasan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi berkembang secara dinamis. Hal ini dapat dirujuk pada indeks kerukunan umat beragama di Indonesia yang mengalami pasang dan surut. Tahun 2019 indeks tersebut naik menjadi 73,8, kemudian tahun 2020 turun menjadi 67,46 dan tahun 2021 naik kembali menjadi 72,39.

Dinamika ini mengisyaratkan pesan penting, bahwa moderasi agama menjadi penting untuk selalu dikedepankan. Moderasi dalam kehidupan beragama tidak dimaknai untuk mengabaikan ajaran nilai-nilai agama, karena sesungguhnya nilai-nilai agama akan selalu melekat dan mewarnai kehidupan keseharian yang mengajarkan untuk menjaga hubungan silaturahim yang harmonis dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

“Bagi kita di Indonesia, relasi antara agama dan negara telah diatur sedemikian khas, di mana kita bukan negara agama yang berdasar pada satu agama tertentu. Tetapi, kita juga bukan negara sekuler, karena negara kita adalah negara yang bersandarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkas Bamsoet. ❑

Sosialiasi Empat Pilar BPK Gorontalo

Fadel Muhammad: Daerah Harus Punya Program Besar Skala Nasional

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, mengingatkan daerah, termasuk Gorontalo, untuk mulai dari sekarang memikirkan dan menciptakan program besar skala nasional di bidang teknologi, pertanian, kelautan, atau lainnya.

"Program berskala besar nasional itu, selain akan mengangkat nama daerah di tingkat nasional, juga akan mampu memberikan kepastian kesejahteraan kepada rakyatnya," ujarnya, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR dengan Barisan Pemuda Kreatif (BPK) Gorontalo.

Acara yang digelar di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Ahad (15/10/2023) ini, dihadiri Pimpinan BPK Gorontalo, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar sebagai peserta.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI Dapil Gorontalo ini mengungkapkan, pemerintah pusat tidak hanya memikirkan satu atau dua daerah saja, tapi seluruh daerah di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Fadel Muhammad, daerah perlu memiliki program besar.

"Dengan adanya Gorontalo memiliki satu program besar yang hasilnya akan berdampak juga secara nasional, tentu akan mendapatkan perhatian lebih dari pusat. Bukan itu saja, bisa juga program tersebut mendapatkan perhatian secara global sehingga membuat bangga Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini menegaskan, pentingnya Gorontalo memiliki program nasional yang difokuskan di bidang pertanian. "Pertanian memang saya rasa cocok untuk dikembangkan menjadi program nasional. Sejak saya menjabat Gubernur, hal ini sudah saya lakukan, terutama di pertanian jagung. Alhamdulillah, Gorontalo dikenal dengan produk jagungnya yang bagus dan berkualitas ekspor," terangnya.

Dari budi daya jagung itu, Fadel Muhammad melihat Gorontalo memiliki potensi luar biasa juga di produk pertanian lainnya seperti padi dan kelapa. "Untuk itu, saya usulkan dan sudah membuat studi serta kajiannya, ke Pemprov Gorontalo bahwa Gorontalo bisa menjadi Lumbung Pangan Nasional," jelasnya.

Diutarakan oleh Fadel Muhammad, pemikiran soal lumbung pangan nasional itu sesuai dengan amanah nilai-nilai dalam Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) terkait upaya pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. ❑

Dialog Kebangsaan MPN Pemuda Pancasila

Bamsoet Mengingatkan Konstitusi Indonesia Perlu Miliki Pintu Darurat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bambang Soesatyo, menuturkan setelah mengalami empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata masih belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu. Di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR masih dapat menetapkan berbagai Ketetapan yang bersifat pengaturan atau regeling untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi.

"Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk melahirkan Ketetapan-Ketetapan yang bersifat pengaturan. Hal ini penting untuk kita pikirkan dan diskusikan bersama, perlunya 'pintu darurat' sebagai jalan keluar apabila terjadi dispute konstitusi, demi menjaga keselamatan dan keutuhan kita sebagai bangsa dan negara," ujar Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (21/10/23).

Selain Budayawan Deddy Mizwar, hadir antara lain Ketua Bidang ESDM MPN Pemuda Pancasila Muslim, Ketua Bidang OK MPN Pemuda Pancasila Piala Simanjuntak, serta Anggota Bidang Seni dan Budaya MPN Pemuda Pancasila Dedi Gumelar.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, jika sekiranya terjadi keadaan yang membuat kesinambungan kepemimpinan bangsa dan negara terhenti, baik karena adanya bencana alam, adanya pandemi, adanya pemberontakan dan kerusuhan atau krisis keuangan, maka keadaan-keadaan demikian mungkin saja dapat diatasi oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, bagaimana sekiranya apabila terjadi situasi di mana presiden dan wakil presiden, berikut triumvirat yakni menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan menteri pertahanan beserta jajaran yang lain lumpuh, atau berhalangan tetap secara serentak? Sehingga situasi keadaan bahaya itu sama sekali tidak dapat diatasi oleh organ-organ konstitusional yang ada.

"Atau bagaimana jika keadaan darurat negara menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi? Maka secara hukum, tentunya tidak ada presiden dan atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban atau kewenangan hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, idealnya UUD 1945 harus dapat memberikan jalan keluar secara konstitusional untuk mengatasi kebuntuan ketatanegaraan atau "constitu-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tional deadlock". Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi maka prinsip kedaulatan rakyatlah yang harus dikedepankan untuk mengatasi keadaan keadaan bahaya tersebut.

"Sebagai representasi dari prinsip kedaulatan rakyat maka seharusnya MPR kembali memiliki kewenangan subyektif superlatif.. Sehingga dengan kewenangan tersebut dapat mengambil keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat regeling guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar," urai Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini memaparkan, agar MPR RI kembali memiliki kewenangan subyektif superlatif, idealnya dengan melakukan perubahan terhadap UUD. Namun, untuk saat ini, realita politik masih belum memungkinkan. Apalagi saat ini seluruh partai politik mencurahkan seluruh energinya dalam menghadapi tahun politik menjelang Pemilu serentak dan Pilkada serentak tahun depan.

Pilihan alternatif lainnya adalah merevisi atau menghapuskan penjelasan pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan pasal 7 tersebut menempatkan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD dan di atas undang-undang. Akan tetapi, ketentuan tersebut dibatasi pada bagian Penjelasan, dengan menyatakan bahwa Ketetapan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku menurut Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

"Tentu ini menjadi persoalan, karena tidak seharusnya ketentuan dalam penjelasan membatasi norma yang diatur dalam pasal. Sebagai catatan, saat ini pengajuan judicial review terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut sedang diajukan oleh Partai Bulan Bintang ke MK masih dalam proses persidangan. Jika dikabulkan, maka MPR akan memiliki kewenangan membuat Ketetapan yang bersifat regeling," pungkas Bamsoet. ❑

Pagelaran Wayang Kulit di Gorontalo

Fadel Muhammad: Pelestarian Budaya Bentuk Cinta Tanah Air

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad menyebut bahwa upaya pelestarian budaya dan hobi menonton atau menyaksikan pagelaran budaya, seperti wayang kulit, adalah salah satu bentuk cinta tanah air.

"Saya, Alhamdulillah, masih sangat senang menyaksikan pagelaran budaya dari mana saja. Sebab, menurut saya, budaya Indonesia itu menarik semua, dan kita harus bangga akan hal itu. Dalam setiap kegiatan saya di daerah pasti ada pagelaran budayanya," papar Fadel Muhammad.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini menyampaikan hal itu sebelum dimulainya Pagelaran Seni Budaya (PSB) Wayang Kulit semalam suntuk dalam rangka 'Pendidikan Penguatan Empat Pilar untuk Generasi Muda', di Pasar Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Sabtu malam (14/10/2023).

Hadir dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Boalemo Sherman Moridu, Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo, Ketua Kerukunan Indonesia Gorontalo (KKIG) Warsito, Anggota DPRD Boalemo, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat pecinta wayang kulit dari berbagai desa.

Lebih jauh, Fadel Muhammad menyampaikan bahwa pelaku pelestari budaya seperti wayang kulit ini jangan hanya diisi dengan orang-orang tua saja. Tapi, generasi mudanya harus memiliki gairah juga untuk mencintai budaya wayang kulit.

"Kita tidak ingin budaya luar biasa ini lama-kelamaan akan menjadi langka dan susah ditemui, karena banyak pelestarinya sudah tidak ada. Melihat hal ini, kaderisasi pecinta budaya menjadi sangat penting," tegasnya.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini juga sangat bangga dengan toleransi warga asli Gorontalo yang sangat menerima perbedaan budaya yang ada.

"Banyak warga Gorontalo yang tidak mengerti bahwa Jawa dan cerita wayang Jawa, tapi mereka ikut menonton. Akulturasi budaya di Gorontalo sudah terjadi dengan baik sejak lama, dan ini harus dijaga terus bahkan ditingkatkan," paparnya

Gelar wayang dengan lakon 'Sri Boyong Asmoro Bumi' pun dimulai usai Fadel Muhammad menyerahkan secara simbolik tokoh wayang kepada sang dalang, Ki Gendeng Ardianto, dalang asal Blitar, Jawa Timur. ❑

Kunjungan ke Ponpes Salafiyah Syafi'yah Gorontalo

Fadel: Pendiri Ponpes Salafiyah Syafi'yah Memiliki Sikap Toleransi Sangat Tinggi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DALAM rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo, Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad menyempatkan diri mekukan kunjungan silaturahim ke Ponpes Salafiyah Syafi'yah Gorontalo, Selasa (17/10/2023). Kedatangan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo ini disambut Pengasuh Ponpes, KH Abdullah Aniq Nawawi LC.MA.

Pesantren yang berada di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo terasa unik dan mencermin kebhinekaan yang tinggi. Sebab, bangunan Ponpes— yang didirikan pada tahun 1985 ini – berjarak hanya 200 meter dari Gereja Protestan, dan 100 meter dari pesantren juga berdiri Gereja Pantekosta, serta terdapat Pura, tempat ibadah umat Hindu.

"Pendiri ponpes ini Almagfurlah KH. Abdul Ghofir Nawawi memang memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi, bahkan hingga sekarang menjadi teladan bagi penerusnya. Beliau mengajarkan tentang keutamaan saling menghormati perbedaan yang ada," katanya.

Pendiri Ponpes, Almagfurlah KH. Abdul Ghofir Nawawi sendiri ternyata mendapat tempat di hati Wakil Ketua Dewan Penasihat ICMI ini. "Saya teringat, betapa perhatiannya beliau kepada dunia pendidikan untuk umat. Kegigihan beliau tercermin dari perjuangannya dalam mendirikan lembaga pendidikan pondok pesantren Salafiyah Syafi'yah. Sebab, beliau dulu adalah santri juga dari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur," terangnya.

Lebih jauh, anggota DPD Dapil Provinsi Gorontalo, ini mengungkapkan kenapa dia bisa begitu menaruh perhatian terhadap ponpes. Sebab, semasa ia menjabat Gubernur Gorontalo, masalah sumber daya manusia atau SDM menjadi perhatian utamanya. Dan, "Ponpes adalah salah satu lembaga pendidikan yang menciptakan banyak SDM unggul yang sangat dibutuhkan untuk membangun Gorontalo. Itulah yang dia perhatikan dan jaga," ujar Fadel Muhammad.

"Beliau (Almagfurlah KH. Abdul Ghofir Nawawi) sekarang sudah tiada. Walaupun saya ini tidak lagi menjabat sebagai Gubernur, tapi saya tetap menjaga sambung rasa dan tali silaturahim dengan keturunan beliau yang sekarang mengurus Ponpes ini," tandas mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini.

Di sesi akhir kunjungannya, Fadel Muhammad didampingi istri, Ny. Hanna Hasanah Shahab, dan Pengasuh Ponpes KH Abdullah Aniq Nawawi, melakukan ziarah ke makam Almagfurlah KH. Abdul Ghofir Nawawi, yang berada persis di samping kompleks Ponpes. ❑

Sosialisasi bersama Pelajar SMA

HNW: Pentingnya Generasi Milenial Paham Konstitusi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN ratusan siswa/siswi dan staf pengajar SMA Bakti Idhata, Cilandak, Jakarta Selatan, Wakil Ketua MPR Dr..M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengingatkan generasi milenial tentang pentingnya Konstitusi agar dapat melanjutkan peran dengan tidak melupakan sejarah. Karena, dengan menge-tahui sejarah, generasi muda tidak akan kehilangan pegangan, bahkan mempunyai kebanggaan terhadap eksistensi bangsa dan negara yang sangat terkait dengan peran konstruktif generasi muda. Dan, dengan mengetahui sejarah, generasi muda memiliki orientasi yang benar tentang perjalanan bangsa, serta tujuan yang harus dicapai dengan berbagai dinamikanya.

Terlebih, lanjut HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki tahun politik, dan sekarang ini memperingati hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Karena, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah momentum penting bagi peran dan kebangkitan generasi muda Indonesia. Peristiwa itu, menurut HNW, sudah dipersiapkan sejak 1924. Yaitu, ketika para pemuda, seperti Muh. Hatta, AA. Maramis, serta Ahmad Soebardjo belajar di Belanda. Di sana, mereka bukannya bersenang-senang, dan membuang waktu, tetapi para pemuda itu malah berjuang untuk perbaikan nasib bangsanya.

"Inilah pertama kali kata Indonesia muncul, di entitas perjuangan kemerdekaan Indonesia juga sesuai nama perkumpulan yang mereka buat, yaitu Perhimpunan Indonesia. Mereka juga membuat media cetak dengan nama *Suara Indonesia*, berisi tuntutan kemerdekaan atas Indonesia dan itu disebarluaskan ke berbagai kawasan Eropa, sehingga bangsa-bangsa Eropa mengetahui adanya kolonialisme di Indonesia, dan adanya perjuangan untuk kemerdekaan In-

donesia," ungkap HNW saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di hadapan siswa-siswi dan para pengajar SMA Bhakti Idhata, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Ikut Hadir pada acara tersebut, H. Rahman Saleh, Ketua Pemuda Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai narasumber pendamping. Juga Pelaksana Harian Yayasan Bakti Idhata Drs. H. Machfud Yahya, Kepala Sekolah SMA Bakti Idhata Lulus Juharman, S.SI., dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Muhammad Muslimin, S.Pd.

Ketika mereka pulang dari Den Haag, cerita HNW lebih lanjut, dan bertemu pemuda-pemuda lain yang juga mengenyam pendidikan di luar negeri, mereka segera menyusun gerakan dan naskah sumpah pemuda. Naskah berisi pengakuan atas bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia itu disepakati oleh berbagai utusan pemuda dari seluruh Indonesia, termasuk utusan pemuda Islam, yaitu Jong Islamieten Bound.

"Inilah jejak perjuangan Pemuda Indonesia mempersiapkan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Mereka terlibat menghadirkan kesepakatan terkait ideologi Bangsa, yaitu Pancasila, juga Konstitusi Negara yaitu UUD NRI 1945. Lalu, bentuk Negara yang dipilih adalah NKRI, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, keragaman mereka justru disumbangsihkan jadi keunggulan bangsa dan negara Indonesia Merdeka.

Menurut HNW, perjuangan Pemuda Indonesia dalam mengatasi berbagai dinamika dan tantangan zamannya, persis seperti tantangan dan peluang bagi generasi milenial sekarang yang akan menyongsong ulang tahun Indonesia Emas pada 2045. "Pentingnya generasi milenial sekarang menghadirkan kembali peran mensejarah itu untuk kemaslahatan dan masa depan mereka sendiri, dengan tetap dibingkai dan disemangati oleh Empat Pilar MPR RI, agar tetap terwujud cita-cita kemerdekaan dan tuntutan Reformasi," pungkas HNW. ❑

Sosialisasi Empat Pilar di Mamuju

Lestari Moerdijat: Empat Pilar MPR Perekat untuk Wujudkan Resiliensi Bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PEMAHAMAN terhadap Empat Pilar MPR RI, yakni: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi perekat terhadap nilai-nilai budaya lokal yang ada guna membangun resiliensi bangsa.

"Bersatu dalam keberagaman sebagai bangsa adalah berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Gerakan bersama dan kolaborasi adalah turunan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR bertema: 'NKRI: Memaknai Kesatuan Identitas Indonesia di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (30/10).

Hadir pada acara tersebut Ratih Megasari Singkarru, M.Sc., (Anggota DPR RI), Dr. Hj.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sitti Suraidah Suhardi (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), Abdul Rahim, S. Ag., M.H., (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat), H. Yudiaman Firusri, S.H., (Anggota DPRD Kabupaten Mamuju), Drs. H. Herdin Ismail, M.M., (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat), dan para peserta sosialisasi dari sejumlah komunitas perempuan dan pemuda di Sulawesi Barat.

Menurut Lestari, pemaknaan nilai-nilai kesatuan dengan kesadaran dari banyaknya kultur secara khusus juga terjadi di Sulawesi Barat. Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, di Sulawesi Barat ada Situs Kalumpang, sebuah situs di Zaman Batu sampai Zaman Batu Muda, yang menandakan kawasan Kalumpang adalah daerah yang subur.

Kemudian, tambah dia, di Sulawesi Barat juga berdiri Kerajaan Mandar, yang bersama Kerajaan Gowa di masa lalu merupakan kerajaan yang kuat dan disegani musuh-musuhnya. Fakta tersebut, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, menunjukkan masyarakat Sulawesi Barat memiliki memori dan kesadaran untuk bergerak lebih maju di masa depan.

Namun, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, saat ini Sulawesi Barat masih menjadi provinsi termiskin peringkat ke-11 di Indonesia. Padahal, tegas Rerie, berdasarkan catatan sejarah dan kondisi alamnya Provinsi Sulawesi Barat dapat melangkah ke depan sejajar dengan provinsi terbaik lainnya di Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Rerie menegaskan, dengan pemahaman terhadap nilai-nilai empat konsensus kebangsaan, kita mampu menghadapi pergeseran nilai yang berdampak cukup mengkhawatirkan dan menghambat proses pembangunan.

“Nilai-nilai budaya dan Empat Pilar MPR itulah yang harus dipertahankan dalam kehidupan di masyarakat,” pungkas Rerie. ❑

Pentas Seni Budaya di Unila

Taufik Basari: Kita Punya Keragaman Seni Budaya Harus Dijaga dan Dilestarikan

WAKIL Ketua Badan Sosialisasi yang juga Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR, Taufik Basari SH., M.Hum., LLM., menegaskan, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki banyak metode sosialisasi, sesuai audience yang dituju. Untuk para mahasiswa misalnya, selain seminar, dan focus group discussion, MPR juga memiliki metode Pentas Seni Budaya (PSB). Metode ini menampilkan hasil kreasi seni budaya yang dekat dengan masyarakat setempat.

Selain menggali kesenian lokal dan mendekatkan kembali kepada generasi muda, PSB juga berfungsi menjaga hasil cipta, karsa, dan karya, nenek moyang agar tidak tergilas oleh zaman, dan musnah begitu saja.

"Kita memiliki banyak sekali keragaman seni budaya, yang kesemuanya harus dijaga dan dipertahankan. Apalagi keragaman seni budaya itu membuat bangsa Indonesia semakin satu padu, rukun, damai, dan sejahtera. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika," ungkap Taufik Basari.

Pernyataan itu disampaikan Taufik Basari atau yang akrab disapa Tobas, saat membuka Pagelaran Seni Budaya dalam rangka Pendidikan Penguatan Empat Pilar MPR RI kepada generasi muda. Acara yang berlangsung di Aula Fakultas Pertanian Unila, Rabu (1/11/2023) ini diselenggarakan Badan Sosialisasi MPR bekerjasama dengan Fisip Unila.

Ikut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Badan Sosialisasi (Bansos) dari Fraksi PAN Ir. Alimin Abdullah, dan Wakil Ketua Bansos dari Fraksi PPP Moh. Arwani Thomafi. Hadir pula anggota Bansos Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, ST., SH., MH.; Anggota Bansos Fraksi Golkar, Dr. Saniatul Lativa, SE., MM.; Anggota Bansos Fraksi Demokrat Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE., M.AP.; anggota Bansos Fraksi PKS Dr. Al Muzammil Yusuf, M.Si., dan KH. Aus Hidayat Nur; Anggota Bansos Fraksi PAN Dr. Muhammad Syafrudin, ST., MM.; Anggota Bansos Kelompok DPD H. Muhammad Ghazali, LC.; Serta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, Dr. Anna Gustina Zainal.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prosesi Pagelaran Seni Budaya dalam rangka Pendidikan Penguatan Empat Pilar MPR RI kepada generasi muda dimulai dengan kirab kesenian Reog dari Gedung Rektorat menuju Aula Fakultas Pertanian Unila. Setibanya di Aula, pimpinan dan anggota Bansos MPR yang turut dalam kirab

disuguhi berbagai tarian daerah, yaitu: Tari Piring 12, Tari Melinting, Tari Bedana, dan Tari Nyambai.

Bukan hanya tari daerah dan lagu-lagu nasional, PSB di Unila ini juga diisi talk show tentang Empat Pilar MPR oleh Pimpinan dan Anggota Bansos. Pada kesempatan itu, baik Alimin Abdullah maupun Al Muzammil Yusuf, keduanya mengajak mahasiswa menjadi pemilih cerdas. Bisa menentukan calon presiden maupun caleg dengan rasional. Yaitu, mereka yang dapat memperjuangkan aspirasi mahasiswa, khususnya menyangkut anggaran pendidikan maupun pembangunan Indonesia di masa depan. Para mahasiswa juga harus bisa memastikan mengenal wakil mereka di lembaga legislatif, beserta sepak terjangnya sebagai legislator.

Sementara itu, Arteria Dahlan mengajak mahasiswa untuk lebih berani dalam bertindak serta berbuat. Karena idealisme mahasiswa adalah perjuangan rakyat, dan tidak tersandera dengan persoalan apapun. Selain itu, para mahasiswa juga harus lebih

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

memahami masyarakat Indonesia, karena tiap-tiap warga Indonesia berbeda-beda. Sesuai asal usul daerah, bahasa, suku bangsa, serta latar belakang budayanya.

"Mahasiswa harus mengetahui ideologi dan jatidiri yang membedakan orang Indonesia dengan lainnya. Kita tidak mungkin meninggalkan konsensus yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang bersepakat mendirikan Indonesia. Yaitu, melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, ketika pasal-pasal konstitusi berubah, tidak ada sedikitpun yang berubah dari pembukaan," pungkasnya. ❑

Forum Konsultasi Publik dengan UMB

Indro Gutomo: MPR Terbuka Untuk Mendapat Kritik dan Masukan Dari Masyarakat

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEPALA Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Indro Gutomo, SH., MH., menegaskan, MPR selalu siap menerima saran dan kritik dari semua kalangan, tak terkecuali mahasiwa. Bahkan, kami sangat terbuka, dengan masukan dari masyarakat, karena keterbukaan terhadap kritik dan saran sesuai dengan perintah UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik.

Bahkan,lanjut Indro Gutomo, untuk mendapatkan masukan dari mahasiswa, MPR melalui Biro Humas dan Sistem Informasi tak segan menjemput bola, datang ke kampus-kampus menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP). "Salah satu tujuannya adalah menyerap aspirasi dari dosen dan mahasiswa, untuk kemudian dijadikan bahan masukan dalam memperbaiki pelayanan publik, khususnya terkait layanan informasi yang sudah diberikan selama ini," ujar Indro Gutomo saat menjadi narasumber Forum Konsultasi Publik di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), di Bengkulu, Jumat (20/10/2023).

Acara FKP yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan UMB bertema: 'Evalusasi Pelayanan Publik MPR melalui Layanan Informasi dan Perpustakaan' berlangsung di Bengkulu, dan dihadiri oleh Rektor UMB, Dr. Susiyanto, M.Si., beserta jajarannya.

Selain Indro Gutomo, ada tiga narasumber lain yang menyampaikan materinya. Ketika narasumber tersebut adalah: Dr. H. Ahmad Dasan, SH., MA., dosen UMB yang juga anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR; Try Sylvani, SE., Penyusun Berita dan Pendapat Umum Subbag Pemberitaan MPR; dan Satrya Yudha Hartanto, SE., Pustakawan Muda Biro Humas dan Sistem Informasi MPR

Lebih lanjut, Indro Gutomo menjelaskan, Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi amanah pada negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya secara layak. Pasal ini menjadi bukti bahwa persoalan pelayanan publik penting bagi MPR. Selain itu, sesuai UU MD3, MPR juga memiliki tugas menyerap aspirasi tentang pelaksanaan UUD, tak tercuali Pasal 34 ayat 3. "Tugas MPR ini tentu saja perlu didukung oleh Kesekjenan MPR RI, tak terkecuali Biro Humas dan Sistem Informasi. Pasal-pasal ini juga merupakan rangkaian dasar hukum yang melandasi pelaksanaan FKP pada hari ini," ungkap Indro Gutomo.

Nah, Universitas Muhammadiyah Bengkulu dipilih menjadi mitra pelaksanaan FKP, jelas Indro, karena perguruan tinggi itu pernah berkunjung ke MPR. Pada kunjungan tersebut, mahasiswa UMB sempat berkeliling dan melihat-lihat kompleks parlemen di Senayan. Mereka juga merasakan pelayanan yang diberikan MPR saat berkunjung. Sehingga layak kalau UMB bisa memberi penilaian, sekaligus saran dan kritik bagi MPR untuk perbaikan pelayanan publiknya di masa depan.

"Jadi, bukan tanpa alasan, kami datang dan memilih UMB untuk melaksanakan serap aspirasi melalui Forum Konsultasi Publik. Dan, tidak mungkin kami meminta umpan balik

soal layanan informasi yang diberikan MPR kepada orang yang belum pernah berhubungan dengan MPR. Kami datang ke UMB lantaran merasa sudah ada ikatan, karena itu berikanlah kami masukan, kritik serta saran terbaik untuk memperbaiki kinerja MPR yang sudah bapak/ibu, serta para mahasiswa rasakan. Semoga ke depan akan ada lebih banyak kerjasama yang bisa dilakukan," kata Indro menambahkan.

Pernyataan serupa disampaikan dosen UMB, Dr. H. Ahmad Dasan, SH., MA. Menurut Ahmad Dasan, sudah sepatutnya jika MPR membuka diri untuk menerima saran dan kritik dari masyarakat, khususnya dunia perguruan tinggi. Karena itu, menurut Ahmad Dasan, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi adalah pilihan yang tepat bagi MPR agar memperoleh masukan yang akurat.

"Rakyat adalah pemegang kedaulatan, dan memberikan mandat tersebut kepada lembaga perwakilan. Karena itu, wajar jika MPR memberitahukan hasil kinerjanya kepada masyarakat. Apalagi rakyat juga memiliki hak untuk mengetahui informasi dari lembaga negara," kata Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan itu.

Bagi mahasiswa, informasi dari MPR, menurut Ahmad Dasan, bisa menjadi bahan

skripsi untuk memenuhi syarat kelulusan. Karena itu mahasiswa juga patut mengetahui sarana komunikasi yang digunakan MPR. Bukan semata informasi aktual, tapi juga informasi faktual yang terjadi dimasa lalu, termasuk dalam bentuk risalah rapat. Dan, itu sangat penting buat bahan penelitian.

Forum Konsultasi Publik dengan UMB menghasilkan beberapa rekomendasi. Antara lain, MPR harus mempermudah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapat informasi. Perlu perhatian terhadap security Website MPR agar tidak mudah terkena hack. Pemakaian media sosial oleh MPR belum optimal, salah satu alasannya karena masih minim interaksi. Selain itu, pemakaian medsos untuk menyampaikan berbagai ucapan selamat, tidak menarik bagi masyarakat, karena itu perlu konten lain yang lebih kreatif. Khusus buat perpustakaan, MPR harus memperbanyak jumlah buku, agar bisa menjadi referensi, selain perpustakaan nasional. Bukan hanya referensi politik semata, juga buku-buku lain yang dicari masyarakat.

Di akhir acara Rektor UMB, Dr. Susiyanto, M.Si berharap agar kerja sama dan hubungan antara MPR RI dan UMB dapat senantiasa berlanjut melalui berbagai kegiatan lainnya. ❑

Kunjungan Santri Dea Malela Sumbawa

Hentoro Cahyono: Pintu MPR Selalu Terbuka, Termasuk Para Santri

Tugas MPR sangat mulia, salah satu tujuannya adalah menjaga agar generasi muda tetap memahami dan melaksanakan ideologi Pancasila.

DI HADAPAN puluhan santri Dea Malela Modern International Islamic Boarding School Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI, Hentoro Cahyono, SH., MH., menegaskan bahwa MPR adalah Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. Karena itu, pintu MPR selalu terbuka, termasuk untuk para santri seperti Dea Malela Modern International Islamic Boarding School.

Hentoro Cahyono menyebut, salah satu tugas MPR adalah melakukan sosialisasi

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Empat Pilar MPR RI. Tugas tersebut sangat mulia, karena salah satu tujuannya adalah menjaga agar generasi muda tetap memahami dan melaksanakan ideologi Pancasila. Selalu menjaga persatuan dan kesatuan, melestarikan gotong royong, bukan malah tercerai berai dan saling memusuhi.

"Di tahun politik seperti sekarang, akan muncul oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang hendak mengadu domba anak-anak bangsa dengan cara menyebar hoax, fitnah, dan adu domba. Untuk itu, kita harus lebih waspada dan berhati-hati, tabayun atau mencari konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait. Bukan malah turut menyebar berita bohong yang hendak memecah belah bangsa," kata Hendro Cahyono.

Pernyataan itu disampaikan Hentoro Cahyono saat menerima kunjungan Delegasi Dea Malela Modern International Islamic Boarding School. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks MPR/ DPR/ DPD Senayan, Rabu (25/10/2023). Delegasi Dea Malela Modern International Islamic Boarding School dipimpin oleh Direktur PMI Dea Malela Muhammad Akief Kabah Syarmadiah, SE.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Dea Malela memanfaatkan kesempatan dengan mengabadikan kehadiran mereka di Senayan dengan memanfaatkan berbagai spot foto yang banyak ditemukan di komplek Parlemen. Salah satunya, berpose di tangga menuju ke Gedung Kura-kura. Mereka juga berkesempatan berkeliling melihat dari dekat gedung wakil rakyat, yang biasanya hanya bisa disaksikan di layar televisi.

Pernyataan serupa disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR RI, Indro Gutomo, SH., MH. Indro menyebut, wewenang MPR yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mengubah dan menetapkan UUD, Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, serta memberhentikan presiden atau wakil presiden pada masa jabatannya sesuai UU.

"Dalam kondisi normal, presiden dan atau wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi, jika di tengah masa jabatannya, presiden dan atau wakil presiden berhalangan tetap, maka MPR berwenang untuk memilih presiden dan atau wakil presiden," pungkas Indro Gutomo.

Sementara dalam hal perubahan UUD, jelas Indro, Pimpinan MPR akan membentuk badan Ad Hoc. Badan ini akan bekerja untuk mempersiapkan perubahan UUD, dari awal hingga akhir. Setelah perubahan selesai, Pimpinan MPR akan membubarkan badan tersebut. ❑

Sarasehan Kehumasan MPR RI

Siti Fauziah: Perlu Perspektif Empat Pilar MPR RI dalam Pembangunan

Pembangunan tidak hanya diartikan sebagai pembangunan fisik tetapi juga non fisik, termasuk spiritual dan penanaman nilai-nilai Empat Pilar MPR RI.

DEPUTI Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., menyebutkan perlunya perspektif Empat Pilar MPR RI digunakan para arsitek dan insinyur dalam merancang pembangunan. Sebab, pembangunan tidak hanya diartikan sebagai pembangunan fisik tetapi juga non fisik, termasuk spiritual dan penanaman nilai-nilai Empat Pilar MPR. Untuk itu, Siti Fauziah berharap, agar perspektif Empat Pilar MPR dipakai untuk pembangunan yang di dalamnya ada peran arsitek dan insinyur.

Siti Fauziah yang biasa disapa Bu Titi itu menyampaikan hal itu dalam acara Sarasehan Kehumasan MPR RI bertema: "Entrepreneurship Profesi Arsitek dan Insinyur dalam Mendukung Pembangunan di Gorontalo dan dalam Perspektif Empat Pilar MPR RI," di Hotel Q Gorontalo, Sabtu malam (21/10/2023).

Sarasehan Kehumasan MPR RI bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Gorontalo ini dihadiri Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, Ketua IAI Gorontalo Ar. Yohanes P. Erick, wartawan senior Raden Syarief Abdullah atau Haji Lala, Hana Hasanah. Sarasehan Kehumasan MPR ini secara spesifik diikuti peserta yang berprofesi sebagai arsitek atau insinyur.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Menurut Siti Fauziah, pembangunan nasional memang seringkali diartikan sebagai pembangunan fisik, seperti pembangunan infrastruktur, gedung, dan lainnya. Padahal pembangunan juga menyangkut spiritual dan non fisik, termasuk di dalamnya penanaman nilai-nilai Empat Pilar MPR RI.

Siti Fauziah menambahkan, Sarasehan Kehumasan MPR RI ini ingin mendengar pandangan-pandangan dari para arsitek dan insinyur di Gorontalo. "Dari sarasehan ini juga diharapkan kita mendapat gambaran peran arsitek dan insinyur dalam pembangunan secara spesifik dilihat dari perspektif Empat Pilar MPR RI," tuturnya.

Siti Fauziah menjelaskan, salah satu tugas MPR adalah Sosialisasi Empat Pilar MPR. "Empat Pilar ini ibarat pondasi dalam membangun sebuah gedung. Kita ingin bangsa ini mempunyai pondasi yang kuat. Ada empat pondasi yang kuat di bangsa Indonesia," ujar Bu Titi.

Keempat pondasi itu adalah Pancasila, sebagai dasar dan ideologi negara. Kedua, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara sehingga negara kita merupakan satu kesatuan tidak seperti negara federal. Keempat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang mempersatukan beragam suku bangsa, agama, adat istiadat, dalam semboyan, "meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua".

"Dalam sarasehan ini Wakil Ketua MPR, Bapak Fadel Muhammad, akan menjelaskan tentang perspektif Empat Pilar MPR RI dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan di Provinsi Gorontalo. Yaitu, bagaimana perspektif Empat Pilar MPR dipakai untuk pembangunan yang di dalamnya ada peran para arsitek dan insinyur," ujarnya.

"Kita mengetahui Bapak Fadel Muhammad telah dua periode memimpin Provinsi Gorontalo pada awal-awal berdirinya provinsi ini. Beliau yang memulai pembangunan Provinsi Gorontalo. Saat itu pembangunan Provinsi Gorontalo sangat pesat," sambungnya.

Dalam membangun Provinsi Gorontalo, lanjut Bu Titi, Bapak Fadel Muhammad mengembangkan potensi daerah Gorontalo yang kaya sumber daya alam dan memprioritaskan sumber daya manusia (SDM) lokal. Dengan menggali potensi daerah dan memanfaatkan sumber daya manusia setempat, Fadel Muhammad berhasil membangun Provinsi Gorontalo.

Siti Fauziah berharap, dengan penjelasan tentang pembangunan dari perspektif Empat Pilar MPR itu, para peserta sarasehan bisa meneruskan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang telah dimulai Bapak Fadel Muhammad. ❑

Dialog Bersama Guru PPKn

Indro Gutomo Menjelaskan Visi MPR Sebagai Rumah Kebangsaan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

VISI lembaga MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Pancasila, sudah banyak dikenal dan dibahas di berbagai ranah dialog dan diskusi. Ini membuktikan bahwa visi MPR tersebut sudah melekat kuat dan dipahami seluruh rakyat Indonesia.

Para guru, terutama guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), adalah yang paling antusias membahas soal visi MPR ini jika melakukan kunjungan ke MPR. Salah satunya, sekitar 100 guru SMP dan pendamping yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn se-Kota Depok, Jawa Barat.

Kedatangan mereka ke Gedung MPR, Kamis (5/10/2023), bukan hanya sekedar berwisata, berfoto atau mendalami sejarah lembaga MPR, tapi juga melakukan dialog seputar MPR sebagai Rumah Kebangsaan serta kewenangan dan tugas-tugasnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga, Biro Humas dan Sistem Informasi, Setjen MPR RI, Indro Gutomo, didampingi Kasubag Hubungan Antar Lembaga Biro Humas Setjen MPR RI Yenita Revi dan staf menerima delegasi di Ruang GBHN II, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Indro menerangkan tentang filosofi MPR sebagai Rumah Kebangsaan. MPR, jelas Indro, terbuka bagi semua kalangan sebagai sahabat kebangsaan MPR. “Jika rakyat, termasuk bapak dan ibu guru, sudah datang ke MPR maka sudah menjadi sahabatnya MPR. Untuk mempererat hubungan persahabatan itu tidak berhenti sampai di sini, tapi terus dijaga dan dikelola,” ujarnya.

MPR, lanjut Indro, sebelum masa reformasi adalah lembaga tertinggi negara. Kewenangannya sangat luar biasa, salah satunya meminta pertanggungjawaban presiden mandataris MPR, dan bila

pertanggungjawaban ditolak, MPR dapat memberhentikan Presiden.

"Setelah reformasi bergulir, MPR menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, antara lain DPR, DPD dan Kepresidenan, yang memiliki kewenangan masing-masing yang diberikan oleh konstitusi. Adapun pengaturan lembaga MPR ada di tiga dasar hukum, yakni: UUD NRI Tahun1945, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR," terangnya.

Walaupun MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi, lanjut Indro, tapi MPR memiliki kewenangan tertinggi, yaitu: Berwenang mengubah dan menetapkan peraturan perundangan tertinggi, yakni UUD/Konstitusi. MPR juga dapat memberhentikan presiden apabila terbukti melanggar hukum. Kewenangan ini hanya dimiliki MPR, tidak dimiliki lembaga negara lainnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Ada satu hal lagi kewenangan MPR yang kurang memahami publik. Selama ini, publik hanya tahu bahwa MPR tidak memiliki kewenangan memilih, tapi hanya melantik Presiden dan Wapres saja. Padahal, sesuai amanah konstitusi, MPR juga masih berwenang memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres dalam masa jabatannya karena berhalangan tetap, Dan, MPR juga berwenang memilih Presiden dan Wapres, apabila keduanya (bersamaan) berhalangan tetap atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Di sesi akhir, penyelenggara diskusi membuka ruang tanya jawab seputar lembaga MPR RI. Sesi ini mendapatkan respon yang tinggi dari para guru PPKn. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para guru, kemudian dijawab satu persatu secara lugas oleh Indro Gutomo. ❑

DER

Diikuti 15 Calon

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Setjen MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ASSESSMENT Center Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, Senin (6/11/2023) menggelar dan memfasilitasi kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Potensi dalam rangka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

Turut hadir dalam kegiatan yang diikuti 15 calon pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tersebut adalah: Plt. Sesjen MPR RI Siti Fauziah, SE., MM.; Asesor SDM Aparatur Utama BKN Supranawa Yusuf dan Wakiran, serta para pendamping calon.

Penilaian potensi dan kompetensi yang dilaksanakan selama 3 hari (6-8 November 2023), di Assesment Center, Puspenkom ASN BKN, Gedung II, Komplek Gedung BKN Pusat, Jakarta, ini harus dilalui seluruh peserta dengan dua tahap mekanisme pelaksanaan, yakni: Pra Asesmen dan Asesmen. Pada Pra Asesmen, peserta harus mengisi DRH, BEQ dan CI.

Kemudian, pada mekanisme Asesmen, peserta harus melalui beberapa tahapan lagi, yakni: Psikotes, Simulasi Tertulis, Simulasi Diskusi Kelompok, Simulasi Presentasi, Wawancara Kompetensi dan Form Evaluasi.

Hal itu disampaikan Asesor SDM Aparatur Utama BKN, Supranawa Yusuf, saat membuka kegiatan tersebut. “Saya berharap seluruh peserta mengikuti semua mekanisme dan tahapan seleksi. Sebab, keikutsertaan calon akan memengaruhi penilaian akhir dalam evaluasi nanti,” tambahnya.

Ditemui di sela-sela kegiatan seleksi, Pl.t Sesjen MPR Ibu Siti Fauziah, SE., MM., berharap agar seleksi JPTM ini akan menghasilkan pejabat Sekretaris Jenderal MPR RI (Sesjen MPR RI) yang tangguh dan memiliki integritas yang tinggi.

“Integritas sangat saya tekankan, sebab menjadi bagian yang penting dalam memimpin institusi sebesar Setjen MPR RI. Integritas harus ada dalam diri seorang pemimpin. Integritas menunjukkan konsistensi antara keyakinan, ucapan dan terlaksana dalam perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ibu Titi, sapaan akrabnya, juga mengungkapkan bahwa integritas dari seorang pemimpin dirasakan menjadi lebih penting lagi karena Setjen MPR harus menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sebagai Supporting System dari lembaga MPR RI.

“Selain itu, untuk menghadapi kendala di tahun ini dan tantangan yang sangat luar biasa di tahun-tahun mendatang, Sesjen kita ini harus juga memiliki inovasi dan improvisasi yang tinggi, salah satunya di bidang digital yang akan semakin mempermudah kerja-kerja Setjen MPR sebagai supporting system lembaga MPR,” tandasnya. ❑

Peringatan Hari Pahlawan di Komplek Parlemen

Siti Fauziah: Kita Harus Mengimplementasikan Nilai-Nilai Kepahlawanan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SELURUH jajaran pejabat, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD, pada 10 November 2023, mengikuti upacara bendera memperingati Hari Pahlawan.

Upacara yang digelar di lapangan depan Gedung Sekretariat Jenderal DPR, Komplek MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, itu berlangsung khidmad. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Plt. Sekretaris Jenderal MPR, Siti Fauziah, SE., MM.

Peringatan Hari Pahlawan yang ke-78 ini mengusung tema: 'Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan.' Dalam kesempatan itu, Siti Fauziah selaku Inspektur Upacara membacakan Amanat Menteri Sosial.

Bertepatan dengan Peringatan Hari Pahlawan kali ini 16 orang PNS yang bertugas di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD menerima tanda kehormatan 'Satyalencana Karya Satya Tahun 2023." Ke-16 PNS ini adalah pegawai di Sekretariat MPR, DPR, dan DPD yang berprestasi dan telah mengabdi selama 10 tahun hingga 20 tahun.

Plt. Sesjen MPR RI, Siti Fauziah, dalam keterangannya kepada para wartawan mengatakan, saat bangsa Indonesia berperang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, siapa lawan dan siapa kawan jelas adanya. "Siapa kawan dan lawan pada masa perang bisa langsung dilihat, namun saat ini siapa kawan dan lawan tidak jelas," ungkap Bu Siti, begitu dia biasa disapa.

Untuk itu, perempuan asal Bandung, Jawa Barat, itu berharap agar generasi muda lebih peduli dan mengerti dalam menyikapi keadaan saat ini. Dengan kekuatan mental dan keberanian yang dimiliki didorong agar semua berani melawan dampak buruk dari penggunaan teknologi informasi yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

Bu Siti mengakui, hadirnya teknologi informasi memudahkan manusia untuk bekerja. Namun, dia mengingatkan agar kita memilih manfaat yang positif dari berbagai manfaat yang ada. "Teknologi informasi bergerak begitu cepat," ujarnya. Dari kemajuan teknologi itu didorong agar pengguna selektif dari apa yang ditayangkan di media sosial itu.

Nilai-nilai kepahlawanan, menurut Siti Fauziah, sebenarnya sudah diterapkan oleh para pegawai. "Sikap jujur dan adil merupakan nilai-nilai kepahlawanan yang sudah diterapkan oleh para pegawai di sini," tuturnya. Meski begitu, dia menegaskan, agar generasi saat ini terus berjuang untuk mewujudkan nilai-nilai kepahlawanan yang ada.

Selanjutnya, Bu Titi mengingatkan, agar di tahun politik ini para pegawai bertindak netral. "Jangan sampai kita berpolitik walaupun kita tahu kita berada di lembaga politik," paparnya.

Kepada para pegawai yang meraih penghargaan Satyalancana Karya Satya, Siti Fauziah mengucapkan selamat, seraya berharap agar mereka bisa mempertahankan kinerja. Bu Siti mengingatkan bahwa penghargaan tersebut merupakan kepercayaan negara kepada para abdi negara, jadi bukan penghargaan sembarangan.

"Bagi mereka yang mendapat penghargaan harus bisa mempertahankan apa yang sudah dipercayakan. Dan, bagi yang belum hendaknya bekerja lebih keras serta berusaha membuktikan diri bisa dipercaya oleh negara," tegasnya. ❑

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng., Anggota MPR Fraksi PKS

Kita Akan Kawal Implementasi UU ASN

UNDANG-UNDANG Aparatur Sipil Negara (ASN) secara resmi sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Oktober 2023. Undang-undang yang sebelumnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN setelah direvisi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2023. Sebelumnya, setelah direvisi, RUU ASN itu disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa, 3 Oktober 2023. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU ASN ini menjadi UU ASN. Hanya Fraksi PKS yang menerima dengan catatan.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini secara tegas menyatakan bahwa ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pokok-pokok pengaturan dalam UU yang baru ini adalah penguatan pengawasan Sistem Merit, penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, kesejahteraan PNS dan PPPK, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN, termasuk di dalamnya transformasi komponen manajemen ASN.

Dalam ketentuan penutup, yaitu Pasal 66 diatur tentang penataan tenaga non-ASN (honorer) wajib diselesaikan paling lama pada Desember 2024. Selain itu, sejak UU ini berlaku sesuai tanggal pengesahan (31 Oktober 2023), instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Dengan demikian tidak ada lagi pegawai baru pemerintah berstatus honorer.

Untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaan UU ASN ini, berikut penuturan Anggota MPR dari Fraksi PKS yang juga anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. Petikannya.

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN yang merupakan revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi UU pada awal Oktober lalu. Presiden juga telah menandatangani UU yang disahkan DPR itu pada 31 Oktober 2023. Apa tanggapan dan komentar Bapak?

Pertama, kami ingin menyampaikan rasa bahagia karena Undang-Undang ASN ini sudah disahkan. Karena, kalau dilihat hampir empat tahun menjelang lima tahun, pembahasan revisi UU ASN ini terkatung-katung. Revisi UU sudah dilakukan pada periode yang lalu. Tetapi, memang Kementerian PAN dan RB cukup progresif.

Sebenarnya, RUU ASN ini merupakan inisiatif DPR. Tetapi, dalam pembahasan justru pemerintah yang proaktif. Bahkan, DIM (daftar inventaris masalah) dari pemerintah justru lebih dominan. Kami bisa memahami karena memang ada undang-undang yang kita sebut menjadi domain pemerintah, seperti UU APBN, meskipun DPR pembuat undang-undang. Secara sadar kita berikan kepada pemerintah bahwa penataan anggaran menjadi domain pemerintah. Dalam kaitan UU ASN, sekarang ini paradigmanya hak penataan Sumber Daya Manusia (SDM), kita juga memberikan ruang besar kepada pemerintah.

Apa yang membedakan UU ASN ini dengan UU ASN sebelum direvisi dan apa yang diatur dalam UU ASN yang baru disahkan?

Sebelum ini, aturan dalam UU ASN tampak kaku. Bahasa sederhananya, kalau sudah menjadi ASN, misalnya, tidak bisa di-

berhentikan. Sedangkan persoalan kinerja, tunjangan kinerja, menjadi inisiatif dari Pemerintah Daerah (Pemda) atau Kementerian/Lembaga. Tetapi, dengan UU ASN ini sekarang baseline-nya sudah aman. Siapa yang merasa sudah berada di zona nyaman, maka dia akan menjadi fosil dinosaurus. Ini yang secara umum kita adakan perubahan di UU ASN.

Dalam UU ASN ini ada kelenturan, memberi peluang bagi yang melakukan lompatan karir. Misalnya, dari PPPK bisa ke level yang menentukan kalau memang memiliki kualitas. Dengan UU ini, kami ingin merit sistem diwujudkan dalam implementasi.

Kita adalah negara besar, dengan luas daratan dan lautan serta ribuan pulau. Mengelola negara besar ini, kalau dilakukan penyeragaman dan statusquo, maka kita sedang menenggelamkan diri kita sendiri. Omong kosong bila birokrasinya sudah kelas dunia tetapi aturan mainnya tidak dibuat lentur, dan tidak dibuat beragam.

Di UU ASN, paradigma utamanya adalah adanya kelenturan. Kemudian ada desentralisasi otoritas, misalnya pemberhentian atau pemecatan, tidak perlu sampai ke level atas tetapi cukup dua tingkat di atasnya sehingga ada kondisi dinamis berupa promosi dan degradasi serta kompetisi yang sehat.

Persoalan yang masih menjadi masalah sampai saat ini adalah keberadaan pegawai honorer. Bagaimana penataan pegawai honorer ini dalam UU ASN?

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Presiden sudah memutuskan bahwa pada bulan November 2023 tidak boleh ada lagi pegawai honorer dalam bentuk apapun. Kita seperti dikejar-kejar karena kalau tidak ada payung hukumnya bagaimana dengan nasib 1 juta, 2 juta, atau 3 juta pegawai honorer? Maka dalam UU ASN ini ditetapkan mulai dari Mei sampai Desember 2024 ini kita mau bereskan pegawai honorer ini. Termasuk jumlah pegawai honorer yang paling besar, yaitu pegawai honorer teknis dan lainnya. Kalau pegawai honorer guru sudah jelas.

Dari pegawai honorer guru dan petugas teknis lainnya, dikelompokan dalam dua jenis honorer. Pertama, honorer pahlawan, yaitu honorer yang sudah belasan tahun bekerja tetapi tidak diangkat. Kedua, honorer siluman, yaitu hasil permufakatan jahat di antara para pengelola atau pemegang otoritas. Tiba-tiba ada namanya (pegawai honorer) padahal tidak ada orangnya. Karena itu kami memandatkan dalam UU ASN ini untuk diadakan audit terhadap honorer ini untuk membersihkan data honorer.

Salah satu provinsi yang bagus adalah DKI Jakarta. Datanya bersih karena tidak ada silumannya. Semua adalah honorer pahlawan karena sudah bekerja belasan tahun. Kalau daerah lain ada yang tercampur-campur antara honorer yang lama dengan honorer yang baru. Kalau sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) dari UU ASN ini bisa diawali dengan pemerintah DKI Jakarta atau daeah lainnya yang datanya sudah bersih.

UU ASN ini memberi kabar gembira bahwa honorer yang sudah menjadi PPPK akan bisa membuat tenang semuanya.

Bagaimana implementasi dari UU ASN ini?

Kementerian PAN dan RB mempunyai waktu 6 bulan untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU ASN ini. Sekarang PP-nya sudah selesai sekitar 60-70%. Kita akan kawal agar PP-nya betul-betul sesuai dengan ruh dan dan konten yang ada di undang-undang ini dan benar-benar bisa memberi kabar gembira untuk para ASN dan calon ASN.

Yang pertama, tentu kita ingin ada standarisasi ASN. Karena itu, ada pusat tele (talenta) nasional. Kita siapkan. Kedua, kita juga punya harapan agar proses migrasi dari beberapa juta honorer menjadi ASN itu tertulis dengan sangat jelas, transparan road mapnya di PP ini, termasuk seperti apa pembagian tugasnya antara berbagai kementerian/lembaga sehingga PP ini benar-benar implementatif. Jangan PP ini bisa jalan di satu kementerian A, tidak bisa jalan di kementerian B.

Kita akan detailkan agar ada kelenturan karena memang jenis pekerjaan itu sangat beragam, sementara peraturan tentang kategorisasinya sangat umum. Banyak yang tidak berani untuk membuka formasi yang sebenarnya di lapangan ada, tapi dikategori tidak ada. Nah, kita serahkan agar Kementerian PAN RB bersikap bijak memberikan kesempatan kepada kementerian atau lembaga ataupun pemerintah daerah untuk mengajukan nomenklatur baru sehingga pekerjaan itu nanti bisa terisi. Kita coba sesuaikan aturan dengan fakta yang ada dengan tetap menjaga prinsip-prinsipnya. ❑

Kariernya Bersinar di Korea Selatan

SRIKANDI bola voli Indonesia, **Megawati Hangesti Pertiwi**, menjadi idola baru di Negeri Gingseng Korea Selatan (Korsel). Gadis kelahiran Kabupaten Jember, Jawa Timur, 20 September 1999, ini sejak awal 2023 bergabung dan memperkuat klub bola vola Korsel, Daejeon Cheong KwanJang Red Sparking.

Atlet voli yang mengawali kariernya sejak usia 14 tahun ini memulai debut profesionalnya saat bergabung dalam skuad Surabaya Bank Jatim pada Livoli Divisi Utama 2015. Karena penampilan di Liga Voli Korea Selatan selalu memukau, dan kerap menjadi top skorer di tiap pertandingan, membuat dia dijuluki 'Megatron'. Namanya sangat viral, memiliki banyak fans.

Tampil satu-satunya sebagai pemain yang mengenakan jilbab justru tak mengganggu penampilannya. Permainnya bagus, smash-smashnya tajam dan sulit dikembalikan lawan. "Jilbab ini adalah perintah agama saya. Dan, saya tidak merasa kesulitan atau terbebani, biasa saja saat berlatih atau dalam pertandingan," ujarnya, menjawab pertanyaan pers Korsel. ❑

DER

Megawati Hangestri Pertiwi

Angkat Film Layar Lebar
Tentang Budi Pekerti

RAPHAEL **Wregas Bhanuteja** adalah seorang sutradara yang berada di balik film bertajuk: "Budi Pekerti (BK)." Film layar lebar yang mulai tayang di bioskop pada 2 November 2023 ini mengisahkan tentang seorang guru BK yang viral di media sosial, usai berselisih dengan seorang pengunjung pasar. Video perselisihan itu tersebar hingga menyebabkan guru tersebut dihujat warganet. Ia mengalami perundungan digital karena dianggap tak mencerminkan pribadi seorang guru, bahkan dicari-cari kesalahannya yang lain hingga membuatnya terancam kehilangan pekerjaan.

Film dibintangi oleh Sha Ine Febriyanti yang berperan sebagai Prani, sang guru BK. Serta, sederat pemeran utama lainnya: Angga Yunanda, Prilly Latuconsina, dan Dwi Sasono.

Menurut Wregas, film ini terinspirasi dari maraknya orang tua yang menjadi korban perundungan digital saat pandemi. "Hukuman itu kerap menimbulkan perdebatan yang tak jarang memicu amarah terhadap sang guru. Kondisi itu pun memberi dampak besar bagi guru, sehingga saya mengangkat itu menjadi cerita utama Budi Pekerti," ujar sutradara kelahiran Yogyakarta, 31 tahun silam ini. ❑

DER

Wregas Bhanuteja

Najwa Shihab

Muak dan Marah
Melihat Penjajahan Dialami Palestina

HARI Ahad tanggal 5 November 2023, pagi hari, di lapangan Monas, Jakarta, sudah tumpah ruah oleh jutaan warga masyarakat, bukan saja massa umat islam tapi umat lintas agama. Juga massa dari berbagai elemen dan organisasi masyarakat lainnya.

Hari itu, berlangsung Aksi Damai Indonesia Bela Palestina. Di tengah lautan manusia itu, selain dihadiri pejabat pemerintah, tokoh dari berbagai agama, tokoh politik, jurnalis, dan tidak sedikit kaum selebriti. Tampak salah seorang di antaranya adalah presenter kondang **Najwa Shihab**.

Najwa terlihat ikut aksi jalan kaki sembari meneriakkan: 'Free Pakestine,' sembari membentangkan spanduk bertuliskan: 'Free Palestine, Stop Bombing Kids, Bombing Kids is Not Self Defense'. Dalam aksi itu, Najwa juga tampak ikut membagikan seribu semangka kepada para peserta lainnya, sebagai logo permohonan damai.

"Saya hadir sebagai manusia yang marah dan muak melihat penjajahan dan penderitaan yang dialami saudara-saudara kita di Palestina. Free Palestine!!!," teriaknya kepada media massa. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Museum Satria Mandala

Menyimpan Segudang Senjata Perang

SALAH satu bukti paling sahih—yang menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang — adalah keberhasilan kita memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tanpa perjuangan dan pengorbanan para pejuang, mustahil kemerdekaan itu bisa diraih. Pasalnya, setelah menjajah selama 3,5 abad, kolonialis Belanda tak kunjung rela kehilangan tanah jajahannya. Apalagi bangsa Jepang, yang baru menikmati indahnya penjajahan atas Indonesia selama 3,5 tahun sepertinya tak rela melepas Indonesia yang telah memproklamirkan dirinya sendiri.

Tetapi, bangsa Indonesia memang tidak ingin terus-menerus berada di bawah kangkangan para penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Jangankan berabad-abad lamanya, Jepang yang baru menjajah selama 3,5 tahun pun terus menghadapi perlawanan para pejuang Indonesia. Praktis, proklamasi pada 17 Agustus adalah bukti paling sahih atas istilah bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Terbukti, di seantero wilayah Indonesia terdapat nama-nama para pahlawan, yang namanya selalu harum meski sudah sejak lama gugur berkalang tanah.

Selain kemerdekaan itu sendiri, pengorbanan para pejuang juga bisa disaksikan di museum-museum perjuangan yang terdapat di berbagai tempat di Nusantara. Salah satunya adalah Museum Satria Mandala. Terletak di salah satu sudut keramaian Jakarta, tepatnya di Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Museum Satria Mandala terlihat sangat megah dan mewah. Di depan museum ini terdapat beberapa mesin perang

sekaligus penguasa wilayah udara Indonesia di zamannya. Sebut saja pesawat Amerika Utara seperti AT-16 Harvard, P-51 Mustang, dan B-25 Mitchell. Selain pesawat, juga ada helikopter buatan Uni Soviet, yaitu Mil Mi-4 yang dirancang untuk menandingi helikopter H-19 Chickasaw milik Amerika Serikat.

Keberadaan pesawat-pesawat tersebut di area depan museum membuat Satria Mandala terkesan sangat berwibawa. Selain itu, pesawat-pesawat tersebut juga mampu membuka cakrawala para pengunjung, betapa penting menguasai wilayah udara, demi pertahanan dan keamanan. Jika wilayah udara kita lemah, orang akan lebih mudah menguasai wilayah kita dengan melakukan penyerangan melalui udara terlebih dahulu.

Kehadiran pesawat-pesawat lawas di museum itu, juga bisa memberi pengalaman berbeda, yang dapat dirasakan masyarakat. Karena di saat bersamaan pengunjung dimanjakan dengan taman kota nan asri dan nyaman di Taman Soekarno, Kampoeng Djoeang dan Taman Dirgantara. Tak lupa pula pengunjung dapat memakai sarana ibadah berupa Musollah Al-Fitri yang berdiri megah di sana.

Jadi, bukan hanya orang dewasa dan para remaja saja yang layak berkunjung ke Museum Satria Mandala, tetapi anak-anak

hingga kakek nenek pun bisa menikmati museum dan seisinya. Bagi anak-anak tentunya menjadi tahu bagaimana beratnya perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Sedangkan bagi kaum kakek-nenek, barangkali, bisa mengenang kembali perjuangan fisik masa itu.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Panglima Besar Soedirman

Sebagaimana laiknya museum, Satria Mandala juga menjadi sumber sejarah bangsa Indonesia. Khususnya sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terutama, peran Tentara Nasional Indonesia. Tanah di atas bangunan museum merupakan bekas rumah Ratna Sari Dewi, istri Presiden Soekarno.

Pembangunan museum ini, antara lain didasari oleh semangat untuk mewariskan nilai-nilai luhur perjuangan tahun 1945. Sebagai penanggungjawab untuk mempersiapkan dan membangun museum adalah Brigjen TNI Nugroho Notosusanto, Kepala Pusat Sejarah TNI.

Semula, pembangunan direncanakan akan menggunakan Istana Presiden di Bogor. Namun, tidak diizinkan oleh Presiden Soeharto. Sebagai solusi, Presiden Soeharto menganjurkan untuk menggunakan Rumah Ratna Sari Dewi, yang pada saat itu disebut Wisma Yaso. Rumah ini kemudian mengalami pemugaran dan renovasi dimulai pada tanggal 15 November 1971. Dan, diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 5 Oktober 1972, bersamaan dengan Hari Tentara Nasional Indonesia. Satria Mandala yang digunakan untuk nama museum ini diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti lingkungan keramat para ksatria.

Aura Panglima Besar Jenderal Sodirman, di museum ini, sangat berasa. Salah satunya, karena terdapat satu ruangan yang memang didedikasikan untuk Jenderal Sodirman. Dalam ruang tersebut terdapat berbagai benda sejarah seperti seragam, tas, bintang jasa, jaket, tongkat, sampai tandu yang digunakan untuk mengangkat Jenderal Soedirman ketika jatuh sakit. Selain itu, terdapat juga beberapa foto sebagai bukti dokumentasi sejarah. Dengan hadirnya ruangan itu pengunjung diharap dapat merasakan semangat juang sang Jenderal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Selain panglima Besar Soedirman ada juga bermacam senjata yang tersimpan di sekitar area tersebut. Termasuk dua buah patung, yaitu patung Jenderal Oerip dan patung Jenderal Soedirman. Selain ruangan khusus Pak Dirman, Museum Satria Mandala juga memiliki sebuah ruangan yang dikhususkan sebagai tempat penyimpanan spanduk-spanduk milik para pasukan. Bangunan ini juga berisi beberapa peninggalan dari petinggi militer, mulai dari Jenderal Soedirman, Jenderal Oerip Soemohardjo, Jenderal Abdul Haris Nasution, hingga Jenderal Soeharto.

Jelang peringatan hari Pahlawan 10 November, Museum Satria Mandala layak untuk dikunjungi. Selain berwisata, kunjungan ke Satria Mandala sangat berguna untuk mengenalkan sejarah pada anak-anak. Memupuk jiwa patriotisme dan cinta tanah air. ❑

MBO

Membakar Alqur'an Bukan Kebebasan Berekspresi Tapi Bentuk Islamophobia dan Pelanggaran HAM

AKSI radikal intoleran yang menjurus kepada perilaku Islamophobia kembali bermunculan di Eropa sejak beberapa bulan terakhir. Dimulai sejak Januari 2023, dan berlanjut ke beberapa bulan setelahnya, sejumlah aksi dari kelompok sayap kanan di negara-negara Skandinavia, seperti di Swedia dan Denmark, melakukan aksi pembakaran Alqur'an. Adalah Rasmus Paludan, politisi ekstrimis asal Swedia yang memulai rangkaian aksi intoleran tersebut dengan penjagaan dari aparatur berwenang di Swedia.

Lalu, berturut-turut aksi serupa kembali terjadi di Swedia pada Juni 2023, dengan penyobekan dan pembakaran Alqur'an di Masjid Raya Stockholm, Swedia, yang bertepatan dengan perayaan hari Raya Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam Sedunia. Pelakunya adalah imigran non-Muslim asal Irak, dan sebulan kemuian, pelaku yang sama kembali melakukan aksi intolerannya dengan menginjak dan menendang Alqur'an.

Pada Agustus 2023, di Denmark, pembakaran Alqur'an berturut-turut dilakukan selama tiga hari oleh kelompok anti-Islam. Mereka melakukan pembakaran di sejumlah kedutaan besar negara-negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Bahkan, di depan Kedubes Indonesia di Kopenghagen, Denmark, pembakaran dilakukan berturut-turut selama tujuh hari. Sayangnya, aksi-aksi intoleran itu juga dilakukan (dan bahkan dilindungi oleh aparatur keamanan) di negara yang konon terkenal sebagai pengusung hak asasi manusia (HAM).

Pembiaran terhadap aksi pembakaran Alqur'an (simbol agama) tersebut di Swedia dan Denmark seakan menimbulkan perdebatan usang antara kebebasan berekspresi versus penghormatan terhadap simbol agama atau hak orang lain. Pihak otoritas Swedia dan Denmark kerap berargumen apa yang dilakukan oleh warga negaranya tersebut merupakan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia.

Padahal, apabila kita merujuk kepada putusan Pengadilan HAM Eropa, sebuah peradilan HAM yang terkuat di dunia, perdebatan tersebut seharusnya sudah diakhiri. Bahwa kebebasan berekspresi atau berpendapat tidak boleh menghina ajaran agama. Salah satu kasus yang menjadi rujukan adalah Kasus Nyonya ES vs Austria. Dimana Nyonya ES menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pedofilia karena menikahi wanita di bawah umur. Atas tuduhannya tersebut, Nyonya ES dihukum pidana berdasarkan hukum nasional Austria. Tidak terima dengan putusan itu, Nyonya ES pun lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan HAM Eropa dengan dalih adanya pelanggaran HAM, terutama kebebasan berekspresi, dalam kasusnya tersebut.

Dalam putusannya, Pengadilan HAM menolak gugatan Nyonya ES, dan berkesimpulan bahwa menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pedholfilia merupakan penistaan agama, bukan kekebasan berekspresi atau berpendapat. Pengadilan HAM Eropa secara tegas menyatakan bahwa menampilkan sosok yang berkaitan dengan keagamaan secara provokatif dapat menyakiti perasaan para pengikut agama tersebut. Dan, hak tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran berbahaya terhadap semangat toleransi, yang merupakan salah satu basis dari masyarakat demokratis.

'Semangat toleransi' inilah yang seharusnya dirujuk oleh Pemerintah Swedia dan Denmark ketika menangani segelintir teroris intoleran yang membakar Alqur'an. Karena tanpa adanya toleransi

Oleh:
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA
Wakil Ketua MPR RI

satu sama lain, maka dunia akan mengalami kekacauan, dan akan menimbulkan aksi balas dendam dari pihak lain. Respon keras dari negara-negara Muslim terhadap hal tersebut tentu sangat dapat dipahami sebagai konsekuensi dari pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Swedia dan Denmark.

Oleh karena itu, sikap Kementerian Hukum Swedia yang dikabarkan sedang mengkaji merevisi aturan hukum nasionalnya agar bisa menjerat pelaku-pelaku penista agama, seperti pembakaran dan penistaan Alqur'an sangat patut diapresiasi. Sikap tersebut sangat dibutuhkan untuk menciptakan harmoni antarumat di seluruh dunia, sehingga tidak ada sikap yang saling merendahkan atau menghina satu sama lain.

Selain bisa merujuk kepada putusan Pengadilan HAM Eropa itu, beberapa instrumen hukum internasional yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa juga patut digunakan sebagai rujukan utama. Pertama, pasal 29 ayat (2) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang pada intinya mengatur bagaimana hak-hak asasi dan kebebasan yang diberikan harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain. Kedua, sikap PBB yang tegas memerangi segala bentuk Islamophobia dengan menetapkan 15 Maret 2022 sebagai hari internasional untuk menangkal Islamophobia, di mana salah satu bentuknya adalah pembakaran Alquran tersebut. Ketiga, adanya Resolusi Dewan HAM PBB Nomor A/HRC/53/L.23 yang diputuskan pada 12 Juli 2023 yang berisi kutukan dan penolakan setiap bentuk kebencian keagamaan, termasuk tindakan pembakaran Alquran tersebut.

Dan, terakhir, Indonesia yang tegas menolak laku radikal pembakaran Alqur'an bahkan sudah memanggil Dubes Swedia dan Denmark, selain menggalang kebersamaan dengan OKI dll., juga perlu mengingatkan Swedia dan Denmark sebagai Anggota Mahkamah HAM Eropa dan Dewan HAM PBB, agar konsisten mengikuti keputusan2nya, sehingga sikap radikal dan intoleran dengan membakar Alqur'an bisa dihentikan. Selain itu, pihak Indonesia juga penting menyebarkan model HAM yang dianutnya kepada masyarakat dunia, termasuk Swedia dan Denmark, guna menciptakan harmoni dan kerukunan antarbangsa dan agama di seluruh dunia. Model HAM ala Indonesia itu adalah ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana nilai-nilai agama digunakan sebagai salah elemen dalam membatasi HAM.

Ketentuan Pasal 28J ayat (2) itu secara lengkap berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Bila instrumen HAM internasional dan beberapa aturan HAM di negara lain hanya memasukkan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum sebagai faktor membatasi HAM, di Indonesia, ada faktor agama yang dimasukkan. Ini tentu memiliki tujuan agar HAM tidak sembarangan untuk digunakan untuk menghina atau menistakan agama, karena HAM sendiri adalah hak asasi yang melekat kepada seluruh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. ❑

News Maker, Berani Bersikap, dan Dekat Wartawan

Kiprah Bambang Soesatyo selama menjadi wakil rakyat kerap mendapat sorotan dari para wartawan. Hal demikian bisa terjadi, karena sikapnya yang berani menyampaikan pendapat, gagasa, dan solusi dari berbagai permasalahan. Buku tentang dirinya ini diharap menjadi inspirasi bagi para wakil rakyatnya untuk bersikap, namun harus didukung data yang akurat.

KIPRAH Bambang Soesatyo sejak dirinya menjadi anggota MPR/DPR, Ketua Komisi III DPR, Ketua DPR, hingga Ketua MPR, tak sekadar rutin bekerja sebagai politisi, namun ia juga aktif menyikapi berbagai permasalahan yang ada. Sikap politiknya yang lantang, kritis, dan terkadang tak sejalan dengan kebijakan induk partainya, Golkar, membuat pria kelahiran Jakarta itu kerap menjadi sorotan wartawan, bahkan menjadi *news maker*.

Sejak menjadi anggota MPR/DPR, pada tahun 2009 banyak sudah sikapnya yang membuat menjadi berita (*news maker*). Kisah menjadi *news maker* itulah yang oleh para wartawan dijadikan buku yang berjudul: *Bambang Soesatyo News Maker, Satu Dasawarsa 'The Politician' Senayan.*

Buku dengan sampul muka dirinya saat di-door stop wartawan itu terbagi menjadi enam bab, dengan tebal 348 halaman. Dalam bab-bab yang ada menguraikankan gagasan, solusi, pendapat, dan sikapnya mengenai berbagai permasalahan yang ada. Semua yang diungkap itu merupakan rangkaian aktivitas dirinya beberapa saat sebelum menjadi politisi hingga Ketua MPR Periode 2019-2024.

Menjadi *news maker*, tentu apa yang diungkap oleh pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu adalah ungkapan-ungkapan yang berani dan terkadang melawan arus. Nah itu bisa dibaca di Bab II sub-bab B dengan judul besarnya: *Ledakan Kasus Bank Century* (hal. 101). Pada masa itu, dirinya menjadi salah satu singa sidang dalam mengungkap masalah itu. Dilihat-lihat dari judul-judul di sub-babnya saja sudah sangat ngeri, seperti *Menunggu Kambing Hitam Century, Dukungan Hak Angket DPR Mulai Digalang, Amicus Curiae, Manuver Menyelamatkan Boediono; Tangis Untuk Bailout yang Manipulatif, Menolak 'Ajakan' Bohong Berjamaah,* serta judul-judul lain yang tak kalah dahsyatnya sehingga membuat alumni Universitas Jayabaya itu sering diburu wartawan untuk diminta pendapat.

Pria yang banyak memiliki jabatan di berbagai organisasi itu menjadi *news maker,* selain karena sikapnya yang berani juga karena kedekatan dan keakrabannya dengan para wartawan. Kedekatan dengan para wartawan bisa disimak di Bab V dengan judul *Interaksi Dengan Media Dalam Konteks Pemberitaan Nasional*. Di bab itu, Bamsoet dalam menjalin hubungan dengan wartawan tidak hanya secara person, namun juga melibatkan organisasi yang ada, baik PWI, persatuan wartawan parlemen, hingga para pimpinan media massa.

Di *Sambutan* (buku), alumni Program Doktor Universitas Padjadjaran itu mengakui diingatkan oleh rekan-rekan wartawan bahwa dalam masa yang relatif panjang, dirinya telah mewarnai ruang publik dengan rangkaian pernyataan untuk menyikapi dan menanggapi beragam isu. Mulai dari isu ekonomi, sosial, politik, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan serta isu-isu dalam bidang penegakan hukum.

Apa yang dilakukan tersebut, dalam *Sambutan,* diakui sejalan dengan dorongan dan pesan dari wartawan senior yang mengatakan untuk menjadi anggota DPR yang 'bunyi'. "Artinya, saya harus responsif dengan menyuarakan ragam masalah yang menjadi perhatian masyarakat," tuturnya.

Masyarakat pasti ingin para wakilnya, baik yang ada di DPR maupun DPRD, adalah sosok yang berani dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada. Dengan membaca buku ini diharap dapat menjadi inspirasi bagi para wakil rakyat untuk memenuhi harapan konstituen dan masyarakat pada umumnya, jadilah politisi yang responsisf. "Setiap isu atau masalah harus disikapi dengan bijaksana, proporsional, dan didukung dengan data yang akurat", paparnya. ❑

AWG

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI